



KABUPATEN
PASER

*Menuju Kabupaten Paser
Maju, Adil dan Sejahtera*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kab. Paser Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT

Jl. Kusuma Bangsa Km 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav.2
Telp (0543) 21104, 21038 Fax (0543) 23212
TANA PASER

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Paser.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tana Paser, Maret 2024

Inspektur



Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

KATA PENGANTAR



dr. Fahmi Fadli
Bupati Paser

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 ini juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021–2026, Tentu saja hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun kedua dalam masa RPJMD Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, beserta target kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Paser, dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dalam upaya memenuhi **Visi “ Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan laporan kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, sehingga akan diperoleh umpan balik berbagai pihak yang berkepentingan dan langkah nyata bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk melakukan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

LKjIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Paser Tahun 2023 ini dapat dijadikan cermin bagi kita semua untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh ditahun akan datang agar senantiasa memegang teguh prinsip transparasi, partisipatif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas yang baik, akan memberikan kontribusi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**) menuju terwujudnya pelayanan prima dan Paser MAS (**Maju, Adil dan Sejahtera**) di Kabupaten Paser.

Tana Paser, Maret 2024

BUPATI PASER,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 diukur dari capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bupati/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, bahwa telah ditetapkan IKU Bupati/Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sebanyak 4 indikator kinerja tujuan dan 14 indikator kinerja sasaran. Capaian IKU ini secara garis besar menggambarkan pula capaian kinerja tahun 2023 atas RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Rata-rata realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 sebesar **123,41 Persen** (Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017) termasuk dalam kategori peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Dalam Laporan LKjIP ini telah juga membandingkan capaian kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja dengan target kinerja Provinsi, Nasional maupun Internasional yang memiliki kesamaan indikator kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Paser, selain itu juga membandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Paser sudah melaksanakan proses yang berkaitan dengan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, baik dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASER	2
A. Geografi dan Iklim	3
B. Pemerintahan.....	6
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	10
D. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	15
2.2 VISI	15
2.3 MISI	17
2.4 TUJUAN DAN SASARAN	17
2.5 ISU STRATEGIS	21
2.6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
2.7 PROGRAM.....	37
2.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN	46
2.9 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	54
3.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023	55
A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan.....	55
B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran	56

**LKjIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

3.2	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2023	58
3.3	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	129
3.4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD	131
3.5	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL.....	133
3.6	ANALISIS CAPAIAN PROGRAM YANG MENDUKUNG TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	137
3.7	ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	144
3.8	AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023.....	146
3.9	TINDAKLANJUT REKOMENDASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	164
BAB IV PENUTUP		171

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	PETA WILAYAH KABUPATEN PASER.....	2
GAMBAR 1.2	KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM.....	3
GAMBAR 1.3	PERSENTASE WILAYAH MENURUT KECAMATAN.....	4
GAMBAR 1.4	LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN (%)	5
GAMBAR 1.5	BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KECAMATAN	7
GAMBAR 1.6	JUMLAH PNS MENURUT JENIS KELAMIN 2019-2023	7
GAMBAR 1.7	JUMLAH PNS MENURUT INSTANSI DAN JENIS KELAMIN 2023.....	8
GAMBAR 1.8	APBD KABUPATEN PASER 2017-2023.....	9
GAMBAR 1.9	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN TAHUN 2023.....	11
GAMBAR 1.10	BANYAKNYA PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023	12
GAMBAR 1.11	APM DAN APK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2023	14
GAMBAR 1.12	JUMLAH RSU, RUMAH BERSALIN, PUSKESMAS, KLINIK/BALAI KESEHATAN POSYANDU DAN POLINDAS TAHUN 2023.....	14
GAMBAR 3.1	PROSES BISNIS SASARAN 1	61
GAMBAR 3.2	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN 1	62
GAMBAR 3.3	PROSES BISNIS SASARAN 2	69
GAMBAR 3.4	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN 2	70
GAMBAR 3.5	PROSES BISNIS SASARAN 6	92
GAMBAR 3.6	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN 6	92
GAMBAR 3.7	PROSES BISNIS SASARAN 7	102
GAMBAR 3.8	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN 7	102
GAMBAR 3.9	PROSES BISNIS SASARAN 8	110
GAMBAR 3.10	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN STRATEGIS 8	110
GAMBAR 3.11	PROSES BISNIS SASARAN STRATEGIS 9	116

**LKjIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

GAMBAR 3.12	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN 9	117
GAMBAR 3.13	PROSES BISNIS SASARAN STRATEGIS 10	123
GAMBAR 3.14	PETA LINTAS FUNGSI SASARAN STRATEGIS 10	124
GAMBAR 3.15	PERTUMBUHAN KAB/KOTA KALTIM	136
GAMBAR 3.16	<i>BENCHMARK</i> PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021-2023	136
GAMBAR 3.17	PERTUMBUHAN EKONOMI DI BEBERAPA NEGARA 2023	136

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN	5
TABEL 2.1	PROSES BISNIS KABUPATEN.....	16
TABEL 2.2	TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA.....	17
TABEL 2.3	MATRIK HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	19
TABEL 2.4	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 1	24
TABEL 2.5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 2	27
TABEL 2.6	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 3	30
TABEL 2.7	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI 4	34
TABEL 2.8	PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN STRATEGIS.....	37
TABEL 2.9	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	47
TABEL 2.10	PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA 2023.....	48
TABEL 3.1	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	55
TABEL 3.2	REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN	55
TABEL 3.3	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	56
TABEL 3.4	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1	59
TABEL 3.5	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2	66
TABEL 3.6	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3	75
TABEL 3.7	PEMBAGIAN TUGAS DALAM PENCAPAIAN STRATEGIS 3	76
TABEL 3.8	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 4	80
TABEL 3.9	UNIT KERJA YANG DILAKUKAN SURVEI IKM	80
TABEL 3.10	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 5	83
TABEL 3.11	JUMLAH KASUS KRIMINALITAS TAHUN 2017-2022	84
TABEL 3.12	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 6	85
TABEL 3.13	REKAPITULASI HASIL IKLI KAB. PASER 2023	88
TABEL 3.14	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 7	96
TABEL 3.15	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 8	107

TABEL 3.16	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 9	114
TABEL 3.17	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 10	119
TABEL 3.18	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	129
TABEL 3.19	PERBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	130
TABEL 3.20	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD	132
TABEL 3.21	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL	134
TABEL 3.22	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL	134
TABEL 3.23	ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	144
TABEL 3.24	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM YANG MENUNJANG SASARAN STRATEGIS	146

BAB I PENDAHULUAN

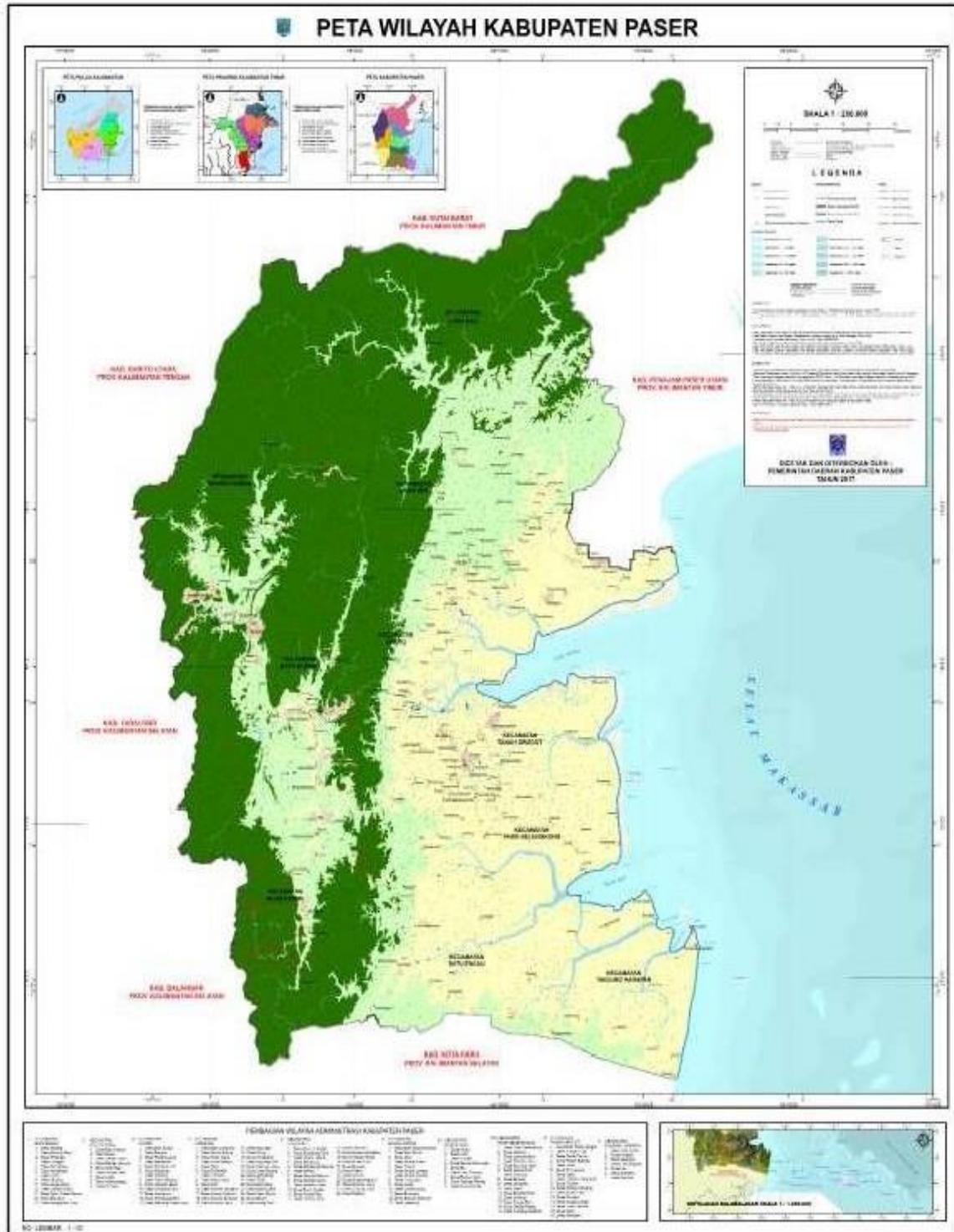
1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 merupakan capaian kinerja tahun ke dua dari RPJMD periode 2021-2026. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASER

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kab. Paser



A. Geografi dan Iklim

Gambar 1.2
Kondisi Geografis dan Iklim



Sumber : Kab. Paser dalam angka Tahun2024

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi 0° 48' 29.44" - 2° 37' 24.21" Lintang Selatan dan 115° 37' 0.77" - 118° 1' 19.82" Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser.

Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten

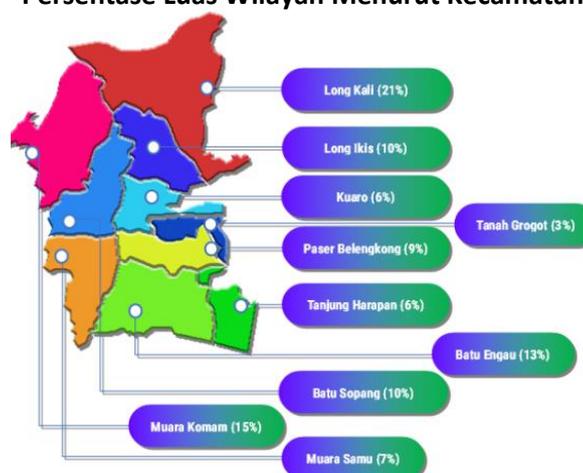
Penajam Paser Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat), sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).

Kedadaan Geografi Kabupaten Paser tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan serta sungai yang tersebar di seluruh Kecamatan. Dimana terdapat kekayaan 49 gunung/pegunungan yang tersebar di Kecamatan Muara Samu serta terdapat 41 sungai mengalir di wilayah Kecamatan Kuaro.

Adapun luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km².

Rata-rata jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser (Tanah Grogot) melalui jalan darat adalah 54 Km dengan jarak Kecamatan terjauh adalah Kecamatan Muara Komam dengan jarak sejauh 86 Km. Selain dapat melalui sarana transportasi darat menuju Ibukota Kabupaten Paser sejauh 57 Km, Kecamatan Tanjung Harapan dapat melalui sarana transportasi laut menuju Ibukota Kabupaten Paser dengan menempuh jarak 66 Km.

Gambar 1.3
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan

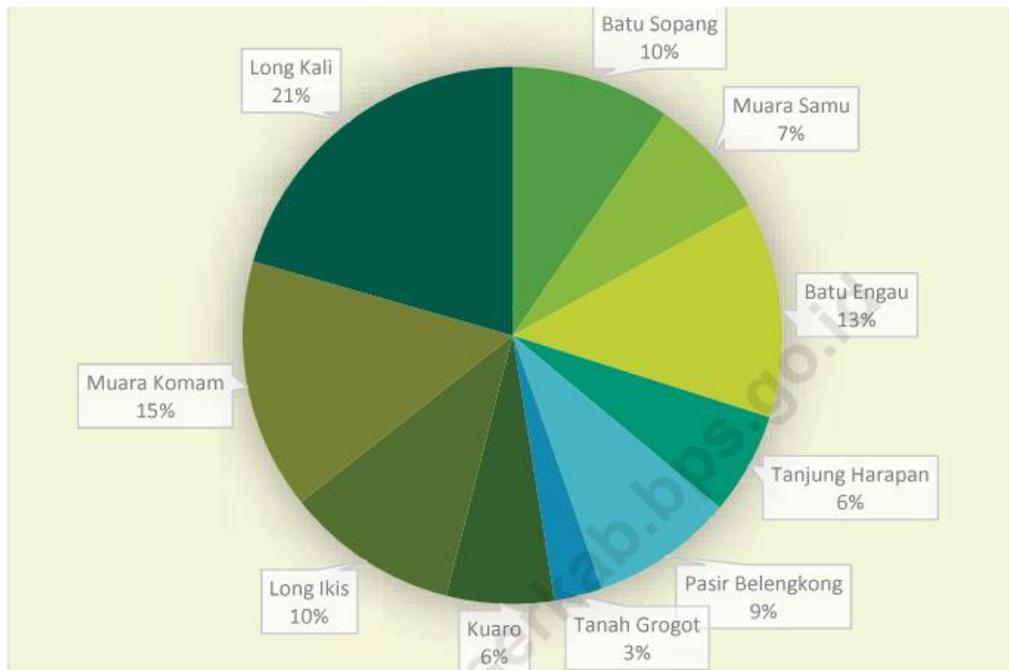


**Tabel 1.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kab. Paser**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
Batu Sopang	Batu Kajang	1.111,38	9,58
Muara Samu	Muser	855,25	7,37
Batu Engau	Kerang	1.507,26	12,99
Tanjung Harapan	Tanjung Aru	714,05	6,15
Pasir Belengkong	Pasir Belengkong	990,11	8,53
Tanah Grogot	Tanah Grogot	335,58	2,89
Kuaro	Kuaro	747,30	6,44
Long Ikis	Long Ikis	1.204,22	10,38
Muara Komam	Muara Komam	1.753,40	15,11
Long Kali	Long Kali	2.385,39	20,56
Paser	Tanah Grogot	11 603,94	100,00

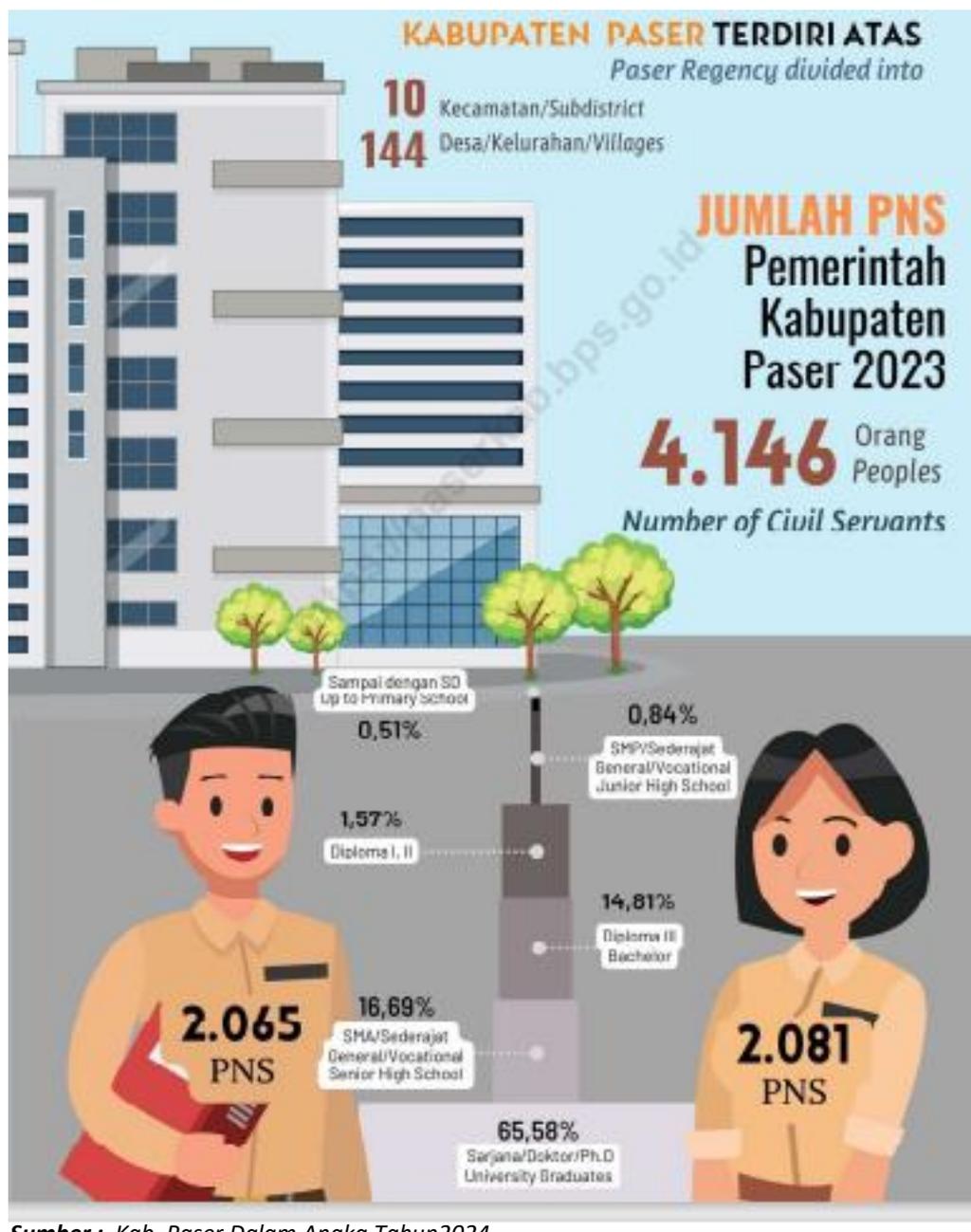
Sumber : Kab. Paser dalam angka Tahun2024

**Gambar 1.4
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) di Kab. Paser**



Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun2024

B. Pemerintahan



Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

❖ **Wilayah Administratif**

Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan, 139 desa, dan 5 kelurahan. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Desa/Kelurahan terbanyak terdapat di kecamatan Longikis, dengan 1 kelurahan dan 25 desa, sedangkan desa/kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjung Harapan yang hanya memiliki 7 desa.

Gambar 1.5
Banyaknya Desa/Kelurahan di Kab. Paser Menurut Kecamatan



❖ **Pegawai Negeri Sipil**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berjumlah 4.146 orang, yang terbanyak ada di Sekolah-Sekolah sebanyak 1.539 orang. Jika ditinjau berdasarkan Golongan, menurut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser, berdasarkan golongan I, II, III, dan IV pada tahun 2023 berturut-turut sebanyak 18 orang, 613 orang, 2.448 orang, dan 1.067 orang. Sedangkan bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai perempuan

Gambar 1.6
Jumlah PNS Kab. Paser Menurut Jenis Kelamin 2019-2023



Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

**Gambar 1.7
Jumlah PNS Kab. Paser Menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin 2023**

	Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22	11	33
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	9	26
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25	18	43
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	7	34
5	Badan Pendapatan Daerah	23	22	45
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	34	20	54
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19	17	36
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11	20	31
9	Dinas Kesehatan	23	31	54
10	Dinas Ketahanan Pangan	13	12	25
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	16	12	28
12	Dinas Lingkungan Hidup	61	21	82
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34	13	47
14	Dinas Pemadam Kebakaran	29	13	42
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17	11	28
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	22	11	33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	10	23
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65	30	95
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	26	41
20	Dinas Perhubungan	22	7	29

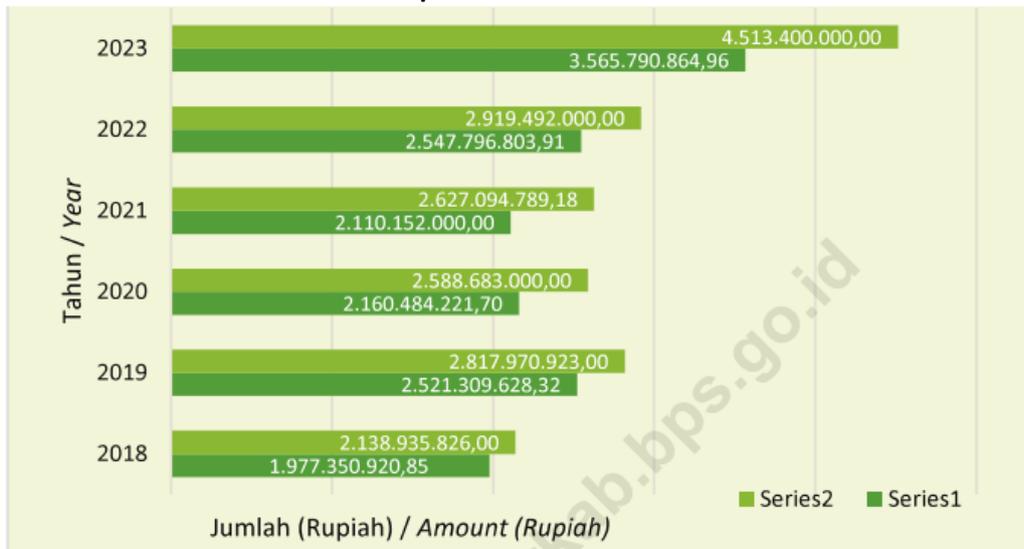
Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

❖ **Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser pada tahun 2023 adalah Rp 3.565.790.864.958,00 sedangkan anggaran belanja Kabupaten Paser Rp 4.513.400.000.000,00. Selama 4 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja terbesar ada di tahun 2023.

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

**Gambar 1.8
APBD Kabupaten Paser 2017-2023**



Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan



Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun2024

❖ **Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2023 mencapai 303.424 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 9.38% dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2020. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2023 adalah 107, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 107

penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Gambar 1.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Di Kabupaten Paser Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin Sex	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female
(1)	(2)	(3)
Batu Sopang	15.140	13.665
Muara Samu	4.155	3.615
Batu Engau	11.092	9.782
Tanjung Harapan	5.464	4.946
Pasir Belengkong	16.158	15.170
Tanah Grogot	43.185	41.902
Kuaro	16.348	15.558
Long Ikis	22.765	21.375
Muara Komam	7.554	6.760
Long Kali	15.042	13.748
Paser	156.903	146.521

Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

❖ **Ketenagakerjaan**

Selama kurun waktu 2022-2023, angkatan kerja di Kabupaten Paser meningkat dari 133.734 orang menjadi 134.940 orang. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 86,02 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 37,72 persen. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur 30 hingga 34 tahun memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan kelompok umur yang lain.

Gambar 1.10
Banyaknya pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan
Di Kabupaten Paser Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>No Schooling</i>	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	9	1	10
Sekolah Dasar <i>Primary School</i>	17	4	21
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	51	16	67
Sekolah Menengah Atas (Umum) <i>Senior High School (General)</i>	787	151	938
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) <i>Senior High School (Vocational)</i>	829	126	955
Diploma I/II/III/Akademi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	41	35	76
Universitas <i>University</i>	223	265	488
Jumlah/Total	1.957	598	2.555

Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

D. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat



Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

❖ **Pendidikan**

Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah peningkatan jumlah sekolah dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2022, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan adalah TK (Taman Kanak-Kanak) sebanyak 143 unit, RA

(Raudatul Athfal) sebanyak 10 unit, SD (Sekolah Dasar) 225 unit, MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 13 unit, SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 76 unit, MTs (Madrasah Tsanawiyah) sebanyak 17 unit, SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 17 unit, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebanyak 12 unit, MA (Madrasah Aliyah) sebanyak 15 unit, dan Perguruan Tinggi sebanyak 4 unit.

Gambar 1.11
APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Paser Tahun 2023

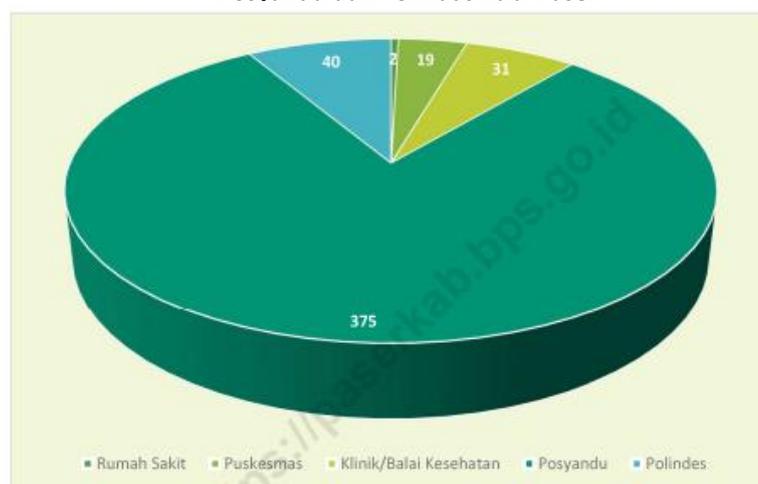
Jenjang Pendidikan Educational Level	APM Net Enrollment Rate	APK Gross Enrollment Rate
(1)	(2)	(3)
SD/MI/Sederajat Primary School	97,61	104,69
SMP/MTs/Sederajat Lower Secondary School	77,28	88,99
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	68,16	92,53

Sumber : Kab. Paser Dalam Angka Tahun 2024

❖ **Kesehatan**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan terus menerus dari tahun ke tahunnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Hingga akhir tahun 2023, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser, antara lain 2 rumah sakit, 19 puskesmas, 31 klinik/balai kesehatan, 375 posyandu, dan 40 polindes.

Gambar 1.12
Jumlah RSU, Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan,
Posvandu dan Polindas Kab. Paser



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

A. VISI

Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu:

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

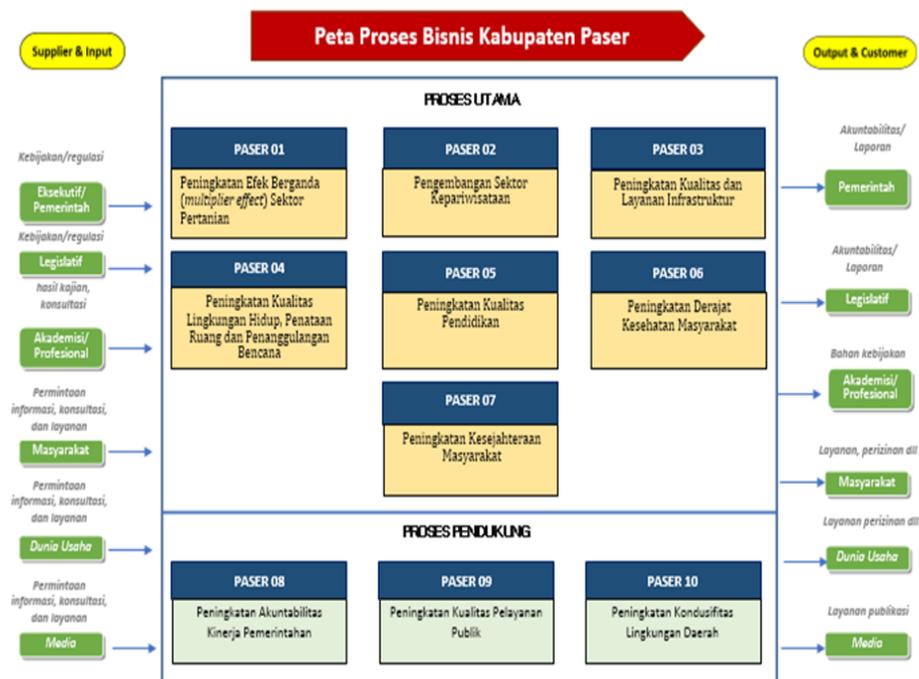
- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidahkaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama dan pendukung, yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

**Tabel 2.1
Peta Proses Bisnis Kabupaten**



2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana table berikut:

**Tabel 2.2
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang	4,73
	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	5,35
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	60,01
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	83,50
	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	75

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	59,18
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,56
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	195
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,30
		Rata-rata Lama Sekolah	8,90
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,90
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5

**Tabel 2.3
Matriks Hubungan antara Visi, Misi
Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Paser**

Misi 1		Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing							
Tujuan 1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi local /non tambang	4,87	4,90	1,32	2,32	2,50	3,64	4,20
2	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	-2,28	-1,00	0,01	1,12	2,21	2,51	2,83
Misi 2		Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan							
Tujuan 2		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	58,41	59	61	65	70	75	81
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	73,61	80	80	81	82	83	84
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	53	53	52	51	50	49	48

LKjIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

Misi 3		Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan							
Tujuan 3		Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	N/A	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,68	47,50	52,73	59,18	65,82	72,47	78,91
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	70,09	71,43	71,48	71,53	71,58	71,63
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	196	196,4	195,5	195	194,5	194	193,5
Misi 4		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing							
Tujuan 4		Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	13,10					
		Rata-rata Lama Sekolah	8,55	8,55	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,62	72,71	72,80	72,90	73,10	73,20	73,30
3	Meningkatnya Kesejahteraan	Angka Kemiskinan	9,23	8,50	8,00	7,30	6,80	6,30	5,80

Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	4,50	3,45	3,17	3,15	3,12	3,10
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

2.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang (Permendagri nomor 86 tahun 2017). Isu strategis dapat digolongkan ke dalam isu internal dan eksternal, yang jika dilihat dari karakternya dapat berupa hal yang mendorong dan juga dapat berupa hal yang menghambat upaya kita untuk mencapai sasaran.

A. Isu Strategis Internal

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama Kabupaten Paser dalam pembangunan adalah terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Paser yang berdampak pada terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat.

2. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah dalam bidang sumber daya manusia maka dirumuskanlah isu-isu strategis, sebagai berikut. Hingga saat ini kualitas pembangunan manusia yang didekati dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan bahwa Paser masih relative tertinggal dibandingkan dengan rata rata propinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan yang cenderung melambat.

3. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser adalah kinerja tata Kelola pemerintahan yang belum optimal. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengembangan e-government belum sepenuhnya diterapkan dan belum mengarah pada smart governance, belum optimalnya

pelayanan publik serta pengelolaan potensi rawan konflik dan Trantibum yang belum optimal.

4. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Perekonomian Paser yang bertumpu pada pertambangan mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di satu sisi perekonomian yang bertumpu pada sektor pertambangan pertumbuhannya mulai menurun sejalan dengan semakin berkurangnya bahan tambang. Pada sisi lain sektor pertanian yang menjadi tumpuan penduduk terbanyak didominasi oleh kelapa sawit yang memiliki efek ganda (multiplier effect) rendah bagi perekonomian. Industri skala kecil berbasis sumber daya lokal dan industri kreatif (pariwisata) tidak berkembang.

B. Isu Strategis Eksternal

1. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Wilayah Penajam Paser Utara

Status Kabupaten Paser sebagai daerah mitra IKN akan menarik masyarakat untuk datang dan tinggal di Kabupaten Paser. Kebijakan pemerintah pusat ini tentunya menjadi peluang ketika Paser dapat bersiap, namun akan menjadi ancaman jika Paser berjalan seperti biasa. Pada aspek ekonomi peluang itu setidaknya muncul dari tingginya permintaan berbagai produk dari mulai produk pangan sampai produk industri. Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN, dari sektor pertanian akan mendapatkan peluang untuk menyiapkan pangan bagi penduduk di Ibu Kota Negara yang baru ini, seperti beras, sayur, buah-buahan, daging dan ikan, kebutuhan akan hiburan masyarakat, industri pengolahan hasil kecil-menengah dan industri besar akan tumbuh dengan sendirinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Telake di Kecamatan Long Kali, menjadi isu strategis eksternal yang sangat didambakan pada sector pertanian.

Dengan adanya bendungan tersebut setidaknya dapat mengairi sawah di kecamatan Long Kali dan Long Ikis yang merupakan kecamatan sentra sawah di Kabupaten Paser. Pada 2 kecamatan tersebut terdapat potensi sawah yang dapat dicetak. Pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk pengairan sawah, namun juga pemenuhan pengairan pertanian dalam arti luas.

Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan konsumsi masyarakat dan pendistribusian pangan ke daerah lain dapat dilaksanakan.

3. Pengembangan Food Estate dan Mini Ranch

Food Estate atau “Perkampungan Industri Pangan” merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Paser yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional atau belum target sebesar 41% (91 indikator) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan panjang dalam pencapaian indikator TPB yang didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional.

5. New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan)

New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) adalah hasil dari Konferensi PBB mengenai Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang Berkelanjutan atau dikenal dengan Konferensi Habitat yang ke III yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016.

Dalam mendukung New Urban Agenda pemerintah Kabupaten Paser perlu melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penanganan kawasan permukiman kumuh khususnya pada wilayah perkotaan, pembangunan perumahan yang terjangkau, penyediaan sarana air minum dan sanitasi, penyediaan ruang publik, fasilitas social dan penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

2.6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi sehingga pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dapat terwujud.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut strategi dan arah kebijakan Kabupaten Paser dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Misi 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing Sasaran

**Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1**

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing		
	1.1. Meningkatkan efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	1. Pengembangan kawasan peternakan (Mini Ranch) dan produksi peternakan 2. Pengembangan kawasan pertanian (Food Estate) dan kawasan Hortikultura 3. Peremajaan komoditi Kelapa Sawit dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya 4. Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan industri berbasis sumber daya	5. Peningkatan Mutu hasil dan nilai

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pertanian (agro industri)	tambah produk pertanian 6.Pengembangan industri olahan oleh IKM dan UMKM bahan baku berbasis pertanian
		Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit	7.Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO
		Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan memanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industry	8.Penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan
	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	9.Pengembangan daya Tarik wisata alam, 10.Pengembangan daya Tarik wisata budaya dan sejarah 11.Pengembangan daya Tarik wisata buatan 12.Peningkatan promosi pariwisata 13.Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 14.Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pengembangan pusat olahraga (Sport Center) 15.Peningkatan kualitas fasilitas

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			daya tarik wisata berupa Pembangunan Menara Pandang (viewing deck)
		Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	16. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa anggungan dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan mudah
		Mendorong tumbuhnya investasi sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat	17. Penguatan peran usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan pariwisata
		Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	18. Mempercepat kemudahan investasi yang berorientasi usaha kecil dan pariwisata
		Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	19. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan transportasi menuju objek wisata

**Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan**

**Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2**

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis money follows program priority 2. Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan 3. Mewujudkan Opini BPK : WTP 4. Peningkatan kontribusi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan 5. Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
		Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	6. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Penerapan SPIP Terintegrasi di Perangkat Daerah 8. Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sesuai STRANAS PK
		Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah	9. Peningkatan pengetahuan dan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keterampilan aparaturnya berbasis kompetensi
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	10. Implementasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial
		Revitalisasi struktur kelembagaan OPD	11. Penataan struktur organisasi yang proporsional
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	12. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju smart city (kota pintar) 13. Peningkatan penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
		Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi	14. Percepatan penerapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia 15. Peningkatan kemudahan dan keamanan layanan informasi
		Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet	16. Peningkatan kerjasama dengan penyedia jasa jaringan internet
		Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik	17. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengembangan zona integritas
		Mengembangkan sistem manajemen komplain handling	18.Membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan public	19.Peningkatan standar kualitas pelayanan publik 20.Pelaksanaan Desentralisasi urusan pemerintah daerah ke Kecamatan/Kelurahan 21.Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas
	3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Penguatan penegakkan Perda	22.Peningkatan intensitas pengawasan 23.Peningkatan kapasitas personil penertiban 24.Penindakan dan evaluasi pelanggaran Peraturan daerah
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	25.Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan 26.Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat
		Peningkatan Kualitas Legislasi daera	27.Penetapan produk hukum daerah

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			tepat waktu 28. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pendidikan politik dan perilaku demokratis	29. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu 30. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	31. Peningkatan peran BNK dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye, deteksi dini, pendidikan dan pemetaan kawasan. 32. Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN

Misi 3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tabel 2.6
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup		
	1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota	1. Peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah sentra pertumbuhan ekonomi; 2. Pembangunan Jalan

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.	untuk memperlancar mobilitas Barang/Jasa pada daerah rendah konektivitas; 3.Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan mantap khususnya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan; 4.Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan; 5.Peningkatan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan; 6.Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan;
		Meningkatkan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik	7.Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah;
		Percepatan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.	8.Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
		Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman	9.Peningkatan penanganan rumah korban bencana 10. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni 11.Pengelolaan dan pengembangan spam di daerah kabupaten 12.Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten. 13.Pembangunan dan

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.	14.Peningkatan sarana dan prasarana air baku; 15.Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir; 16.Operasi dan Pemeliharaan Sungai wilayah Kabupaten; 17.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder kewenangan Kabupaten
		Melakukan Kerjasama /Sharing pendanaan infrastruktur.	18.Melakukan Pinjaman Daerah dalam pengembangan infrastruktur 19.Meningkatkan peran serta perusahaan dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang.	20.Mempercepat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang setiap Kecamatan; 21.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan kawasan sesuai rencana tata ruang
		Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	22.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan

No	Tujuan /Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	22.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Penguatan komunitas tangguh bencana.	23.Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana; 24.Melakukan pembentukan dan kolaborasi komunitas-komunitas peduli bencana
		Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.	25.Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah; 26.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 27.Meningkatkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah yang fokus di bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sampah	28. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA; 29. Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; 30.Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan 3R (reduce, reuse, recycle) di rumah tangga

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

**Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4**

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata		
	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter	1. Penyediaan sarana dan prasarna pendidikan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pelaksanaan pendidikan karakter dengan memperhatikan aspek religious, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan
		Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi	3. Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem	4. Penguatan kapasitas kelembagaan puskesmas dalam bentuk BLUD 5. Peningkatan capaian akreditasi

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit	puskesmas serta capaian SPM 6.Penguatan fasilitas pelayanan dasar dan rujukan, kompetensi tenaga kesehatan, tata kelola dan pengendalian penyakit
		Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	7.Meningkatkan upaya promosi, preventif, surveillence serta peran serta masyarakat/dunia usaha dan pemanfaatan inovasi teknologi
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana	8.Meningkatkan Pengendalian penduduk, pembinaan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan	9.Penguatan PUG PUHA, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan system data dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal,	10.Meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi perlindungan dan jaminan social, serta pelayanan social masyarakat korban bencana 11.Mengembangkan

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha</p>	<p>kesenian tradisional pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman</p> <p>12.Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan kapasitas kepramukaan</p> <p>13.Meningkatkn perlindungan perempuan. Kualias keluarga dan pengarusutamaan hak anak</p>
		<p>Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan /hubungan industri</p>	<p>14.Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan pekerja mandiri</p> <p>15.Meningkatkan kualitas balai latihan kerja daerah serta mengoptimalkan peluang kemitraan dengan perusahaan/badan usaha swasta</p> <p>16.Meningkatkan kondisivitas dan keberlangsungan usaha melalui</p>

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penyelesaian konflik hubungan industrial yang berkeadilan, dan mendorong peran pengusaha dalam hal kesejahteraan

2.7 PROGRAM

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
Meningkatnya efek berganda(multiplier effect) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) 3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) 4. Perekonomian dan Pembangunan 5. Penyuluhan Pertanian 6. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) 7. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		<ul style="list-style-type: none"> 9. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan) 10. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) 11. Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) 12. Pengelolaan Perikanan Tangkap 13. Pengelolaan Perikanan Budidaya 14. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 15. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 16. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan 17. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 18. Penanganan Kerawanan Pangan 19. Pengawasan Keamanan Pangan 20. Perencanaan dan Pembangunan Industri 21. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota 22. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 23. Promosi Penanaman Modal 24. Pelayanan Penanaman Modal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 7. Pengembangan Ekspor 8. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 9. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 10. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 12. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian 13. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 14. Pengembangan UMKM
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	
Meningkatnya	Angka Kriminalitas	1. Peningkatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
<p>Lingkungan Daerah yang Kondusif</p>		<p>Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa 4. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 5. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 7. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 8. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
<p>Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur</p>	<p>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Jalan 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Penataan Bangunan Gedung 4. Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6. Pengembangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Perumahan
		7. Kawasan Permukiman
		8. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		9. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		11. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		12. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		14. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		15. Pengelolaan Pelayaran
		16. Pengelolaan Perkeretaapian
		17. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		18. Pembangunan Kawasan transmigrasi
		19. Pengembangan Kawasan transmigrasi
		20. Perencanaan Lingkungan Hidup
		21. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		22. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		23. Pembinaan dan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 24. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 25. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEPengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLHHATI) 26. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 27. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 28. Pengelolaan Persampahan 29. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 30. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 31. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 32. Penanggulangan Bencana 33. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 34. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 35. Penetapan Tanah Ulayat 36. Penatagunaan Tanah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana</p>	<p>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p> <p>Indeks Risiko Bencana (IRB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 15. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 16. Program Penetapan Tanah Ulayat 17. Program Penatagunaan Tanah 18. Program Penanggulangan Bencana
<p>Meningkatnya kualitas Pendidikan</p>	<p>Angka Harapan Lama Sekolah</p> <p>Rata-rata Lama Sekolah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengembangan Kurikulum 3. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Pengembangan Bahasa Dan Sastra 6. Pembinaan Perpustakaan 7. Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Kuno
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 6. Program Perencanaan Tenaga Kerja 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Hubungan Industrial 10. Program Pengendalian Penduduk 11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 12. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 13. Program Pengarusutamaan Gender dan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
		Pemberdayaan Perempuan 14. Program Perlindungan Perempuan 15. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 16. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 17. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 18. Program Perlindungan Khusus Anak 19. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 20. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 21. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 22. Program Pengembangan Kebudayaan

2.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan meliputi : (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Indeks Reformasi Birokrasi, (3) Indeks Gini, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN TUJUAN



PERTUMBUHAN EKONOMI

TARGET : 2,32



INDEKS REFORMASI BIROKRASI

TARGET : 65



2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2. 9
Perjanjian Kinerja Kab. Paser Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,73
2	Berkembangnya sektor pariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	5,35
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	60,01
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	83,50
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	75
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup,	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	59,18
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,56
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	195
8	Meningkatnya Kualitas	Angka Harapan Lama	13,30

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
	Pendidikan	Sekolah	
		Rata-rata Lama Sekolah	8,90
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,90
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	522.720.673.374
2	Program Pengembangan Kurikulum	40.458.100
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.405.572.520
4	Program Pengembangan Kebudayaan	314.846.900
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.854.306.878
6	Program Pembinaan Sejarah	353.152.000
7	Program Pengelolaan Permuseuman	1.099.616.000
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.922.911.380
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.201.046.000
10	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	61.749.700
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	75.734.200
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	106.003.400.000

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	40.024.250.130
14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.000.000
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.025.000.000
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.470.308.864
17	Program Penataan Bangunan Gedung	158.496.439.471
18	Program Penyelenggaraan Jalan	773.800.055.600
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	613.800.000
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.238.095.973
21	Program Pengembangan Perumahan	1.069.600.000
23	Program kawasan permukiman	6.968.726.076
24	Program Perumahan Dan kawasan Permukiman kumuh	3.801.200.000
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	119.225.023.094
26	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	249.430.000
27	Program Penyelesaianganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk pembangunan	3.328.969.526
28	Program Penetapan Tanah Ulayat	71.241.400
29	Program Penatagunaan Tanah	131.538.660
30	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	3.365.700.000
31	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	1.724.821.611
32	Program Penanggulangan Bencana	2.649.840.000
33	Progam Pemberdayaan Sosial	382.223.540
34	Progam Rehabilitasi Sosial	613.695.350
35	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	559.958.066
36	Program Penanganan Bencana	352.785.420
37	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	162.051.236
38	Program Perencanaan Tenaga Kerja	16.660.300
39	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	738.120.101
40	Program Penempatan Tenaga Kerja	193.339.660

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
41	Program Hubungan Industrial	6.874.538.800
42	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	104.200.000
43	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	88.200.000
44	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	197.186.034
45	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	659.928.174
46	Program Perlindungan Perempuan	219.485.000
47	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.999.960
48	Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	20.259.690
49	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	297.365.000
50	Program Pengendalian Penduduk	413.800.000
51	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.475.438.000
52	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.751.716.960
53	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.234.999.800
54	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.428.923.472
55	Program Penanganan Kerawanan Pangan	854.520.000
56	Program Pengawasan Keamanan Pangan	489.289.100
57	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	894.370.000
58	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.069.573.400
59	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.993.885.477
60	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (b3) dan limbah berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	144.917.050
61	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	152.312.000
62	Program Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak Mha Yang terkait Dengan PPLH	29.750.000
63	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	160.550.300
64	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk	59.863.000

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
	Masyarakat	
65	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	116.770.000
66	Program Pengelolaan Persampahan	18.166.200.740
67	Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	35.152.801.907
68	Program Pendaftaran Penduduk	425.200.000
69	Program Pencatatan Sipil	313.764.700
70	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.410.962.300
71	Program Penataan Desa	5.000.000
72	Program Peningkatan Kerjasama Desa	43.770.000
73	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.184.397.576
74	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.118.489.350
75	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.176.404.585
76	Program Pengelolaan Pelayaran	845.328.800
77	Program Pengelolaan Perkeretaapian	113.800.000
79	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.476.473.185
80	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.027.461.371
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	323.948.100
82	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	87.490.000
83	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	523.040.000
84	Program Promosi Penanaman Modal	236.600.000
85	Program Pelayanan Penanaman Moda	879.771.850
86	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	605.800.000
87	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	131.199.857
88	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	682.442.300
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.706.697.468
90	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.913.780.246
92	Program Pemasaran Pariwisata	581.849.100

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
93	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	853.747.555
94	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	509.971.500
95	Program Pembinaan Perpustakaan	11.068.584.350
96	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	6.594.800
97	Program Pengelolaan Arsip	141.319.700
98	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	153.339.200
99	Program Perizinan Penggunaan Arsip	49.335.200
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.486.088.300
101	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	49.995.000
102	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.244.212.060
103	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Tanaman pangan)	6.042.965.015
104	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Tanaman pangan)	56.917.854.000
105	Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Dinas Tanaman pangan)	182.999.700
106	Program Penyuluhan Pertanian	5.034.629.905
107	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Perkebunan)	6.089.488.787
108	Program Penyediaan Dan pengembangan Prasarana pertanian (Dinas Perkebunan)	96.710.861.900
109	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	875.187.157
110	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dinas Perkebunan)	87.338.700
111	Program Perizinan Usaha Pertanian	125.800.000
112	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	54.999.600
113	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	262.000.000
114	Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	54.999.80
115	Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	254.999.700
116	Program Pengembangan UMKM	1.343.848.900
117	Program Perizinan Dan Pendaftaran	54.998.800

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
	Perusahaan	
118	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.145.582.820
119	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	69.993.400
120	Program Pengembangan Ekspor	34.997.800
121	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	429.481.586
122	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri	134.986.800
123	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	3.041.984.90
124	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	159.975.00
125	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.267.872.732
126	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.794.712.200
127	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.186.739.920
128	program pengelolaan keuangan daerah	352.497.740.350
129	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	9.717.940.000
130	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.847.985.500
131	Program epegawaian Daerah	11.292.098.794
132	Program Pengelolaan Pendidikan	522.720.673.374
133	Program Pengembangan Kurikulum	40.458.100
134	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.405.572.520
135	Program Pengembangan Kebudayaan	314.846.900
136	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.854.306.878
136	Program Pembinaan Sejarah	353.152.000
137	Program Pengelolaan Permuseuman	1.099.616.000
138	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.922.911.380
139	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.201.046.000
140	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	61.749.700
141	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	75.734.200
142	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	106.003.400.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Paser selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Paser menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023.

Pengukuran kinerja sebagai instrument untuk mengetahui ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator dengan realisasinya, jika indikator tersebut dengan capaian tinggi maka kinerjanya semakin tinggi, jika realisasinya tinggi justru kinerja rendah tapi sebaliknya jika realisasinya rendah justru kinerjanya tinggi maka digunakan pengukuran dengan cara target dikurang realisasi dikurang target dibagi target kali 100, seperti pada gambar berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi-target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selain itu juga disajikan perbandingan dengan target periode akhir RPJMD, capaian provinsi, capaian nasional an internasional. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser pada Tahun 2023 dinyatakan **sangat tinggi** karena rata-rata capaiannya **122,08 %** dari target

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Paser tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel: 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja**

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90,01%≤100%	SangatTinggi
2.	75,01%≤90%	Tinggi
3.	65,01%≤75%	Sedang
4.	50,01%≤65%	Rendah
5.	≤50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

3.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran indikator kinerja tujuan Tahun 2023 sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Terhadap Target Tahun 2023**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi 1	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	2,32	1,38	59,48

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Misi 2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	65	62,56	96,25
Misi 3	Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	2,270	0,292	12,86
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indikator IPM	73,40	74,56	101,58

a. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran indikator kinerja sasaran Tahun 2023 sebagaimana table berikut

**Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efek Berganda (<i>Multiplier Effect</i>) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,73	3,52	74,42
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan	5,35	14,77	276,07

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Akomodasi dan Makan Minum)			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	60,01 (B)	60,16 (B)	100,25
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81	82,649	102
Rata-rata capaian					101,13
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	83,50	83,6	100,1
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	75	14	181,33
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	7	100
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	59,18	64,02	108,18
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,56	72,57	97,33
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	195	191,78	101,65
Rata-rata capaian					102,39
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,30	13,37	100,53
		Rata-rata Lama Sekolah	8,90	8,91	100,11
Rata-rata capaian					100,32
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,90	73,89	101,36
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9	9,11	98,78
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	4,72	95,11
Rata-rata capaian					96,95
Total Rata-rata capaian					123,41

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

1. Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect Sektor Pertanian)**

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di kabupaten paser setelah pertambangan. Sektor pertanian dalam arti luas (termasuk sub sektor tanaman pangan, Perkebunan, peternakan dan perikanan) merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber bagi pendapatan Kabupaten Paser, disamping itu sector pertanian dalam arti luas juga merupakan penghasil bahan baku bagi sektor inddustri, selain juga sebagai pengguna input yang dihasilkan oleh sektor industry, serta pengguna dari sektor jasa angkutan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing merupakan terjemahan dari harapan dan keinginan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan penduduk dari dalam Kabupaten Paser, mengurangi ketergantungan barang dan jasa terutama pangan dari daerah lain. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan yang kompetitif. Hasil akhir yang dicapai tidak hanya perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Saat ini Kab. Paser telah memiliki keunggulan produk pertanian berupa hasil Perkebunan sawit hingga menghasilkan CPO yang cukup besar. Namun demikian industry dasar ini belum mampu menciptakan multiplier yang cukup baik bagi seluruh pelaku ekonomi, untuk itulah maka sasaran pertama dari kemandirian ekonomi ini diarahkan pada penciptaan multiplier melalui hilirisasi pengolahan produk CPO.

Ketercapaian Sasaran :

Sasaran Meningkatkan Efek Berganda (*Multiplier Effect* Sektor Pertanian) diukur dengan indikator Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang dengan target pada tahun 2023 yaitu 4,73 dan realisasi 3,52 dengan capaian 74,42% dengan predikat Sedang , seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Strateis 1**

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	4,73	3,52	74,42	Sedang

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran efek berganda dengan indikator pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang dengan capaian 74,42 %.

Meningkatnya produktifitas komoditas pertanian yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga memberikan dampak peningkatan pendapatan petani , terutama yang berada pada sektor pertanian.

Faktor Penghambat/Kendala:

Untuk mengukur pertumbuhan perekonomian sektor non tambang berdasarkan capaian sektor perikanan, perkebunan dan peternakan. Adapun kendala sektor perikanan belum didukung dengan sarana prasana yang memadai, belum sepenuhnya didukung dengan manajemen usaha yang memadai, selain itu pemahaman masih dengan pendekatan tradisional dan sementara pemahaman teknologi masih kurang. Kesadaran dalam memperhatikan daya dukung lingkungan juga masih perlu ditingkatkan dalam upaya untuk mempertahankan daya alam sektor perikanan agar tetap berkelanjutan. Faktor non teknis adalah faktor cuaca ketika memasuki musim dimana nelayan kesulitan untuk melaut sehingga berpengaruh pada hasil tangkapan. Sektor perikanan juga belum didukung industri pengolahan yang dapat memberi nilai tambah serta intervensi pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan bagi sektor perkan untuk mendukung multiplier efek sektor perikanan.

Sektor pertanian, Komoditas Kelapa Sawit menjadi primadona bagi Masyarakat Paser yang berprofesi sebagai petani karena kelapa sawit secara relatif dapat menghasilkan uang kas setiap bulan dengan pembeli yang sudah jelas. pergeseran luas areal tanam perkebunan ke kelapa sawit yang terus meningkat, pergeseran tanaman perkebunan dipicu oleh insentif yang masyarakat rasakan walaupun masih terdapat masalah struktur pasar yang oligopoly, walau secara

ekonomi masyarakat komoditas kelapa sawit cukup menjanjikan bagi tingkat pendapatan masyarakat paser khususnya petani namun demikian multiplier efek dari komoditi kelapa sawit rendah.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor komoditas peternakan antara lain masih usaha peternakan rakyat masih belum bertumbuh sebagaimana mestinya, hal ini sedikit banyak dilatar belakangi ketertarikan masyarakat untuk memilih profesi sebagai peternak dan belum menjadi daya tarik sebagai komoditas untuk opsi atau alternatif untuk digeluti sebagai usaha untuk memperoleh pendapatan/ekonomi rumah tangga. pengelolaan usaha bidang peternakan belum dilakukan secara profesional, selain itu permasalahan lainnya masih minimnya sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan rakyat.

Pergeseran sektor tambang ke non tambang dalam upaya mewujudkan efek berganda sektor pertanian di Kabupaten Paser juga menghadapi persoalan seperti kawasan tata ruang khusus industri karena persoalan lahan, lahan yang ingin dikembangkan (bidang perikanan) terkedala dengan status lahan sebagai kawasan cagar alam.

Faktor Pendorong:

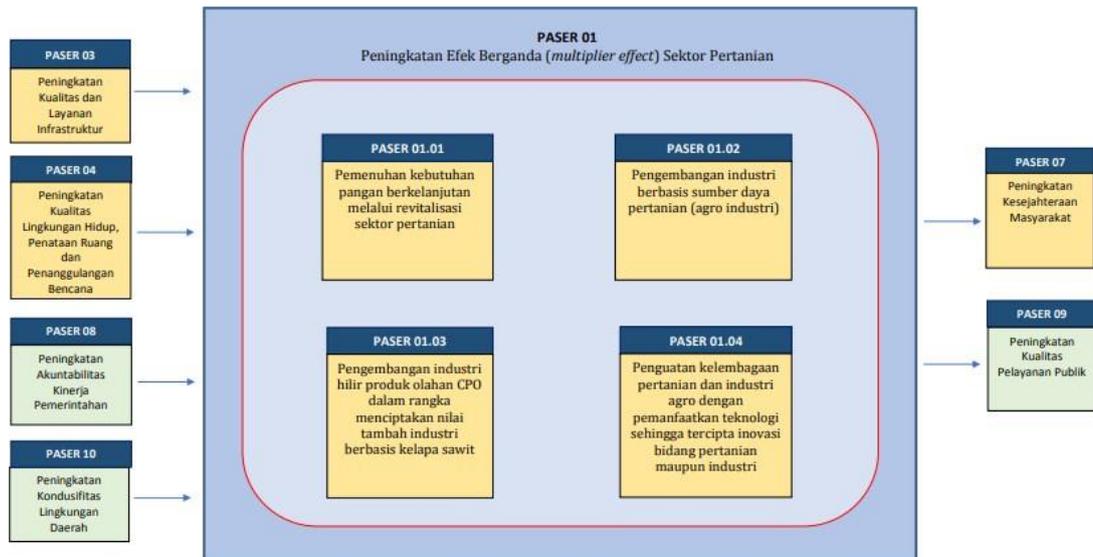
Faktor pendorong untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor non tambang baik sektor perikanan, perkebunan dan peternakan yaitu adanya kebijakan pengembangan kawasan food estate dan kawasan hortikultura, miniranch dan produksi peternakan, reeplanting komoditi kelapa sawit dan pengembangan komoditis lainnya, hilirisasi industri, penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan, pemberdayaan usaha kecil menengah.

Solusi/Langkah-Langkah Perbaikan :

Dalam rangka mengatasi kendala/hambatan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non tambang sektor pertanian di Kabupaten Paser antara lain meningkatkan peran pemda dukungan sarana prasaran pertanian yang dibutuhkan masyarakat baik sektor perikanan, peternakan perkebunan termasuk dalam bentuk bantuan hibah, meningkatkan penguatan wira usaha melalui penyuluhan/bimbingan teknis, mempercepat penyelesaian terkait kawasan cagar alam yang juga merupakan salah satu kendala dalam pembangunan, penyusunan regulasi daerah untuk

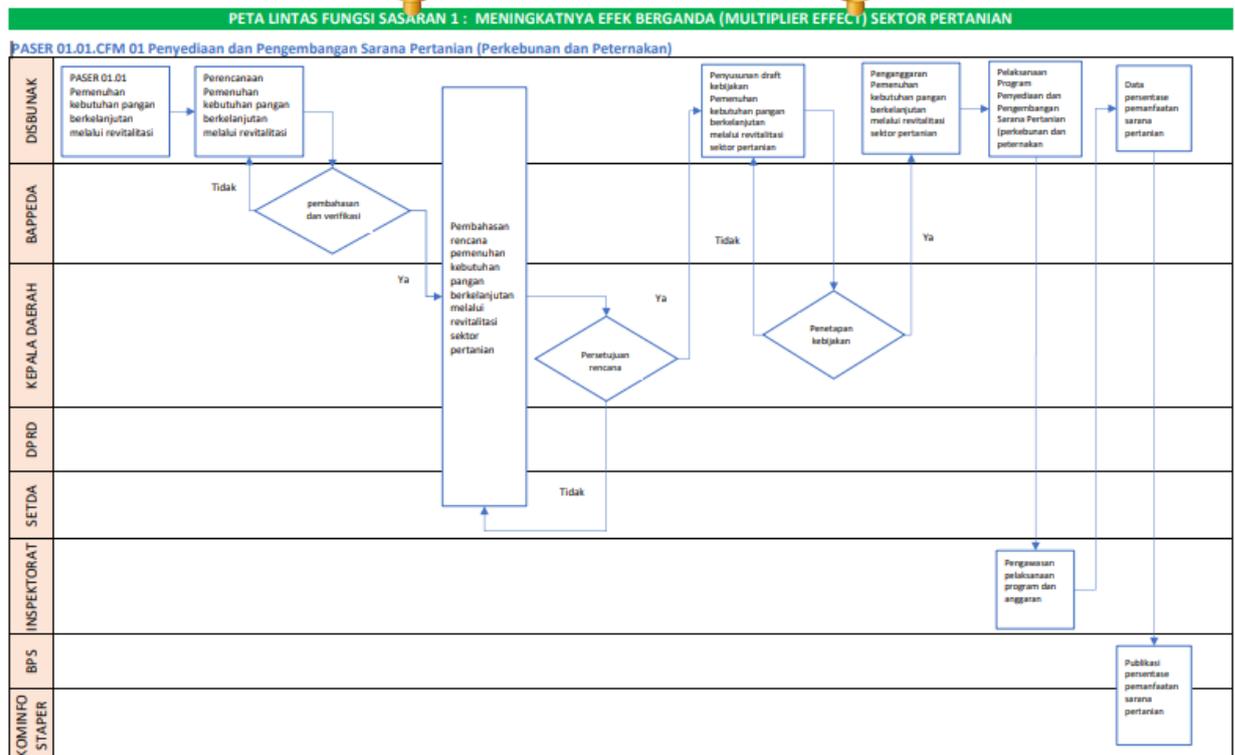
memberikan jaminan legalitas, kejelasan sertaMelakukan deregulasi dan digitalisasi serta kebijakan pelayanan satu pintu untuk menjamin kemudahan berusaha . Adapun proses bisnis kebijakan dalam mendukung pencapaian outcomes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten paser dibagi kedalam 2 proses; utama dan pendukung seperti pada gambar dan tabel berikut :

Gambar: 3.1
Proses Bisnis Sasaran 1 Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect Sektor Pertanian)

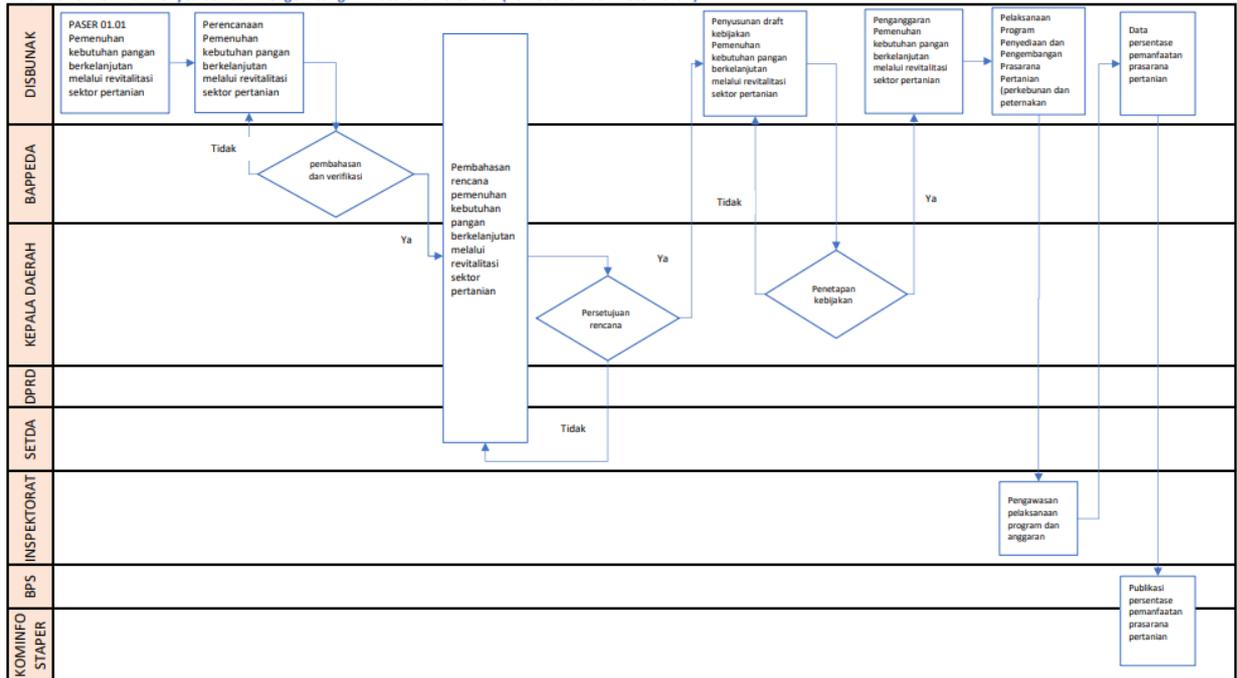


Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta Probis Pemkab. Paser

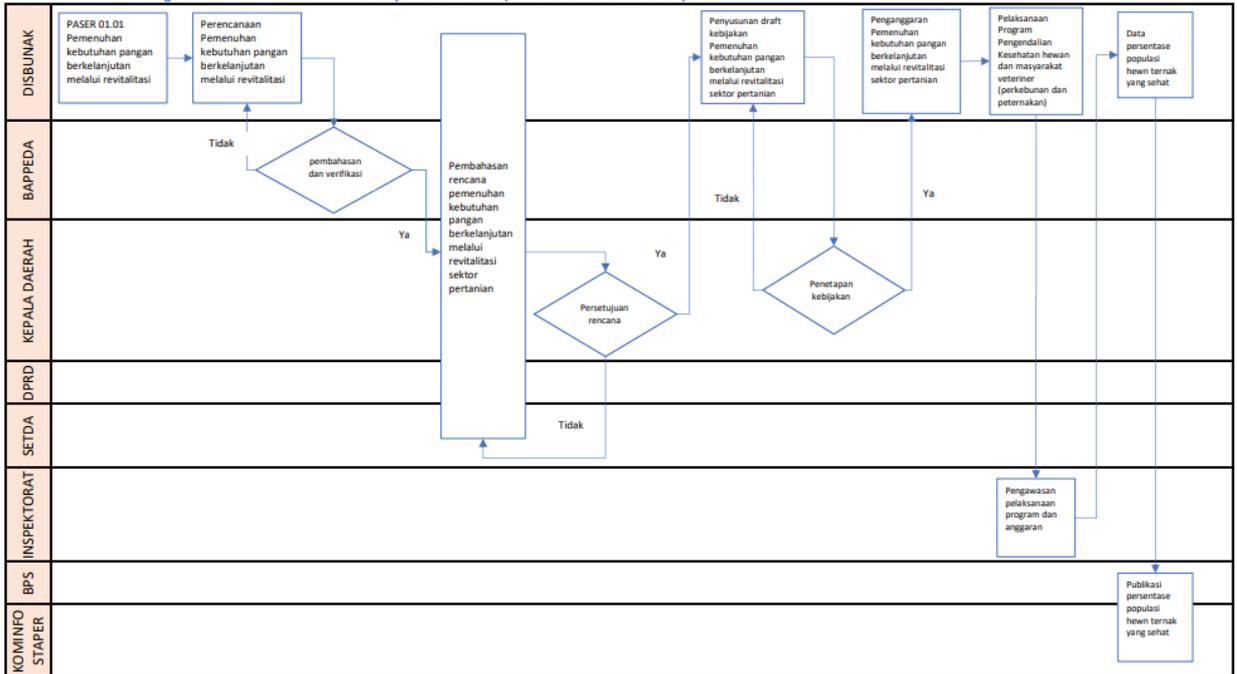
Gambar 3.2
Peta Lintas Fungsi Sasaran 1



PASER 01.01. CFM 02 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)

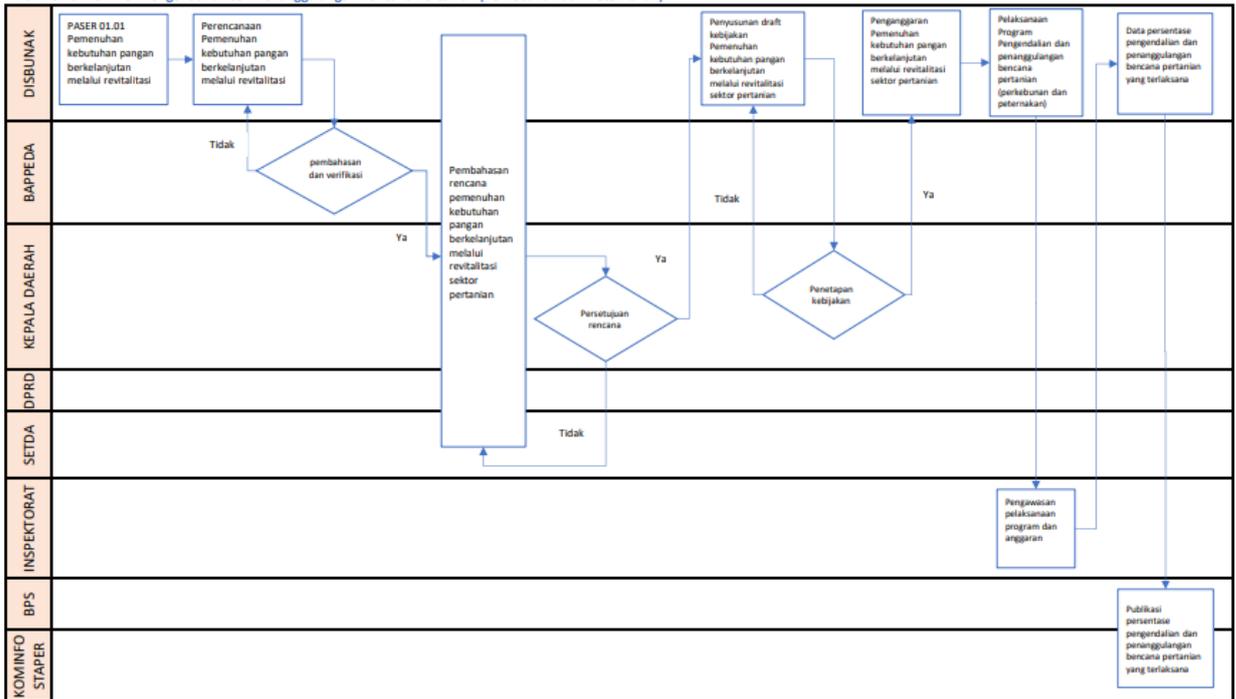


PASER 01.01. CFM 03 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)

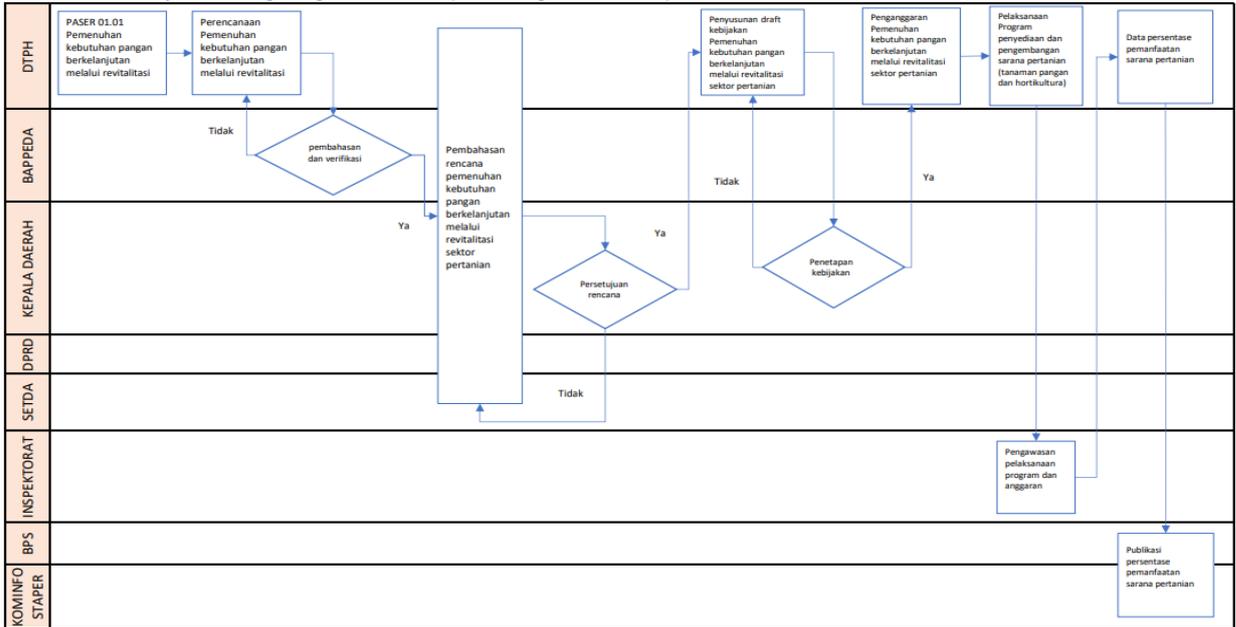


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

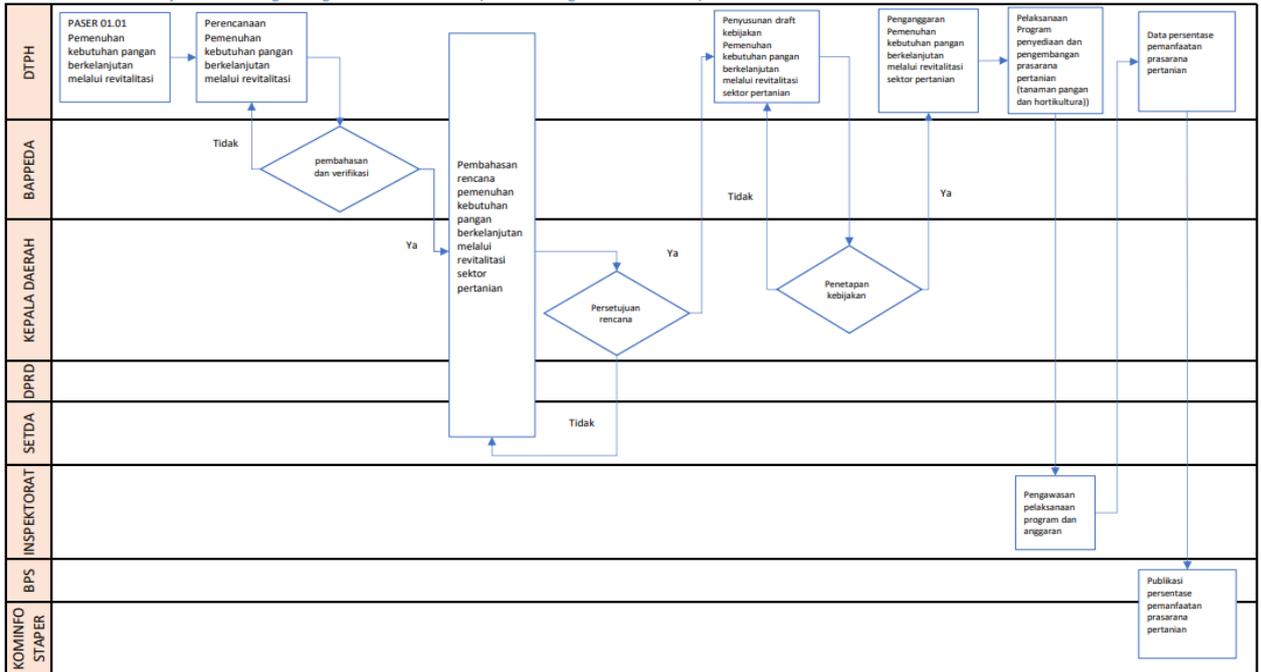
PASER 01.01. CFM 04 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)



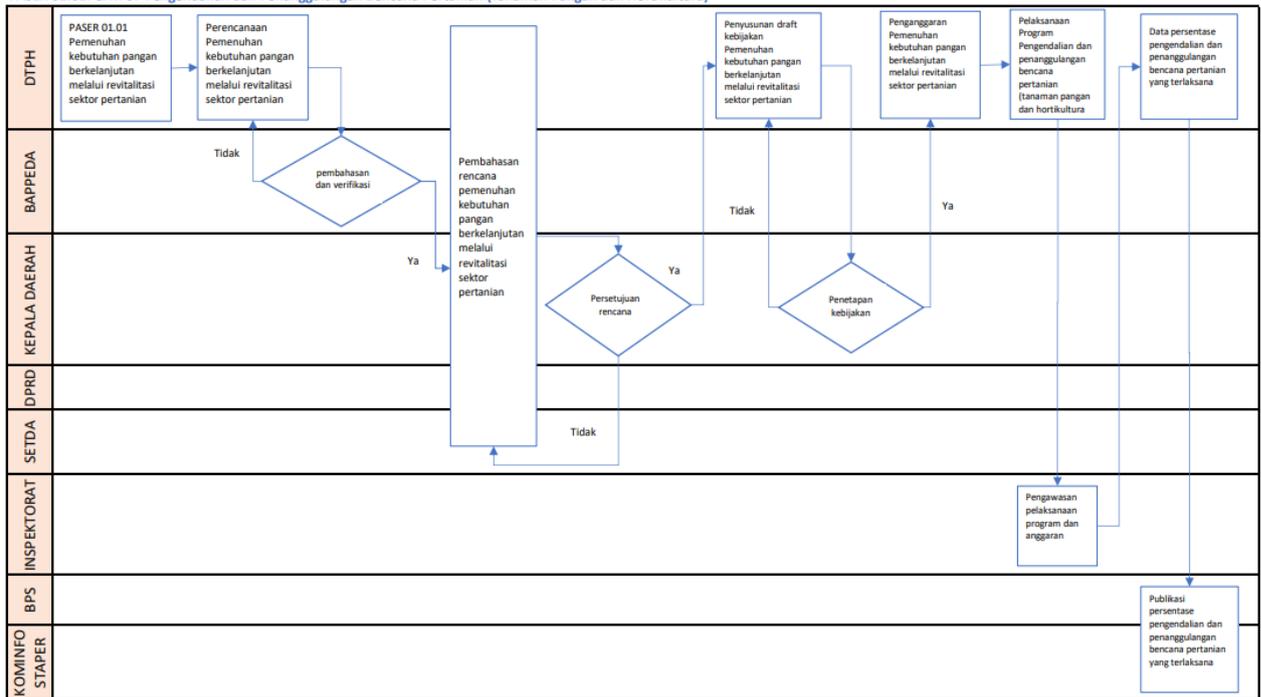
PASER 01.01. CFM 05 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)



PASER 01.01. CFM 06 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

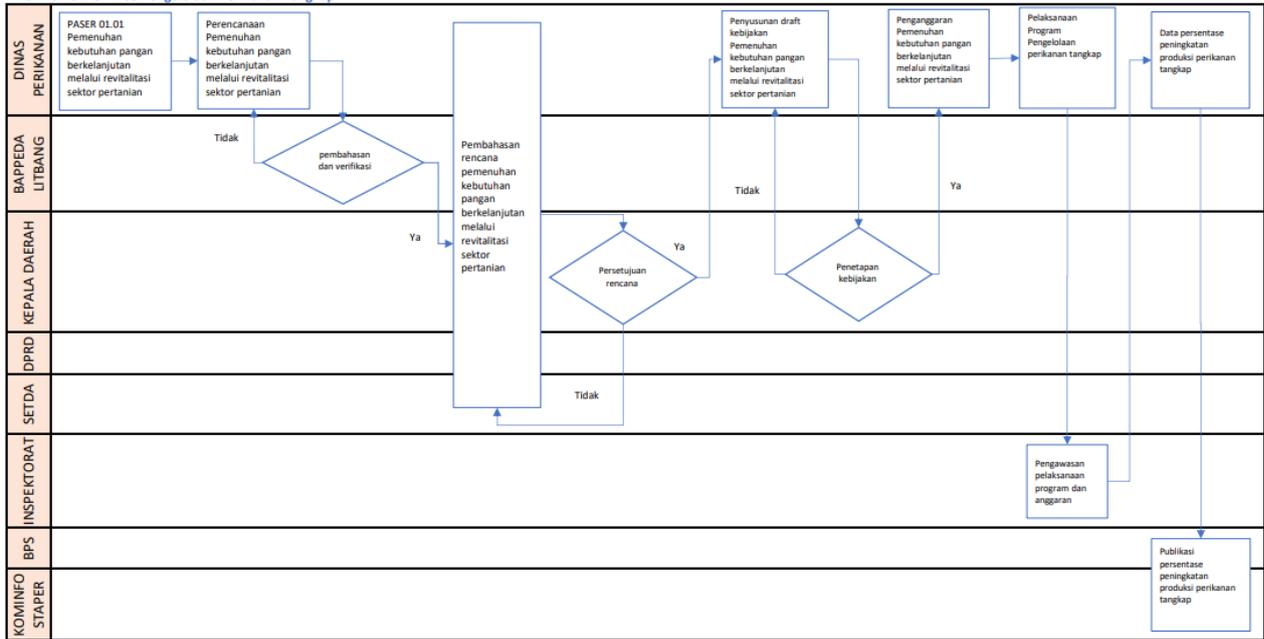


PASER 01.01. CFM 07 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

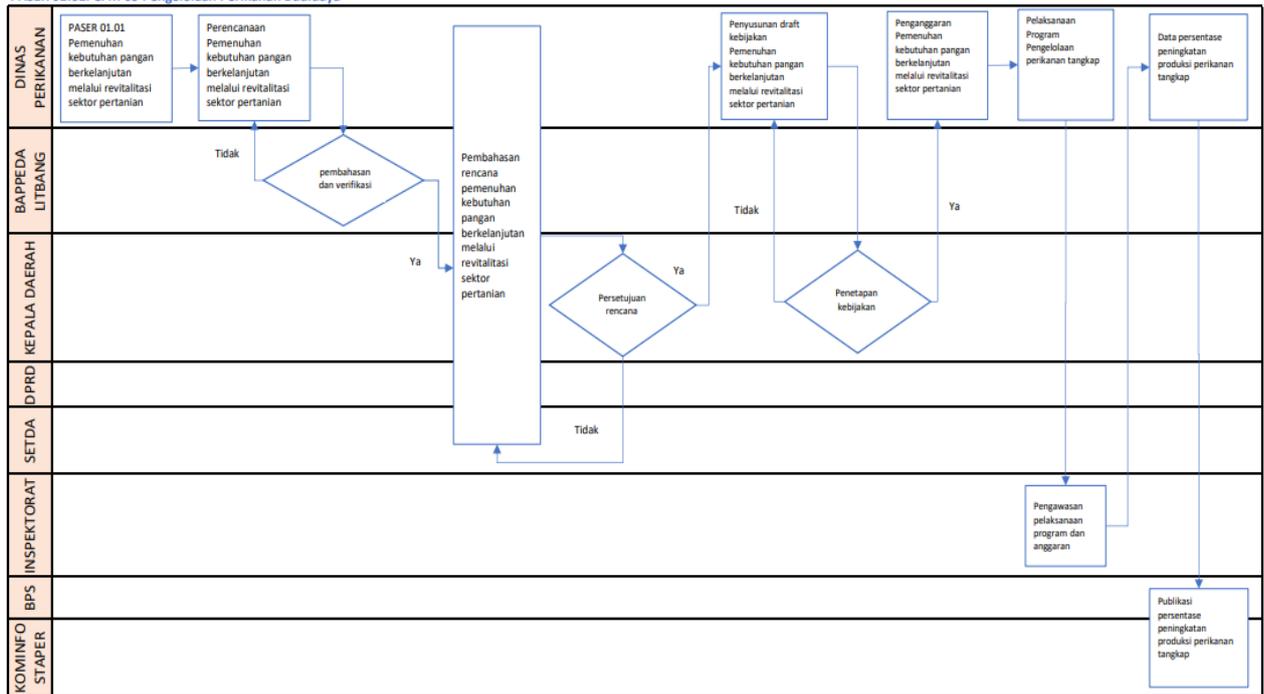


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

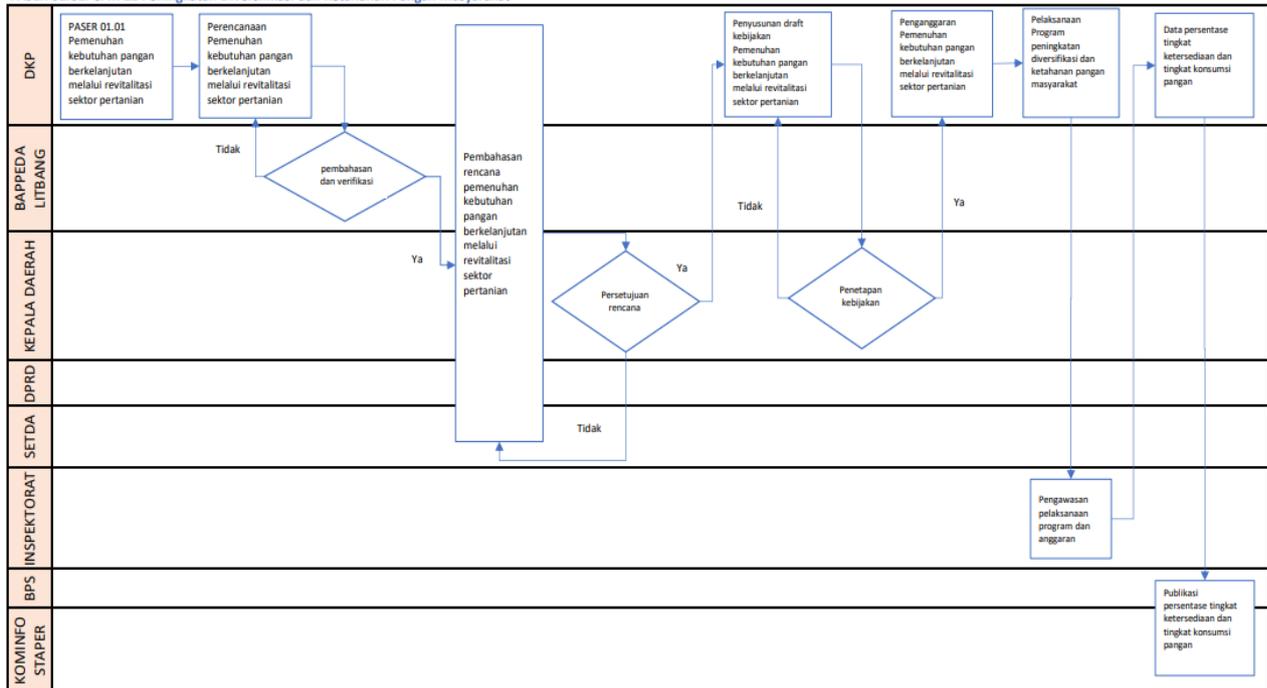
PASER 01.01. CFM 08 Pengelolaan Perikanan Tangkap



PASER 01.01. CFM 09 Pengelolaan Perikanan Budidaya



PASER 01.01. CFM 12 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta Probis Pemkab. Paser

2. Sasaran Strategis 2 Berkembangnya Sektor Kepariwisata

Tolok ukur pencapaian Sasaran strategis Berkembangnya sektor kepariwisataan ditetapkan dengan diukur dengan indikator Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 5,35 % dan realisasinya sebesar 14,77% sehingga memperoleh capaian 276,07% dengan predikat sangat tinggi. Seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Σ Pertumbuhan sektor I perhotelan dan restoran dan rumah makan minum	5,35	14,77	276,07	Sangat Tinggi

Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 yaitu sebesar 2,83, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 5,35 sudah melampaui target akhir RPJMD.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu aspek dalam industri pariwisata Kabupaten Paser, dimana Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian daerah. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Paser diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kemampuan masing-masing wilayah untuk dapat membangun pariwisata.

Rumah makan atau restoran dapat menjadi penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Paser. Pada tahun 2023 jumlah rumah makan atau restoran sebanyak unit, meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 166 unit. Usaha rumah makan atau restoran paling banyak dijumpai di Kecamatan Tanah Grogot.

Faktor Penghambat/Kendala :

Pertumbuhan sektor 1 (akomodasi dan makan minum) sebagai korelasi atau konsekuensi logis dari semakin berkembangnya sektor pariwisata, kendala dalam pengembangan pariwisata di kabuapten paser yang paling segera dilakukan intervensi adalah terkait aksesibilitas. Potensi objek wisata yang tersebar di deluruh wilayah dengan tingkat kesulitan aksesibilitasnya yang cukup tinggi, terlebih objek wisata air terjun – potensi wisata kabupaten paser di adalah air terjun – dan beberapa diantaranya sulit dijangkau, waktu tempuh yang lama dan tranportasi umum yang belum tersedia secara memadai sehingga menjadi permasalahan dalam menuju objek wisata tersebut dan berpengaruh dengan tingkat kunjungan wisata.harus masuk hutan. Dalam pemenuhan aksesibilitas maupun ammenity juga

terkendala dengan kepemilikan dan legalitas lahan. Termasuk juga objek wisata yang masuk dalam HGU mau cagar alam.

Faktor Pendorong :

Dengan telah disusunnya rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Ripparda) sebagai salah satu dokumen penting, maka pembangunan pariwisata di Kabupaten Paser lebih terukur untuk lima tahun ke depan. Pada tahun 2023 baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi Dengan pemenuhan dokumen tersebut, telah melakokasikan pembiayaan cukup besar untuk pengembangan/pembangunan objek wisata di Kabupaten Paser.

Adanya antusiasme Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing – mengingat hampir disemua desa yang ada di kabupaten Paser memiliki objek wisata yang sangat potensial untuk di kembangkan – hal ini dapat dilihat dengan telah dibentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai wujud inisiatif dan antusias warga desa untuk mengembangkan potensi objek wisata di desa mereka.

Beberapa perangkat daerah yang beririsan tusinya/crosscutting dengan kepariwisataan seperti disperindagkop yang mendukung upaya pengembangan pariwisata dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha micro kecil, perangkat daerah yang membidangi urusan kePUan dan perhubungan telah menyusun program dan kegiatan yang juga mendukung pengembangan pariwisata seperti pembangunan jalan dan pembuatan rambu-rambu arah menuju objek wisata.

Selain itu komitmen dan dukungan perusahaan yang melalui program tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pengembangan objek wisata di desa dimana mereka melakukan operasional kegiatan usaha baik dalam bentuk dukungan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). pengembangan wisata daya tarik alam, wisata budaya dan sejarah, pariwisata berbasis masyarakat.

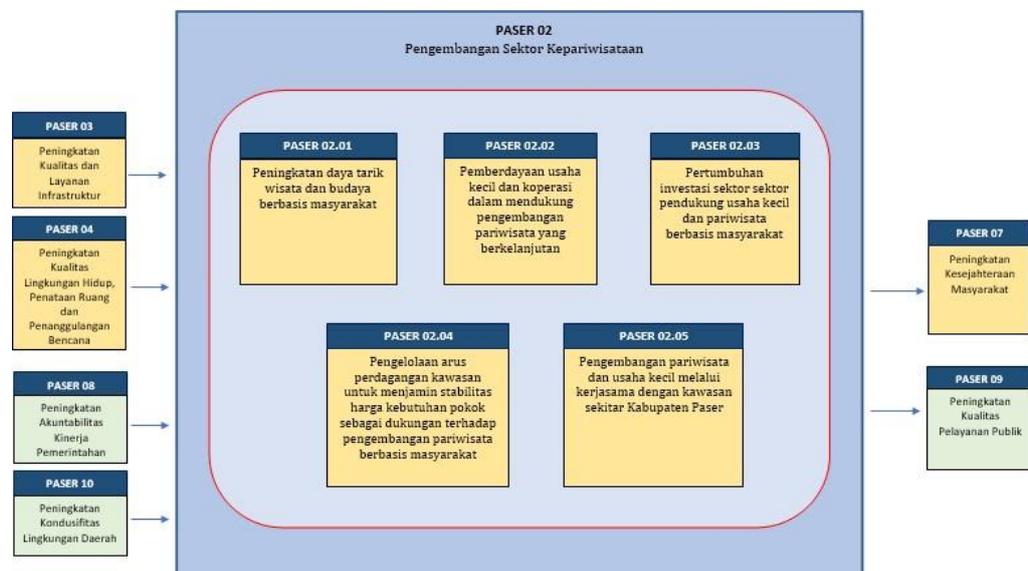
Solusi/langkah-langkah perbaikan :

Pengembangan Pariwisata adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam upaya transformasi ekonomi dari sektor tambang ke sektor non tambang

atau beralih kepengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan upaya upaya perbaikan yaitu upaya clean and clear berkaitan dengan status lahan yang akan dibangun fasilitas publik dalam rangka pemenuhan ammenity dan aksesibilitas yang juga merupakan kendala yang harus diselesaikan dalam pengembangan destinasiwisata. lebih intensif mendorong pengembangan wisata berbasis desa anta lain dengan melalui pendampingan pelatihan SDM desa terkhusus pada kelompok sadar wisata (Pokdarwis). pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf), memperkuat standar prosedur manajemen pariwisata, meningkatkan upaya upaya promosi untuk menarik investor di sektor kepariwisataan. kolaborasi antara pemerintah, swasta, desa dan masyarakat, sehingga dengan terbangunnya peran serta yang kuat akan lebih cepat dan mempermudah pengembangan pariwisata.

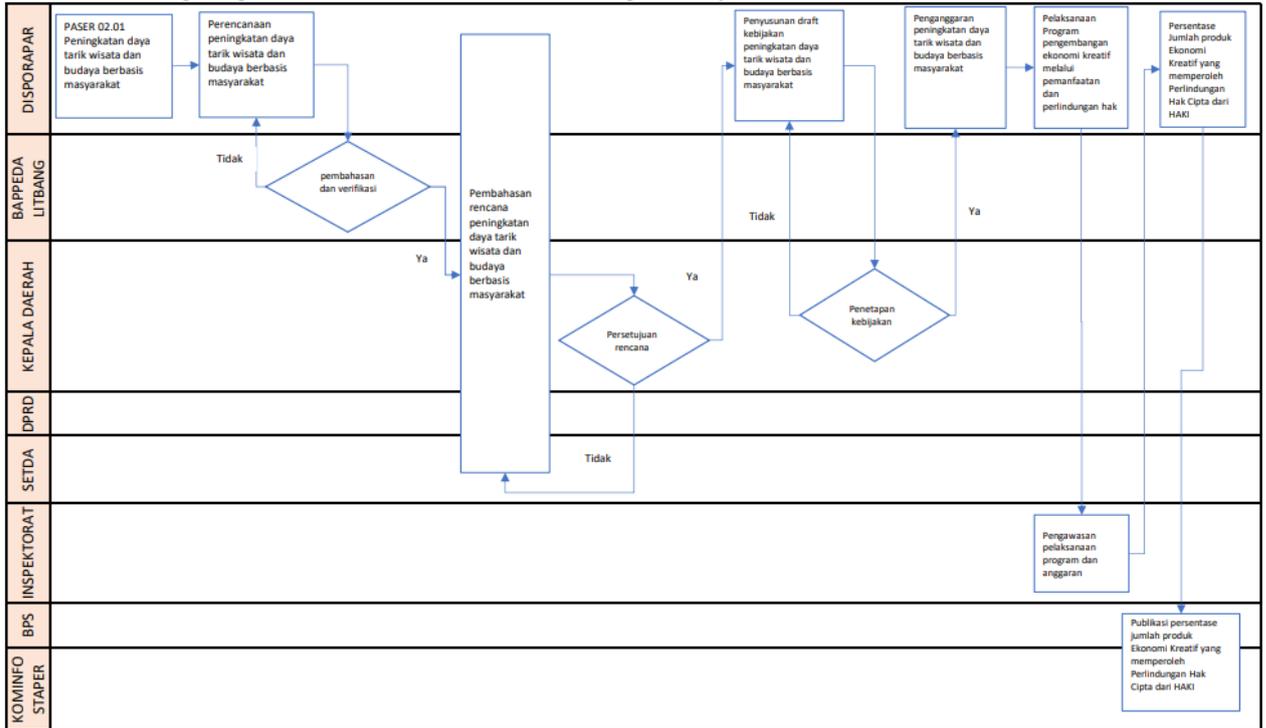
Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Berkembangnya sektor kepariwisataan** seperti pada gambar berikut:

Gambar: 3.3
Proses Bisnis Sasaran 2 Berkembangnya Sektor Kepariwisataan

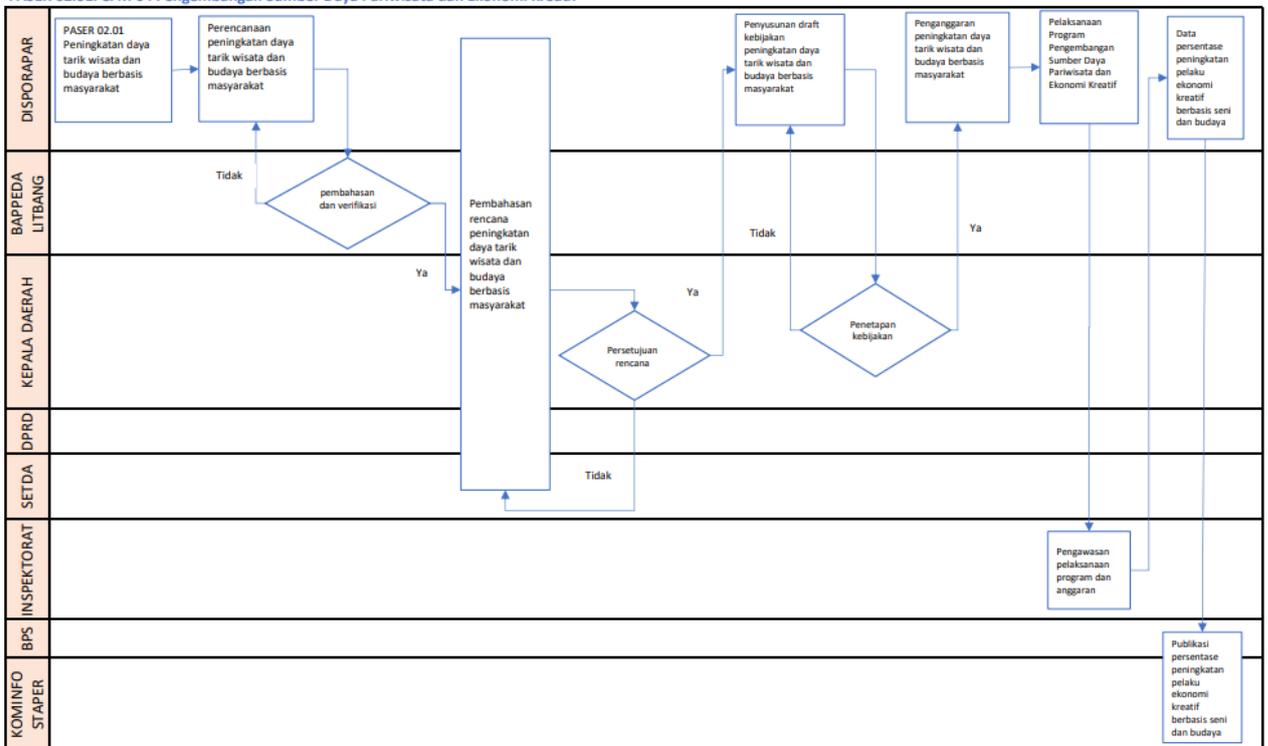


Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

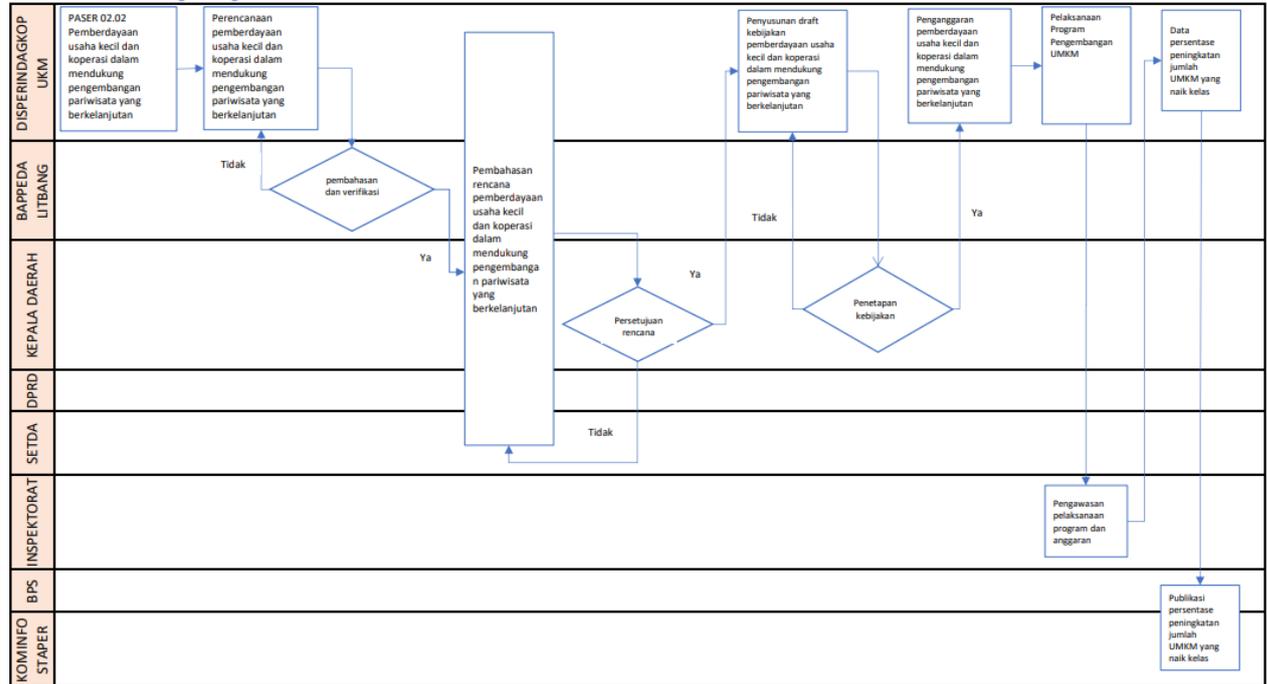
PASER 02.01. CFM 03 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



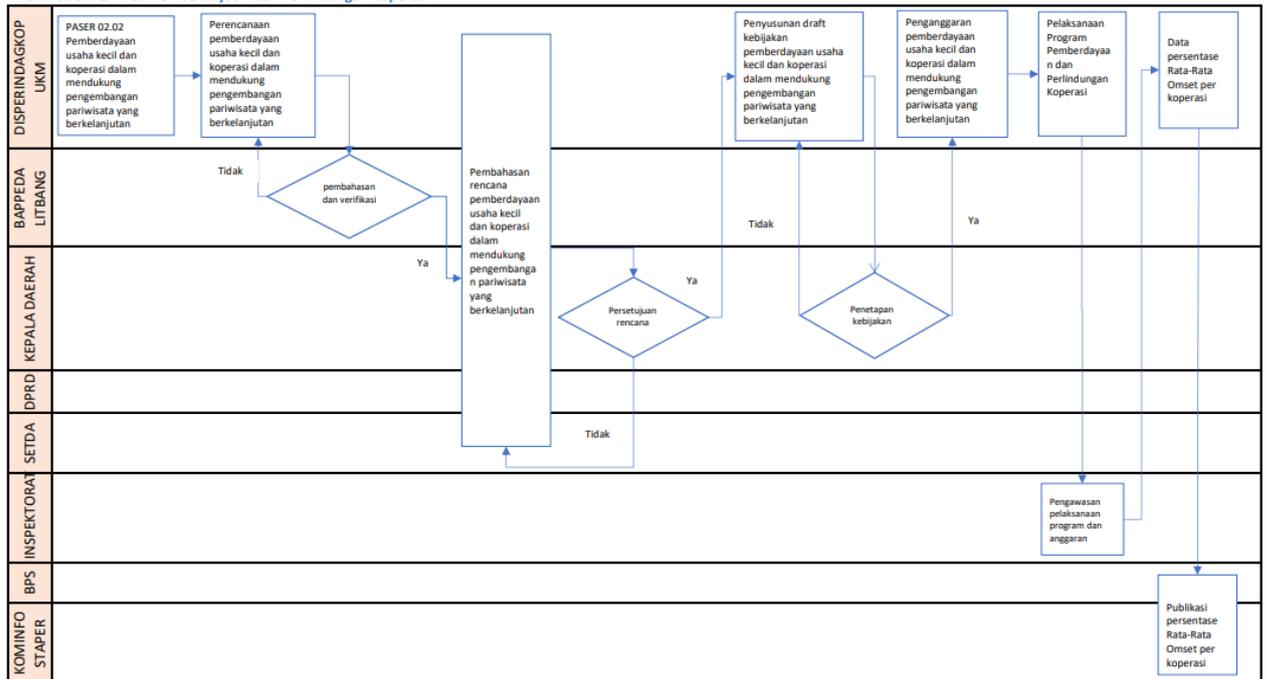
PASER 02.01. CFM 04 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



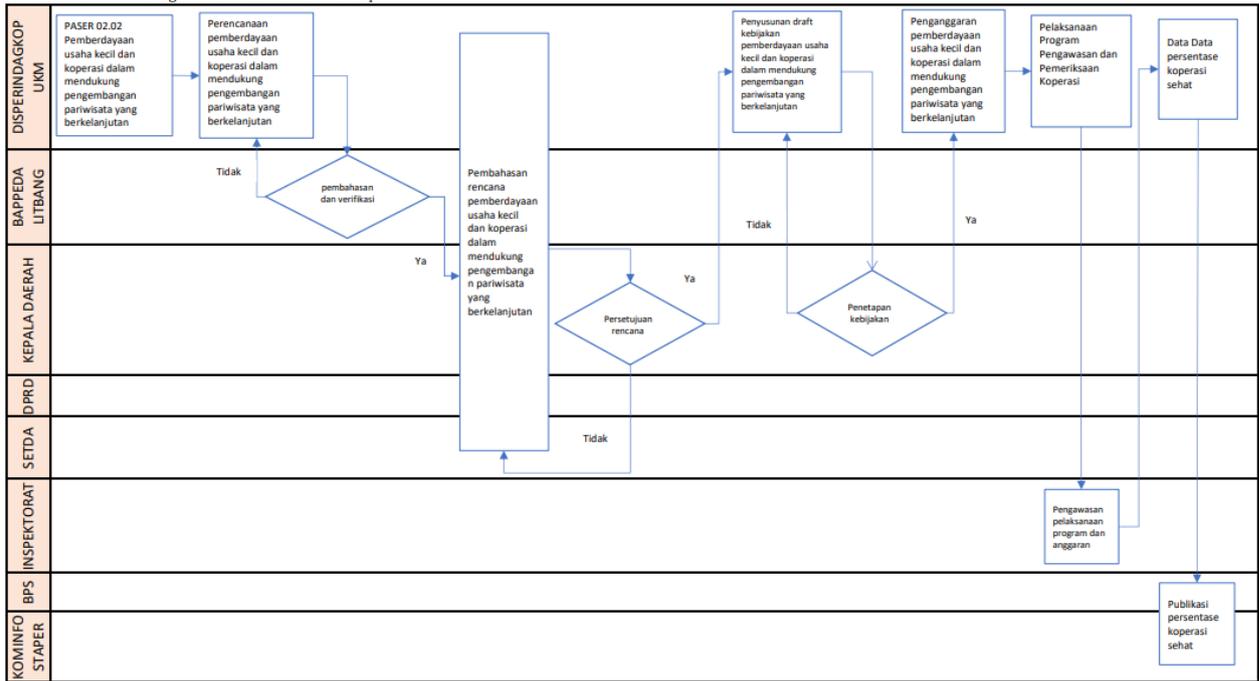
PASER 02.02. CFM 01 Pengembangan UMKM



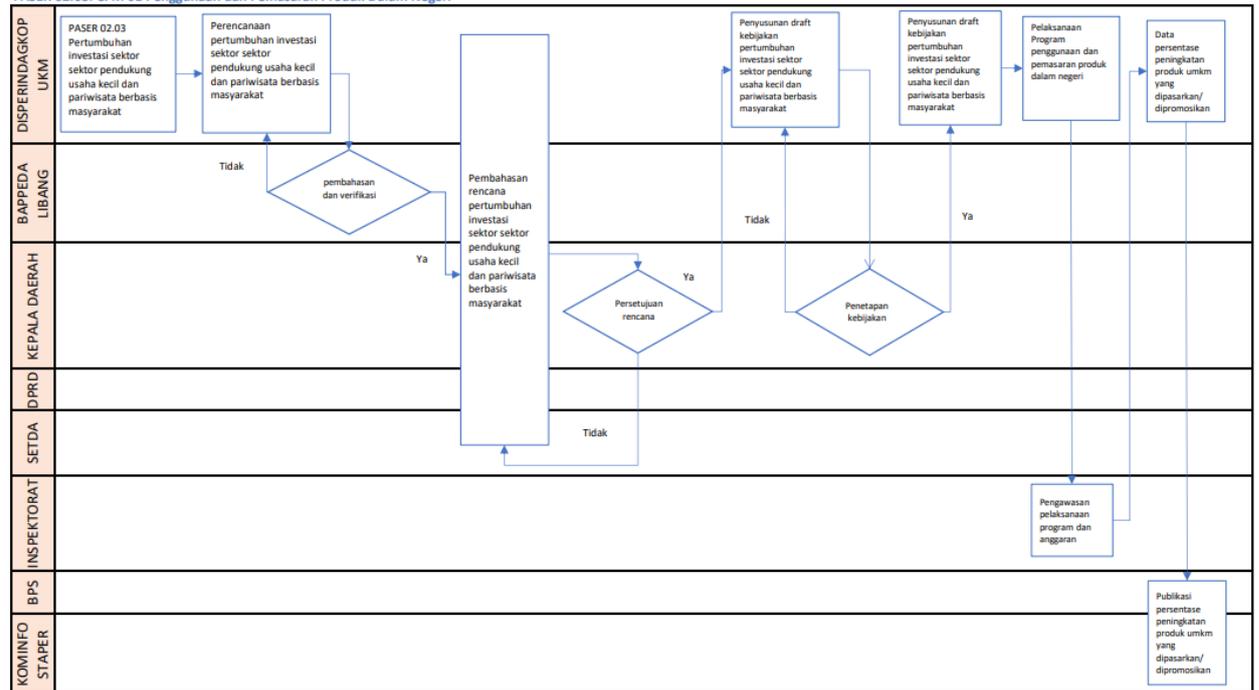
PASER 02.02. CFM 02 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



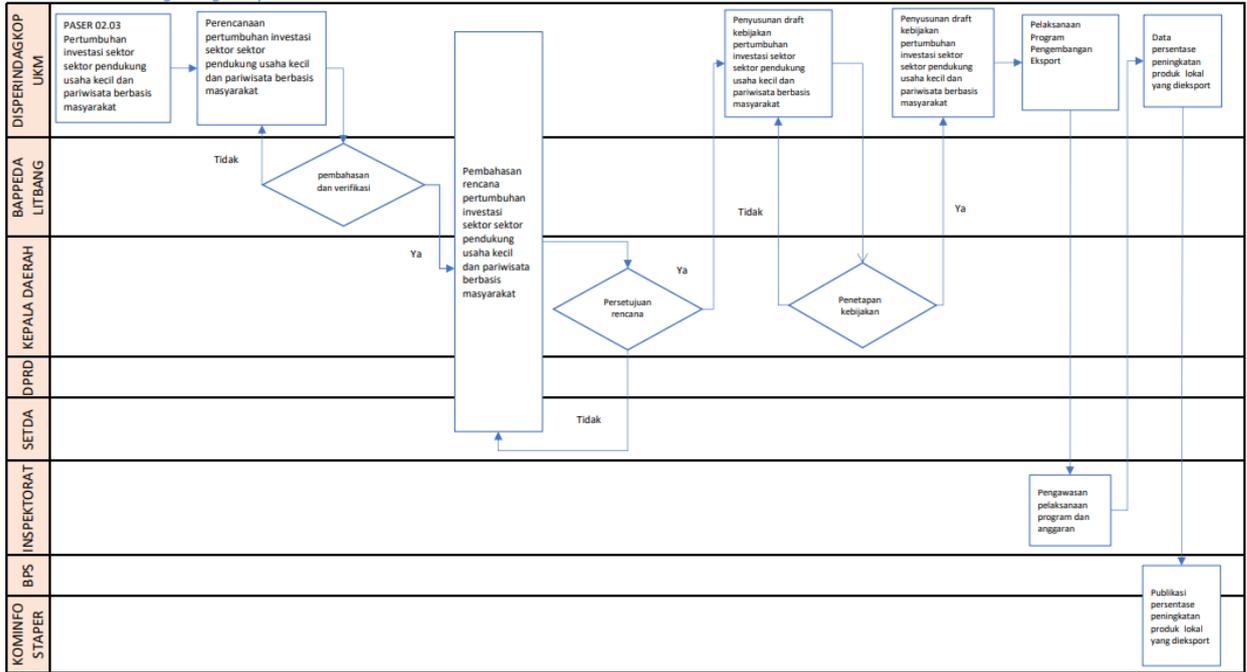
PASER 02.02. CFM 04 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



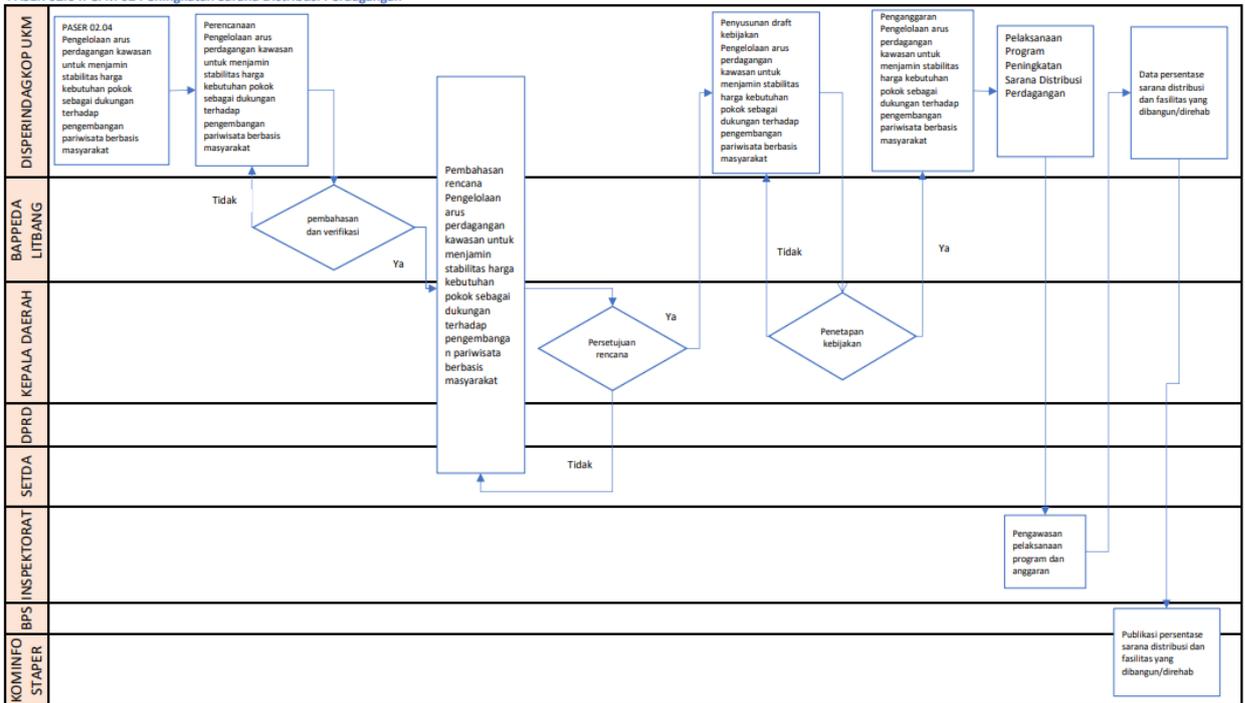
PASER 02.03. CFM 01 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



PASER 02.03. CFM 02 Pengembangan Eksport



PASER 02.04. CFM 02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPemkab. Paser

3. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Ketercapaian Sasaran

Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** diukur berdasarkan 2 indikator yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran strageis 3 ini merupakan upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan”.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2023, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser memperoleh predikat B dengan nilai 60,16 Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dengan nilai 82,694

Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah sebesar 101,13 dengan kategori predikat Sangat Tinggi Hasil pengukuran kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB	60,01	60,16	100,25	Sangat Tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81	82,649	102,036	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian				101,13	Sangat Tinggi

Adapun pembagian tugas masing masing Perangkat Daerah dalam pencapaiansasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7
Pembagian tugas dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3**

SASSARAN	ASPEK	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda Litbang, Inspektorat, Bagian Organisasi, Sekretariat pada Semua PD
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BKAD, Bappedalitbang, Sekretariat Semua PD

- a. Adapun nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui mekanisme yang diatur pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan ini merupakan pengganti dari PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor Penghambat/Kendala :

Beberapa kendala dalam Implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Paser yaitu Keterbatasan dalam hal sumber daya aparatur yang terkait langsung implementasi SAKIP di Perangkat Daerah masing-masing. selain dalam ketersediaan dan kompetensinya belum memenuhi sebagaimana diharapkan karena beberapa yang sudah memasuki purna tugas sementara blm ada pengangkatan ASN yang baru. Hal lain disebabkan beban kerja dibagian yang menangani perencanaan, lambatnya mendapatkan data kinerja dari bidang bidang hal ini disebabkan belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja dengan baik. kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional juga memberikan dampak sulitnya melakukan pengisian jabatan yang menangani urusan perencanaan Ketika yang bersangkutan mendapatkan promosi, sehingga jabatan yang ditinggalkan hingga sekarang masih kosong, karena pengisiannya harus melalui uji kompetensi. Dan pekerjaan terkait penyusunan laporan kinerja dikerjakan sekretaris perangkat daerah dan pelaksana. Dan kondisi ini memberikan pengaruh kepada kualitas laporan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Menpan RB, SAKIP Kabupaten Paser masih memiliki kelemahan pada seluruh komponen baik Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perencanaan strategis baik ditingkat kabupaten maupun perangkat daerah masih terdapat kelemahan pada dokumen perencanaan baik Tingkat kabupaten maupun Tingkat perangkat daerah dan revidi yang telah dilakukan belum diformalkan. Logic model yang dikembangkan dalam pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan outcome dan critical succes factor Pemenuhan data dukung masih belum sepenuhnya dipenuhi ditingkat perangkat daerah. Pada pengukuran kinerja masih terdapat indikator yang kurang SMART, Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya dilengkapi dengan defenisi operasional. Pada aspek pelaporan kinerja, masih lemahnya dalam hal analisis capaian kinerja, perbandingan kinerja belum dilakukan optimal, masih ada laporan kinerja yang belum menginformasikan langkah-langkah perbaikan, laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pada aspek evaluasi kinerja. Rekomendasi perbaikan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama SAKIP di level perangkat daerah.

1. Komitmen pimpinan dalam Upaya peningkatan kompetensi dalam pemahaman LAKIP dengan mengalokasikan anggaran baik dalam bentuk Workshop maupun bimtek keseluruhan perangkat daerah baik di level kepala perangkat daerah maupun pegawai yang menangani langsung SAKIP.
2. Nilai SAKIP perangkat daerah menjadi salah satu instrument untuk pemberian TPP.

Solusi/ Langkah –langkah perbaikan:

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pengoptimalisasi pencapaian kinerja yang akan datang antara lain :

1. Penguatan implemementasi SAKIP berbasis aplikasi, pada tahun 2024 evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat telah menggunakan Aplikasi
2. Bagian organisasi telah melakukan Asistensi ke Perangkat daerah dalam hal penyusunan pohon kinerja sebagai Upaya perbaikan penjenjangan kinerja, perbaikan indikator kinerja individu sekaligus sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi menpan atas SAKIP Kabupaten Paser.

3. Dari aspek perencanaan telah dilakukan reviu Renstra yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang Kab. Paser.
4. Dari aspek evaluasi AKIP telah dibuat pedoman teknis evaluasi oleh Inspektorat Kab. Paser

b. Indikator indeks pengelolaan keuangan daerah

IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan, sedangkan pengukurannya menggunakan data dari Bappedalitbang terkait dokumen RPJMD dan RKPD, Badan Pengelola Keuangan terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. IPKD ini diukur melalui 6 dimensi yaitu :

Dimensi Pertama, untuk mengukur kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Bobot dimensi 1 adalah sebesar 15% ;

Dimensi kedua, adalah mengukur kepatuhan pemerintah daerah dalam Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD. Bobot skor pada dimensi 2 ini adalah 20%;

Dimensi ketiga, adalah transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dari tingkat ketepatan waktu dalam mempublikasikan dan keteraksesan informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah. Bobot dimensi 3 adalah sebesar 15%;

Dimensi keempat, adalah penyerapan anggaran yang diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Bobot dimensi ini adalah 20%;

Dimensi kelima, adalah kondisi keuangan daerah, dengan bobot 15%; dan

Dimensi keenam, adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan, dengan bobot 15%. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Berdasarkan Surat Badan Strategi Kebijakan Nasional Dalam Negeri Nomor :

900.1.15.3/6602/BSK/BSKDN tentang penyampaian hasil IPKD Tahun 2023 Kabupaten Paser berada pada kategori **Tinggi** dengan predikat **terbaik**

Penghambat/kendala :

Kinerja pengelolaan keuangan daerah masih dihadapkan antara lain Belum optimalnya pemahaman personil ASN yang membidangi keuangan di perangkat daerah, regulasi/kebijakan yang cepat berubah, belum adanya juknis di level kabupaten sebagai penjabaran peraturan di atasnya, adanya gangguan jaringan pada saat penginputan, masih belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah terkait. Masih adanya kesalahan beberapa struktur data yang diinput, belum seluruhnya kesesuaian program KUA/PPAS dengan APBD.

Faktor Pendorong :

- komitmen pemerintah daerah yang cukup tinggi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan meraih opini BPK dengan predikat WTP secara berturut turut. siklus tahapan perencanaan penganggaran yang semakin semakin baik yang relatif tepat waktu, semakin selarasnya antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Pemanfaatan tim Ahli, yakni Pemerintah daerah menggunakan dan memanfaatkan tenaga ahli profesional untuk mendukung dan memperkuat penerapan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Solusi/Langkah-langkah perbaikan :

- penguatan aparatur yang memiliki tugas langsung dengan pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan administratif maupun teknis, memperkuat kapasitas jaringan untuk meminimalisir gangguan sistem aplikasi, mengantisipasi kesalahan input data.
- Perlu nya menyusun kebijakan/pedoman di tingkat daerah sebagai petunjuk teknis sehingga memudahkan petugas yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjalankan tugas fungsinya secara efektif dan efisien.

- Pemenuhan mekanisme prosedur baku/SOP sesuai kebutuhan untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, dan mempertahankan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Ketercapaian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pelaksanaan IKM pada tahun 2023 dari target nilai 83,50 dan realisasi sebesar 83,60 didapat capaian kinerja sebesar 100,1% dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Nilai IKM Daerah	Σ Nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survei IKM	83,50	83,60	100,1	Sangat Tinggi

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat tetap prima. Dalam hal ini instansi pemerintah akan di nilai seberapa baik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara umum karena sudah merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari survei kepuasan masyarakat kabupaten paser pada locus dilaksanakan pada 15 (lima belas) unit kerja seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Unit Kerja yang dilakukan survei Kepuasan Masyarakat

NO	UNIT KERJA	IKM	KATEGORI
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,73	B
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,69	B

NO	UNIT KERJA	IKM	KATEGORI
3.	Dinas Perhubungan	84,17	B
4.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	90,54	A
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,38	B
6.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal PTSP	83,91	B
7.	Kantor Kecamatan Kuaro	81,83	B
8.	Kantor Kecamatan Long Ikis	78,85	B
9.	Kantor Kecamatan Long Kali	84,46	B
10.	Kantor Kecamatan Batu Sopang	83,76	B
11.	Kantor Kecamatan Muara Komam	78,73	B
12.	Kantor Kecamatan Muara Samu	89,89	A
13.	Kantor Kecamatan Pasir Belengkong	85,94	B
14.	Kantor Kecamatan Batu Engau	84,75	B
15.	Kantor Kecamatan Tanjung Harapan	84,70	B
Rata-rata		83,76	Baik

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Faktor penghambat/Kendala :

faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja

- a. Belum semua perangkat daerah mampu mengidentifikasi produk layanan sehingga Survei kepuasan masyarakat belum dilaksanakan menyeluruh ke seluruh Perangkat Daerah.
- b. Pemahaman pentingnya SKM sebagai tolok ukur kualitas pelayanan public yang diberikan belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat daerah

Faktor pendukung :

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini diantaranya adalah :

- a. Sudah adanya perguruan tinggi (kalangan akademisi) di daerah sebagai peluang bekerja sama dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- b. Adanya penilaian evaluasi baik oleh Kementerian RB melalui PEKPP dan penilaian kepatuhan pelayanan Publik oleh Ombudsman sangat berkontribusi dalam Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik didaerah;
- c. Nilai SKM salah satu instrument untuk menilai kinerja Kepala perangkat daerah;
- d. Dengan trend nilai SKM semakin membaik, sebagai gambaran Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan layanan publik yang diberikan semakin baik.

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pengoptimalisasi pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang akan datang antara lain :

1. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan Masyarakat, apa yang menjadi catatan dan kekurangan berdasarkan unsur/komponen SKM.
2. Melakukan peningkatan kapasitas/kompetensi petugas yang membidangi pelayanan publik di tingkat perangkat daerah dengan Melaksanakan bimbingan teknis Survei Kepuasan Masyarakat, standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur;
3. Mendorong pelaksanaan SKM berbasis digital
4. Mengidentifikasi dan menstandarkan produk produk layanan diseluruh perangkat daerah untuk mendorong pelaksanaan Survei kepuasan di seluruh perangkat daerah.

5. Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Lingkungan Daerah yang Kondusif

Ketercapaian Sasaran

Sasaran **Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif** diukur dengan indikator **Angka Kriminalitas**. Pengertian kriminalitas secara umum juga sebagai tindakan dimana dalam perbuatannya yaitu melanggar hukum dan aturan serta norma norma sosial di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga dampak kriminalitas sendiri bisa jadi berupa penentangan dari masyarakat.

Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan pada Masyarakat di suatu daerah semakin aman, suatu pola mengenai tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat (atau bisa disebut korban) berupa reaksi formal, informal, dan nonformal.

Indikator angka kriminalitas bersifat progresif negatif, yaitu semakin rendah capaian/realisasinya maka kinerjanya semakin baik, sebaliknya semakin tinggi capaian/realisasinya maka kinerjanya semakin tidak baik

Berikut capaian/angka kriminalitas tahun 2023 .

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Angka Kriminalitas	Σ Angka Kriminalitas dalam satu tahun	75	23	169,33	Sangat tinggi

Berdasarkan capaian/realisasi angka kriminalitas yang lebih rendah dari target yang ditetapkan maka capaian kinerja sasaran meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif pada tahun 2023 menunjukkan capaian kinerjanya semakin baik. Berdasarkan jenis kriminalitas yang terjadi, penyumbang tertinggi angka kriminalitas adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Faktor penghambat/kendala :

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi informasi, akan berkorelasi dalam banyak hal termasuk potensi meningkatnya angk kriminalitas. Selain itu posisi Kabupaten Paser sebagai lintasan kaltim kassel menjadikannya rentan dan rawan terjadinya kegiatan-kegiatan yang menjurus tindak kriminalitas.

Penanganan kriminalitas juga dihadapkan pada luas wilayah, kondisi geografis sehingga penanganan tindak kriminalitas semakin sulit sementara disatu sisi sumberdaya yang ada terutama personil, rasionya belum ideal jika dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk

Faktor Pendorong:

Perangkat daerah terkait yang membidangi trantibumlinmas secara berkala melakukan kegiatan penegakkan perda. Selain itu adanya sinergi lintas sektor melalui kegiatan koodinasi dalam upaya penanggulangan tindak kriminalitas di daerah. Dalam upaya menekan, mencegah dan menangani penyalahgunaan dan peredaran zat adiktif/narkoba yang merupakan penyumbang terbesar angka kriminalitas Telah disusun kebijakan fasilitas pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Paser. Telah dilakukannya sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) hingga ke desa dasa terutama desa darurat narkoba yang ada di Kabupaten Paser.

Solusi/langkah-langkah perbaikan:

Meningkatkan sinergi lintas sektor termasuk tokoh masyarakat/agama dan elemen masyarakat lainnya, mengingat penanganan kriminalitas tidak bisa diselesaikan secara sektoral, dasn efektifitas penanganannya diperlukan pelibatan seluruh elemen masyarakat.

Meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam rangka pemberantasan perbuatan maksiat dan pencegahan penyalahgunanan peredaran gelap narkoba.

Para orang tua masih banyak yang belum memahami pentingnya dan perlu semakin kuatnya kontrol/pengawasan kepada anak-anaknya ditengah derasnya arus informasi/komunikasi sebagai dampak perkembangan digitalisasi/teknologi informasi yang membuat genarasi muda/anak rentan terpengaruh ekses negatif yang cenderung mendorong kepada tindak perbuatan kriminal.

Tabel 3.11
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kab. Paser Tahun 2017-2022

NO	TAHUN	KASUS
1	2018	246
2	2019	163
3	2020	172
4	2021	186
5	2022	398

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

Sumber : Kabupaten Ashar

6. Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur diukur dengan indikator indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Capaian IKLI Kabupaten Paser dengan capaian 100 % (Sangat tinggi) seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

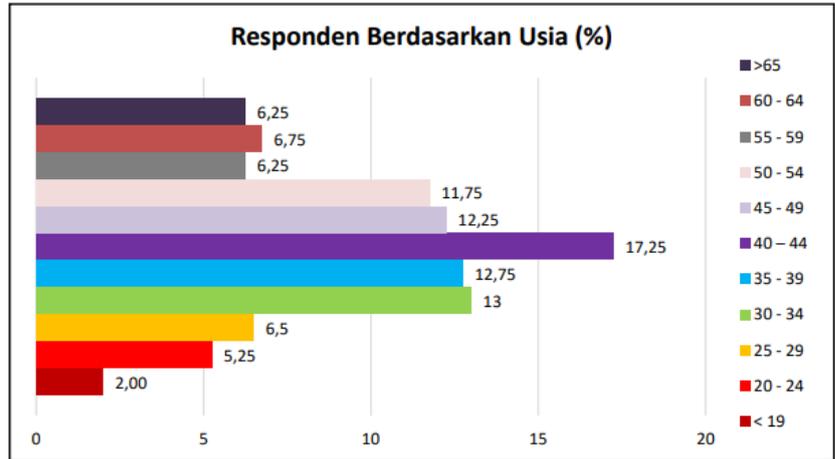
Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fisik 2. Kualitas Fisik 3. Kesesuaian 4. Efektifitas 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Kontribusi pada perekonomian 	7	7	100	Sangat tinggi

Berdasarkan data dari proses survei dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan IKLI Kabupaten Paser tahun 2023 secara total gabungan dari seluruh dimensi adalah 64,83 dengan indeks 7, Kategori Baik atau memuaskan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kab. Paser diukur melalui survei berdasarkan Usia, Pendidikan, Agama, Suku dan Gender.

• **Redsponden Berdasarkan Usia**

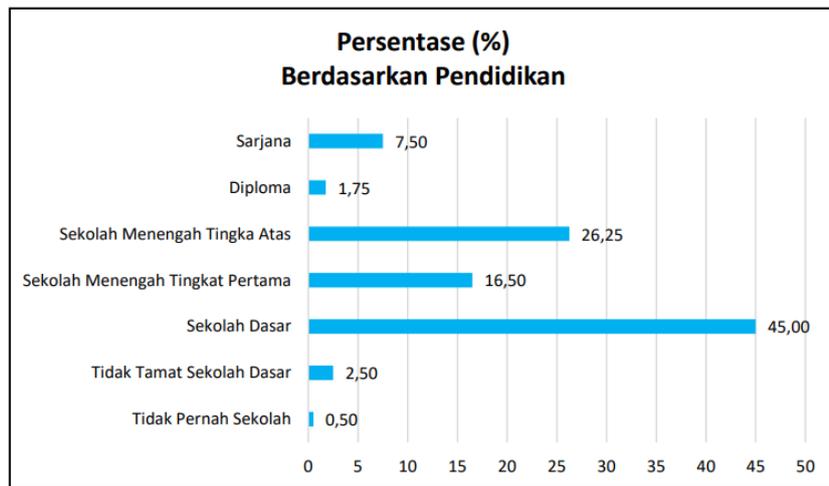
Berdasarkan usia, dari 400 responden mayoritas responden berusia 40-44 tahun yaitu 17,25 %, disusul oleh responden dengan usia 30 – 34 tahun sebanyak 13,00 % dan usia 35 – 39 tahun yakni 12,75%. Secara keseluruhan, dari 400 responden, sebanyak 340 responden berusia 20 – 54



Sumber : Data Hasil Survei

tahun atau 85,00% dan hanya 60 responden atau 15,00% yang berusia ≤ 19 tahun dan ≥ 55 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden merupakan penduduk usia produktif.

• **Responden Berdasarkan Pendidikan**



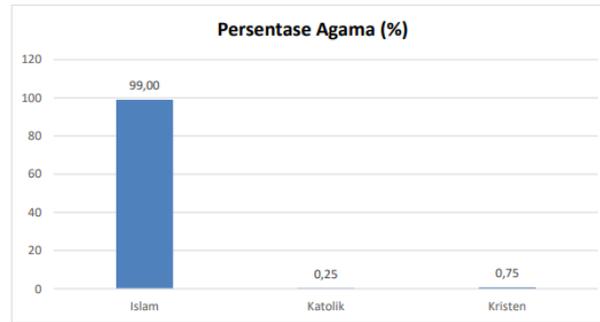
Sumber : Data Hasil Survei

Sebanyak 180 responden atau 45,00% dari 400 responden dalam survei ini tamat Sekolah

Dasar (SD), 26,25% berpendidikan tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) dan 16,50% tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP). Hanya 9,25% responden berpendidikan Perguruan Tinggi yang terdiri dari 1,75 % Diploma dan 7,5 % Sarjana. Selain itu terdapat responden yang tidak tamat SD

sebanyak 10 responden (2,5%) dan bahkan ada 2 orang (0,5 %) yang tidak pernah sekolah.

- **Responden Berdasarkan Agama**

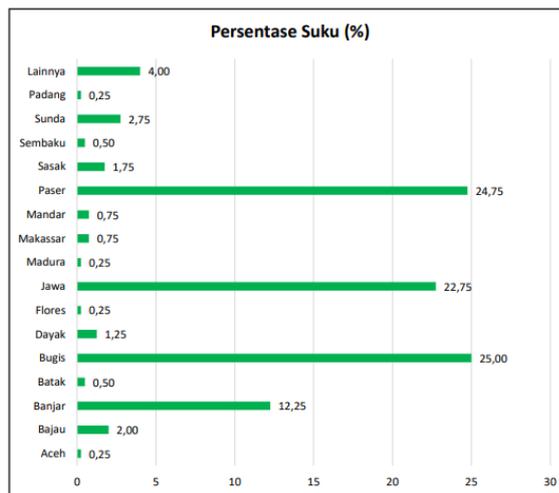


Sumber : Data Hasil Survei

beragama Katolik.

Berdasarkan agama yang dianut, sebanyak 397 responden (99,00 %) beragama Islam, 3 responden (0,75 %) beragama Kristen, dan 1 orang (0,25 %)

- **Responden Berdasarkan Suku**

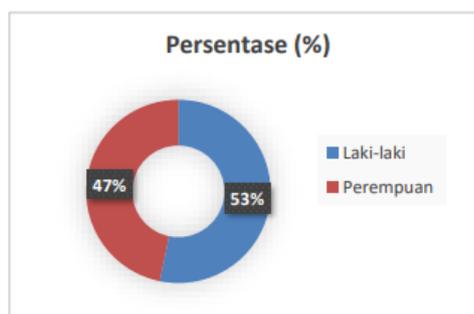


Sumber : Data Hasil Survei

orang (22,75%). Artinya 72,50% (hampir 3 dari 4 orang) responden dari ketiga suku tersebut.

Responden dalam survei ini terdiri dari beragam suku baik “suku lokal” maupun “pendatang”. Setidaknya ada 17 suku yang menjadi responden. Sebagian besar responden merupakan suku Bugis yaitu 100 orang (25,00 %), Paser sebanyak 99 orang (24,75%) dan Jawa 91

- **Responden Berdasarkan Gender**



Sumber : Data Hasil Survei

Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 212 orang 53,00% dan sisanya perempuan yaitu 188 orang (47,00%).

Adapun rekapitulasi hasil IKLI Kab. Paser Tahun 2023 seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.13
Rekapitulasi Hasil Ikli Kab. Pasr Tahun 2023**

No.	Layanan Infrastruktur	Nilai Indeks Kepuasan	Kategori
1.	Infrastruktur Pekerjaan Umum		
a	Jalan Menuju Kabupaten	78,78	Baik
b	Jalan Kecamatan	76,59	Baik
c	Jalan Desa	81,62	Sangat Baik
d	Jalan Usaha Tani	72,77	Baik
e	Jembatan	77,07	Baik
2.	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
a	Air Bersih	73,59	Baik
b	Listrik	89,43	Sangat Baik
c	Drainase	61,52	Baik
d	Persampahan	55,17	Kurang Baik
e	Air Limbah Domestik	56,98	Kurang Baik
3.	Infrastruktur Pengairan		
a	Irigasi	50,08	Kurang Baik
b	Embung	52,81	Kurang Baik
4.	Infrastruktur Transportasi		
a	Marka Jalan	51,91	Kurang Baik
b	Penerangan Jalan	64,70	Baik
c	Rambu Lalu Lintas	47,59	Kurang Baik
d	Moda Transportasi	46,17	Kurang Baik
e	Terminal	46,17	Kurang Baik
5.	Infrastruktur Telekomunikasi		
a	Jaringan Telekomunikasi	83,97	Sangat Baik
IKLI Kabupaten Paser Tahun 2023		64,83	Baik

Sumber : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kab. Paser 2023

Dimensi Pengukuran IKLI

Pembangunan infrastruktur pada suatu daerah/wilayah dapat dinilai keberhasilannya pada ketercapaian indikator manfaat (outcome) dan dampak (impact).

Pengukuran efektivitas tiap-tiap jenis infrastruktur dilakukan dengan mengadopsi teori sistem dari Gibson, Donely, dan Ivancevich (1997), Berdasarkan pendekatan dari teori tersebut maka batasan kriteria efektif dalam pengukuran IKLI Kabupaten Paser ini terdiri dari 6 (Enam) dimensi (kriteria), yaitu :

1) Ketersediaan Fisik (*availability*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap ada/tersedianya bangunan infrastruktur, yaitu dalam setiap aktivitas belanja Negara/daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya indikator dasarnya akan menghasilkan output yang berupa barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut

dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik.

2) Kualitas Fisik (*quality*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap kualitas atas bangunan fisik bangunan infrastruktur, yaitu kualitas output yang dihasilkannya, yaitu bahwa aspek efektifitas akan lebih reliable apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang baik dan optimal.

3) Kesesuaian (*appropriateness*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian bangunan fisik infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat sendiri, yaitu kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat.

4) Efektivitas pemanfaatan (*utility*)

Merupakan kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan fisik infrastruktur dengan keseharian kehidupan masyarakat, yaitu tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.

5) Penyerapan tenaga kerja (*job creation*)

Merupakan kepuasan masyarakat atas dampak pembangunan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur.

6) Kontribusi pada perekonomian

Merupakan kepuasan masyarakat atas dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat, yaitu tingkat kepuasan masyarakat didasarkan pada aspek kontribusi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah/daerah.

Metode Pengukuran /Perhitungan IKLI

Metode penghitungan IKLI di Kab. Paser menggunakan rumus berikut :

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

$$= \sum_{j=1}^{n=10} \left[\frac{U_{1i} + U_{2i} + U_{3i} + U_{4i} + U_{5i} + U_{6i}}{6} \right] \cdot 100$$

Keterangan :

U = Skor dari 6 dimensi pembentuk indeks dari indeks kepuasan layanan infrastruktur

[i] = Sektor infrastruktur yang di evaluasi di setiap kecamatan

Faktor Penghambat/Kendala :

Beberapa kendala krusial dalam pelaksanaan Pembangunan insfrastruktur di Kabupaten Paser yaitu persoalan lahan yang banyak masuk dalam kawasan cagar alam dan areal penggunaan lain (APL), Belum tersusunnya peta RDTR Kabupaten, sehingga untuk melaksanakan investasi sektoral masih memerlukan pertimbangan teknis PKKPR, akibatnya proses pembangunan untuk mendorong investasi menjadi lambat. Luasnya wilayah Kabupaten Paser serta Tingkat kesulitan geografis yang cukup tinggi dari satu sisi kebutuhan Pembangunan insfrastruktur yang besar tidak sepadan dengan kemampuan anggaran, maka akselerasi pembangunan menjadi terkendala dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan aspirasi Masyarakat dalam hal ketersediaan insfrastruktur di wilayah mereka.

Faktor pendukung :

1. komitmen pemerintah dalam pembangunan insfrastruktur sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang diikuti penganggaran yang cukup besar setiap tahunnya cukup berdampak pada progres pembangunan insfrastruktur dan memberikan kepuasan masyarakat terkait layanan publik bidang insfrastruktur.
2. Pembangunan insfrastruktur, bukan hanya menjadi focus pembangunan pemerintah daerah tapi juga menjadi perhatian pemerintah provinsi mapun pemerintah desa sehingga memberikan keyakinan yang optimis pembangunan insfrastruktur tetap berlanjut ditengah kondisi luasnya wilayah serta kebutuhan pembangunan insfrastruktur yang tinggi.

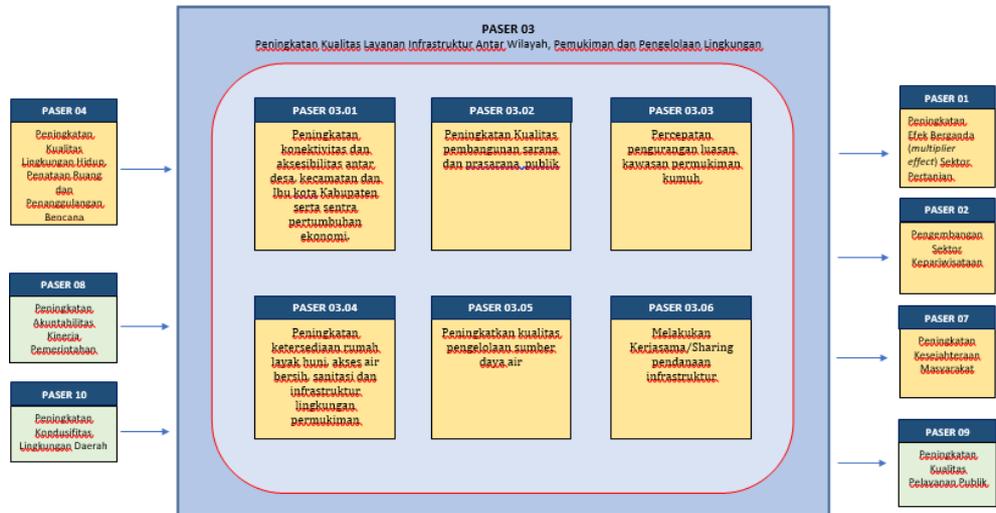
3. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Paser dengan provinsi dalam hal persoalan clean and clear yang menjadi persoalan dalam pembangunan infrastruktur terjalin cukup baik.
4. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Paser, mendapat anggaran melalui bantuan keuangan dengan nominal cukup besar.

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

1. Melakukan koordinasi intens kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mencari Solusi/jalan keluar persoalan banyaknya lahan yang masuk dalam cagar alam (CA) dan areal penggunaan lain (APL), upaya pemerataan pembangunan wilayah pesisir yang terkendala cagar alam (CA) melalui pengusulan pembahasan status CA ke Kanwil Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Melakukan penyelenggaraan layanan infrastruktur yang menyentuh sampai ke pelosok-pelosok paling ujung. Untuk terus menimalisir kesenjangan infrastruktur, mengingat bahwa layanan infrastruktur yang cukup baik hanya ada di daerah-daerah yang secara jarak relatif lebih dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kecamatan, Sedangkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan masih mengalami layanan infrastruktur yang minim
3. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, perlunya penyusunan peta RTDR

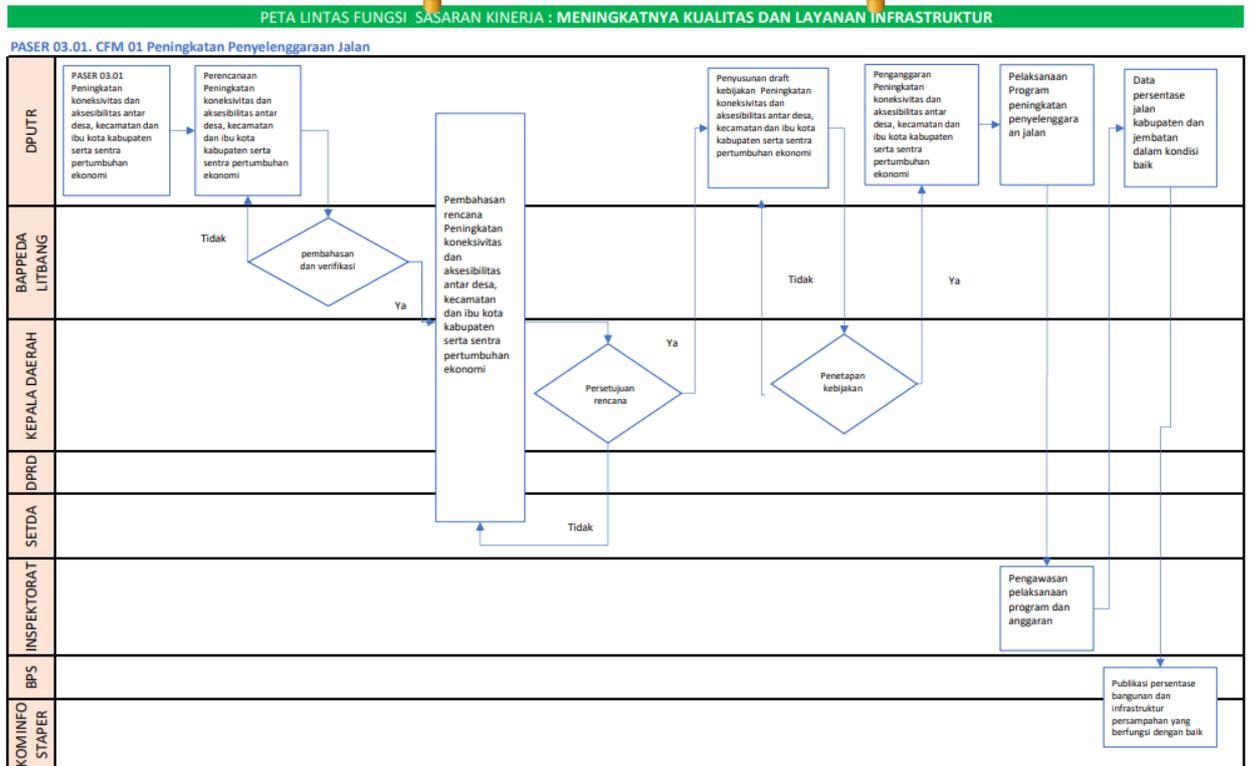
Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Berkembangnya sektor kepariwisataan** seperti pada gambar berikut:

**Gambar 3.5
Proses Bisnis Sasaran 6**

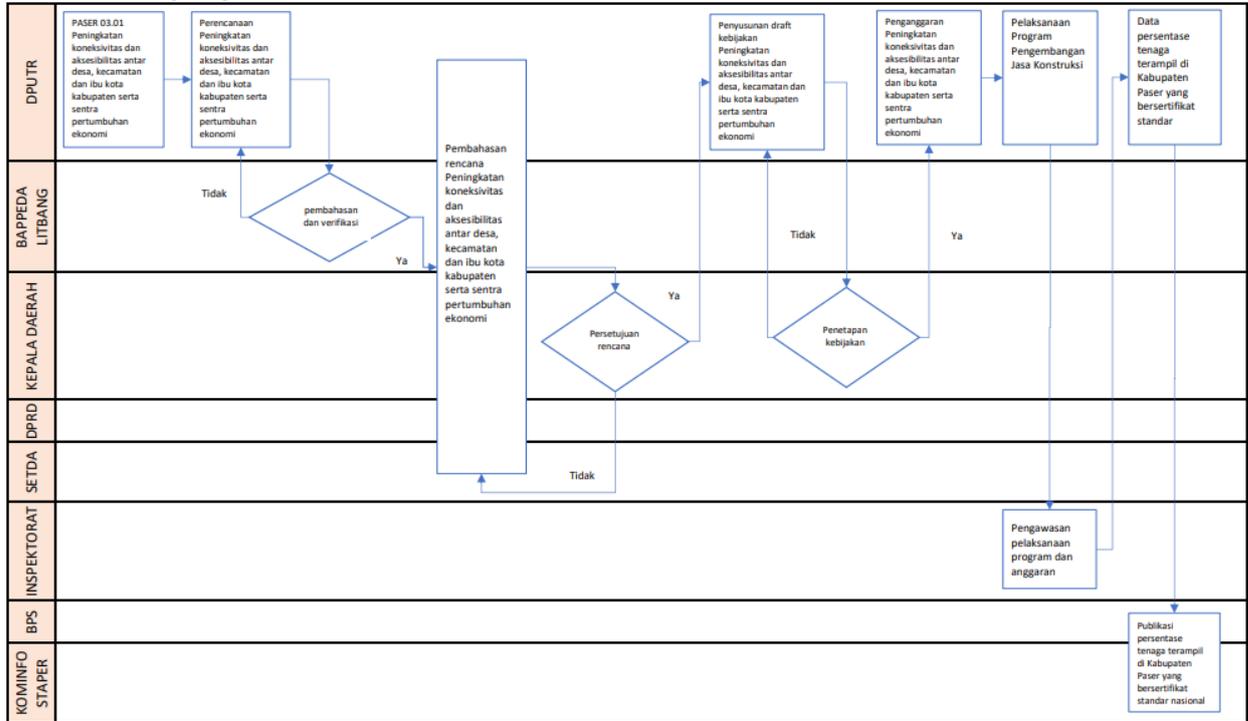


Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta Probis Pemkab. Paser

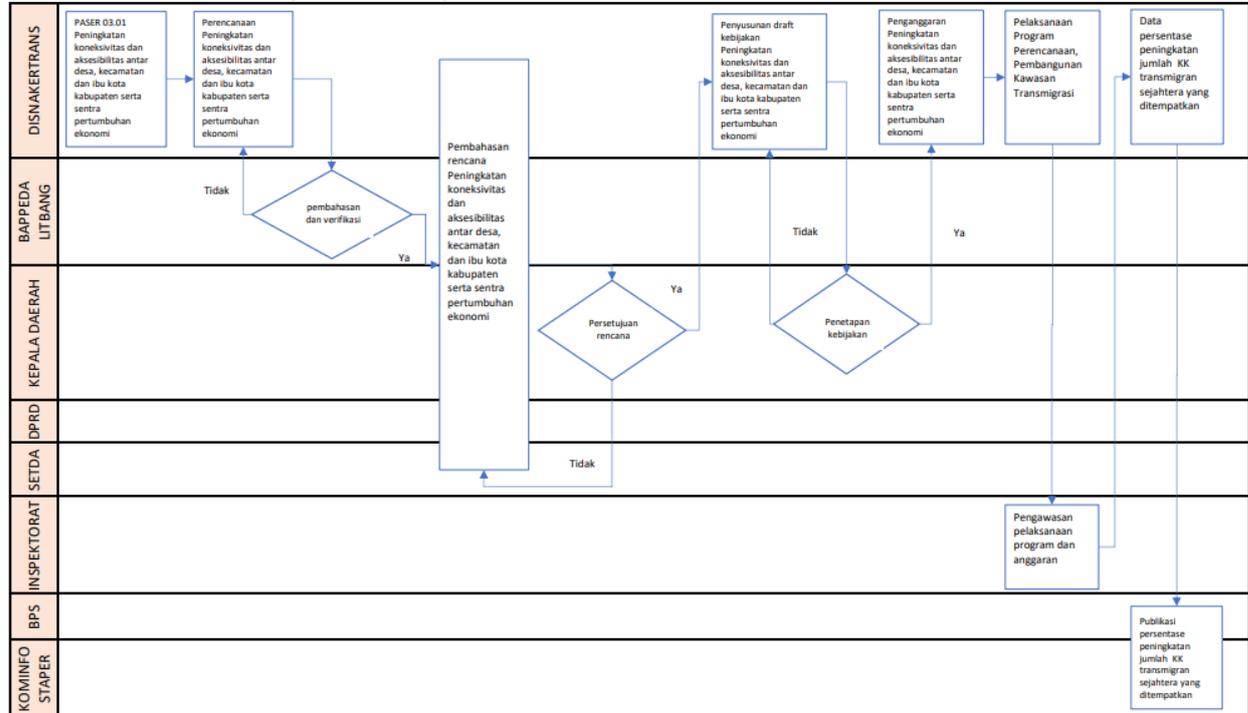
**Gambar 3.6
Peta Lintas Fungsi Sasaran 6**



PASER 03.01. CFM 02 Pengembangan Jasa Konstruksi

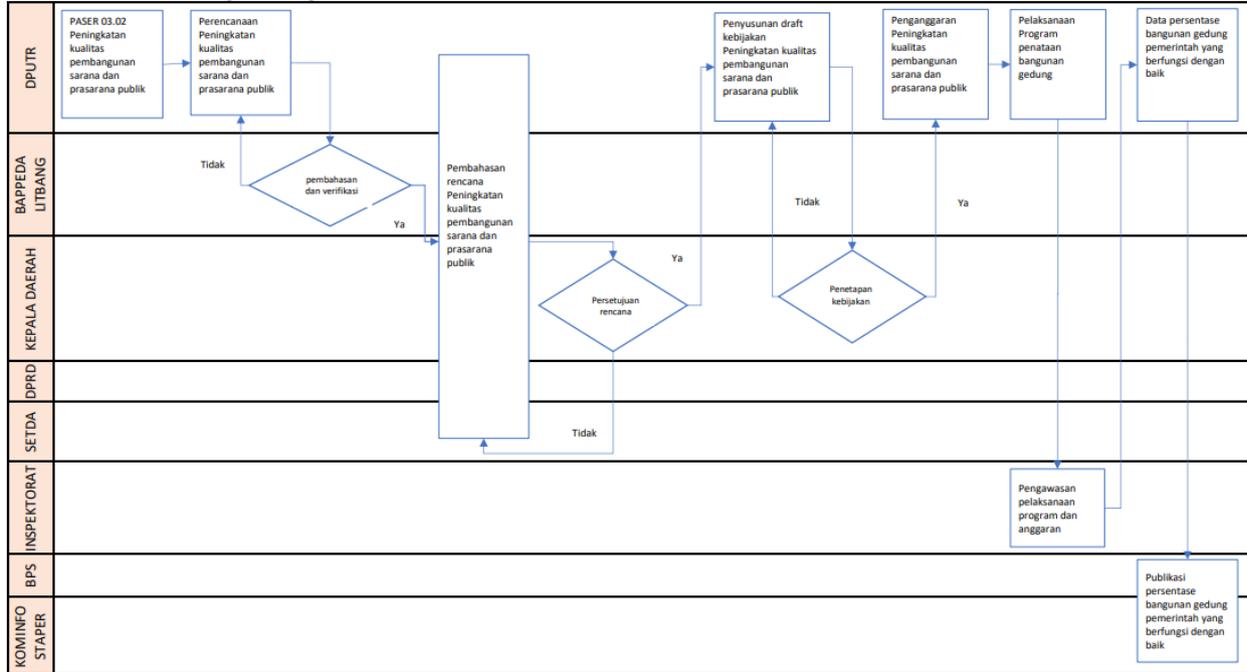


PASER 03.01. CFM 03 Perencanaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi

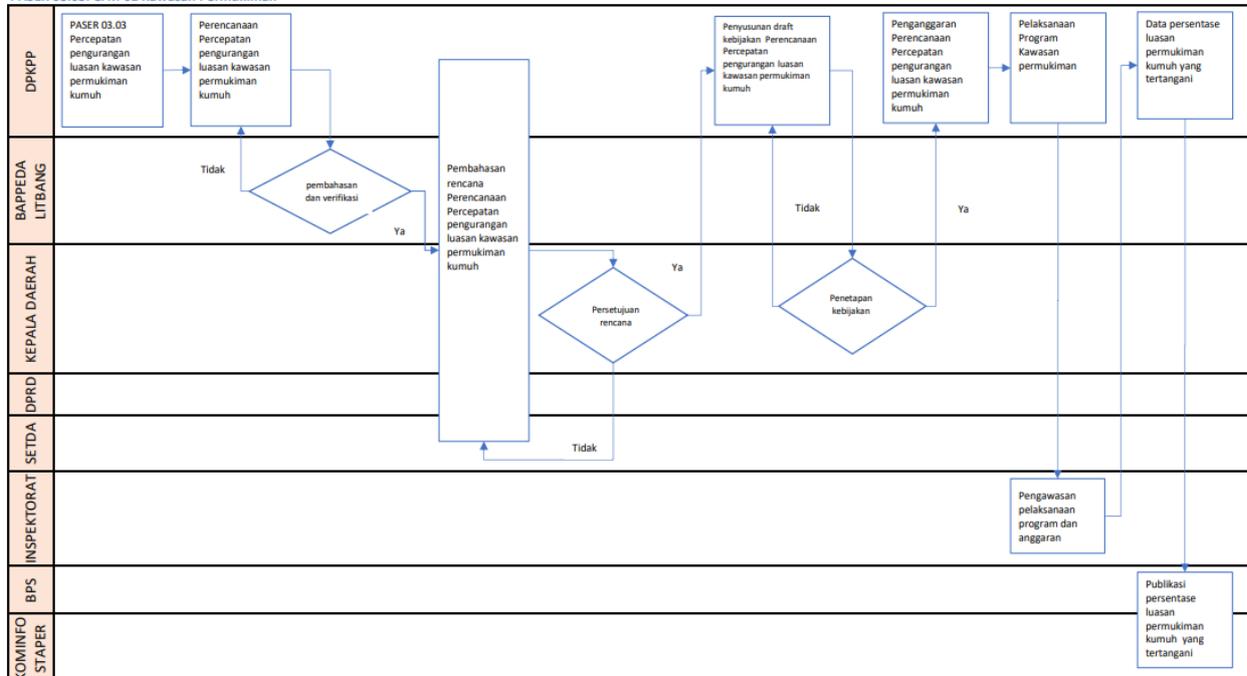


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

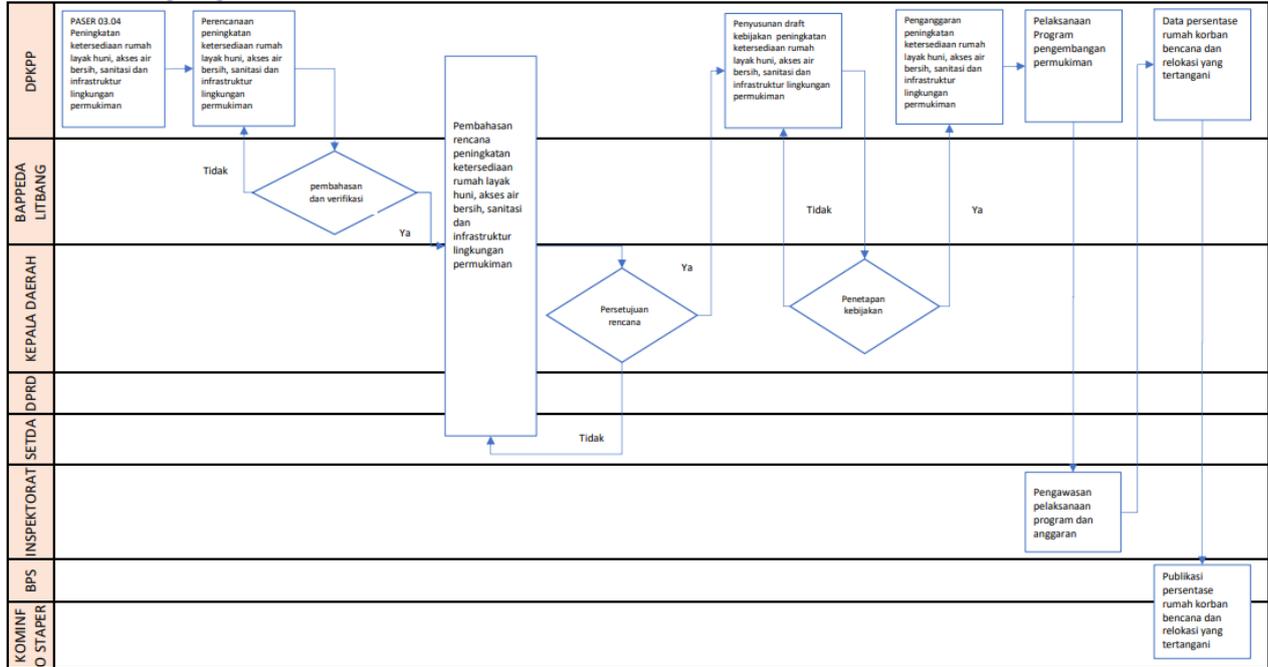
PASER 03.02. CFM 01 Penataan Bangunan Gedung



PASER 03.03. CFM 01 Kawasan Permukiman



PASER 03.04. CFM 01 Pengembangan Perumahan



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

7. Sasaran Strategis 7 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana diukur dengan 3 Indikator yaitu Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Strategis 7

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata	59,18	64,02	108,18	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
	ruang) dikali 100				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(30% x IKU) + (30% x IKA) +(40%x IKTL) Dimana : IKU= Indeks Kualitas Udara IKA=Indkes Kualitas Air IKTL= Indeks Kaulitas Tutupan Lahan	74,56	72,57	97,33	Tinggi
Indeks Resiko Bencana	IRB = R= Hx V E / C R= Resiko, Pengertian resiko adalah peluang untuk rugi. Resiko adalah kemungkinan kehilangan. Resiko adaalah ketidakpastian. Resiko adalah kejadian yang dapat merugikan. V= Vulnerability H= Hazar E = Elemen berisiko C= Capasity	195,5	191,78	101,65	Sangat tinggi
Rata-rata capaian				102,39	Sangat tinggi

Berdasarkan pengukuran capaian realisasi indakator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indeks penyelenggaraan penataan ruang dengan realisasinya 64,02 %, dan target kinerja yang ditetapkan 59,18 maka dengan demikian capaian kinerjanya adalah 108,18% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai

bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Paser tahun 2023 adalah 72,57 yang mana capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 74,56 dengan capaian kinerja sebesar 97,33%, dengan predikat Tinggi.

Dari hasil realisasi IKLH 2023 Daerah Kabupaten Paser sebesar 72,57 berada pada predikat tinggi, namun demikian belum memenuhi target IKLH yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan target sebesar 74,56, namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 terjadi kenaikan yaitu 72,30 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 72,57 pada tahun 2023.

Faktor Penghambat/Kendala :

- Berdasarkan kejadian bencana kebakaran di kabupaten paser, didominasi kejadian kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran kanal pada ekosistem lahan gambut yang merupakan sebagai faktor koreksi pada kulaitas tutupan lahan.
- Perubahan fungsi lahan yang cukup besar dan terus berlanjut dan cenderung meningkat dari pertanian ke non pertanian akan memberikan dampak pada persoalan lingkungan hidup.
- Terjadinya Penurunan tutupan belukar menjadi hutan lahan kering sekunder Serta hutan tanaman menjadi perkebunan ataupun pertanian lahan kering. memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan yaitu Peningkatan Aliran Permukaan yang kemampuan lahan untuk menyerap air berkurang. Akibatnya, aliran permukaan meningkat karena air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah yang dapat menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Selain itu dapat menyebabkan perubahan ekosistem, hilangnya fungsi ekologis dan potensi resiko kebaran meningkat.

Faktor Penghambat/Kendala :

- Berdasarkan kejadian bencana kebakaran di kabupaten paser, didominasi kejadian kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran kanal pada ekosistem

lahan gambut yang merupakan sebagai faktor koreksi pada kulaitas tutupan lahan

- Perubahan fungsi lahan yang cukup besar dan terus berlanjut dan cenderung meningkat dari pertanian ke non pertanian akan memberikan dampak pada persoalan lingkungan hidup.
- Terjadinya Penurunan tutupan belukar menjadi hutan lahan kering sekunder Serta hutan tanaman menjadi perkebunan ataupun pertanian lahan kering. memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan yaitu Peningkatan Aliran Permukaan yang kemampuan lahan untuk menyerap air berkurang. Akibatnya, aliran permukaan meningkat karena air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah yang dapat menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Selain itu dapat menyebabkan perubahan ekosistem, hilangnya fungsi ekologis dan potensi resiko kebaran meningkat.

Faktor Pendukung :

- Adanya nilai kearifan lokal sebagai adat/tradisi yang masih berlangsung dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam di masa datang.
- Adanya kebijakan Lebih selektif dalam pemberian izin kegiatan khususnya kegiatan yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Paser;
- Penyusunan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Adanya penguatan aspek kelembagaan (wacana pembentukan uptd limbah domestik) dan peningkatan sarana prasarana terkait pengelolaan limbah domestic.
- peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan air limbah industri dan domestik.
- Kesadaran peran serta masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara, serta meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara.

Solusi/langkah-langkah perbaikan:

- Perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dan perlu melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH untuk pemantauan melalui citra satelit.
- Melakukan sinkronisasi RTRW maupun RDTR dengan database spasial sehingga zona kawasan yang akan dikendalikan alih fungsi dapat ditetapkan secara jelas.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Penerapan green economy agar pembangunan ekonomi sejalan dengan meningkatnya kualitas lingkungan.
- Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah;

c. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) dimanfaatkan untuk evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sekaligus untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam upaya penurunan risiko bencana di daerah.

Indikator indeks risiko bencana merupakan indikator inversi atau progresif negatif, yaitu semakin rendah capaian/realisasinya maka kinerjanya semakin baik, demikian pula sebaliknya semakin tinggi capaian/realisasinya maka semakin rendah kinerjanya.

Adapun capaian Realisasi indeks risiko bencana (IRB) Kabupaten Paser tahun 2023 adalah 191,78 dari target yang ditetapkan yaitu 195. Dengan demikian maka capaian kinerja Indeks Risiko bencana (IRB) kearah positif atau berhasil dengan capaian sebesar 101,65% dengan predikat Sangat tinggi.

Faktor Penghambat/Kendala :

- Peranserta dan kesadaran masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana masih rendah
- Rasio petugas/pegawai dan kelengkapan sarana prasarana belum sebanding dengan luas wilayah penanganan bencana

- kesiapan dan kesiapsiagaan juga menjadi masih menjadi persoalan dalam respon cepat bencana
- Kabupaten Paser dihadapkan dengan kondisi wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dan rentan bencana, baik yang disebabkan faktor alam, non alam maupun faktor manusia, masih terjadinya degradasi lingkungan hidup,

Faktor Pendorong:

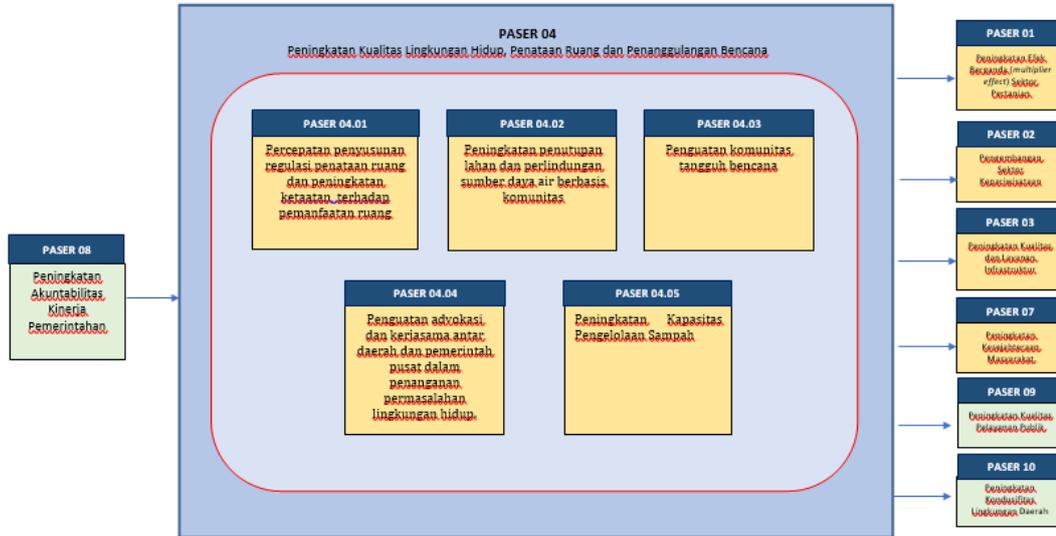
- Tersedianya kajian resiko bencana serta tersedianya pelayanan informasi rawan bencana, telah terbentuknya Tim Pengamat data dan Informasi, telah tersedianya Tim Kajian awal /cepat dan tepat.
- terjalinnya koordinasi *pentahelix* yang berkaitan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

Solusi/langkah-langkah Perbaikan :

- Peningkatan kapasitas kelembangan perangkat daerah yang menangani urusan sub kebencanaan dalam Upaya penguatan koordinasi dan komando pad saat terjadinya bencana
- Penguatan kapasitas petugas/personal Yang terjun langsung dalam penanganan bencana serta peningkatan kelengkapan sarana prasarana
- Penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi daerah rawan bencana perlu terus ditingkatkan
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan bencana baik saat terjadinya bencana maupun pasca terjadinya bencana.

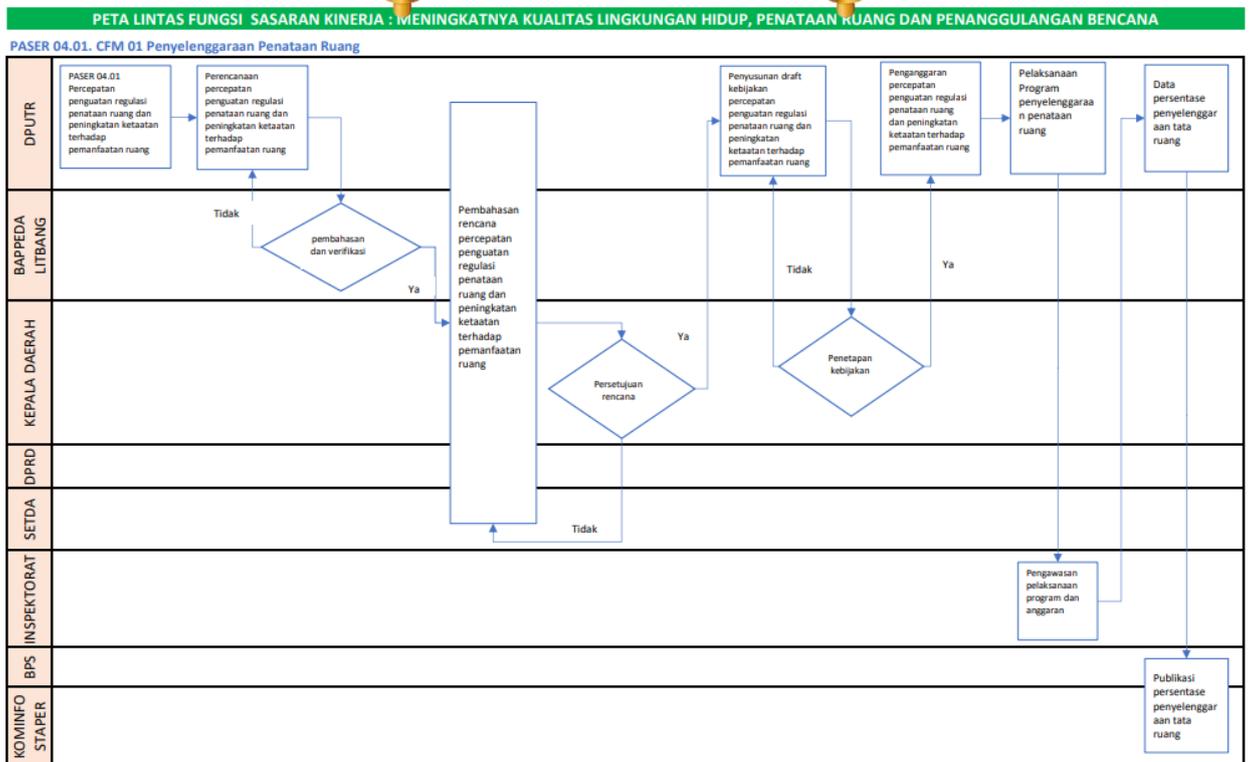
Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan bPenanggulangan Bencana** seperti pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.7
Proses Bisnis Sasaran 7

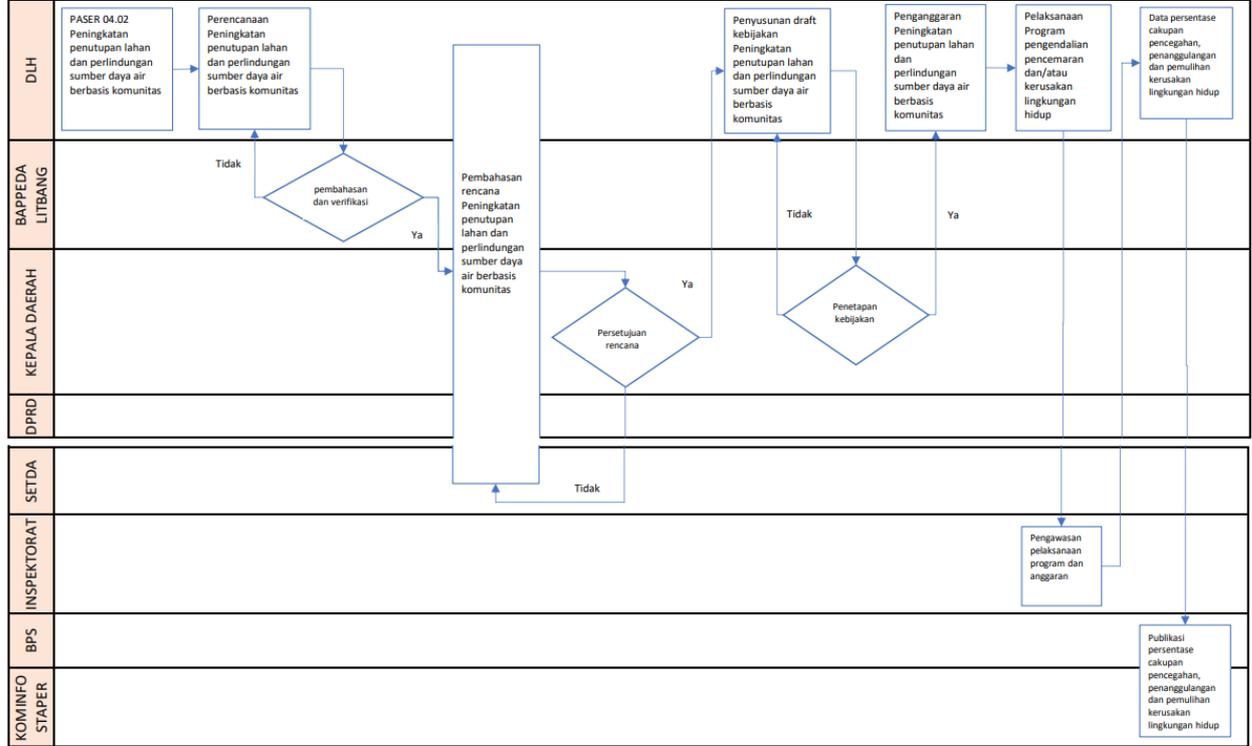


Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

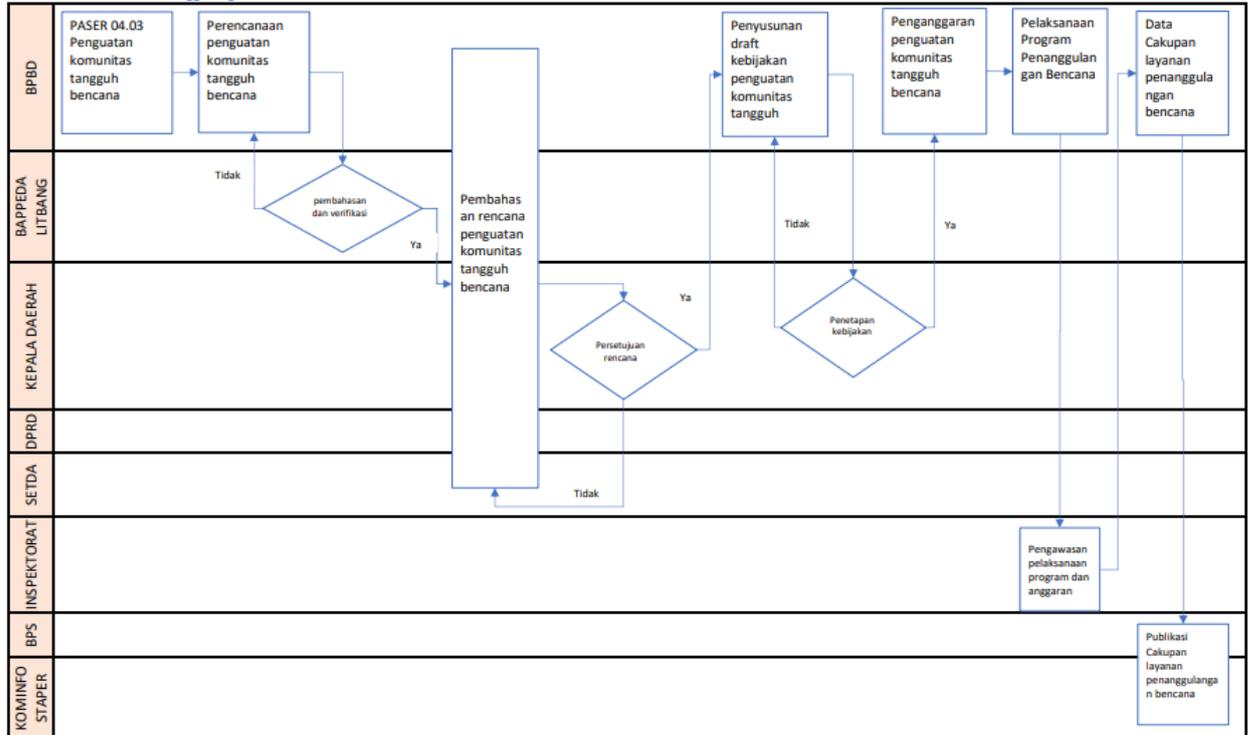
Gambar 3.8
Peta Lintas Fungsi Sasaran 7



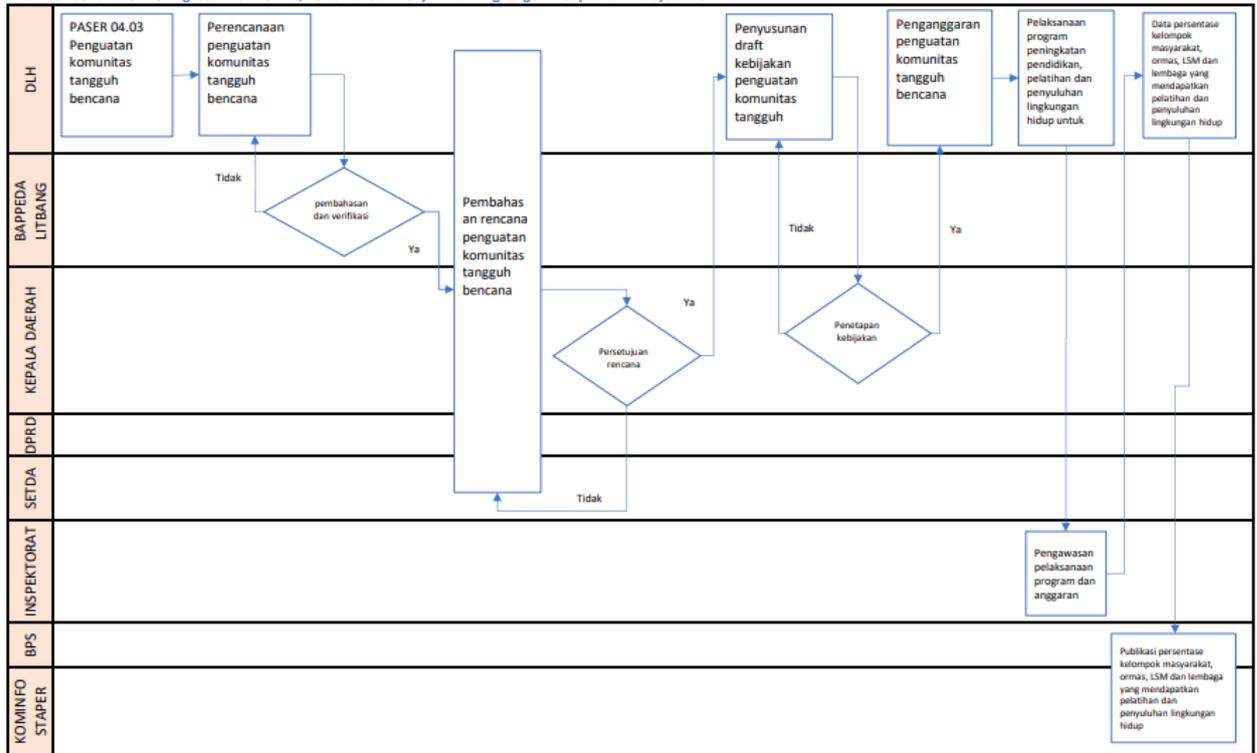
PASER 04.02. CFM 01 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



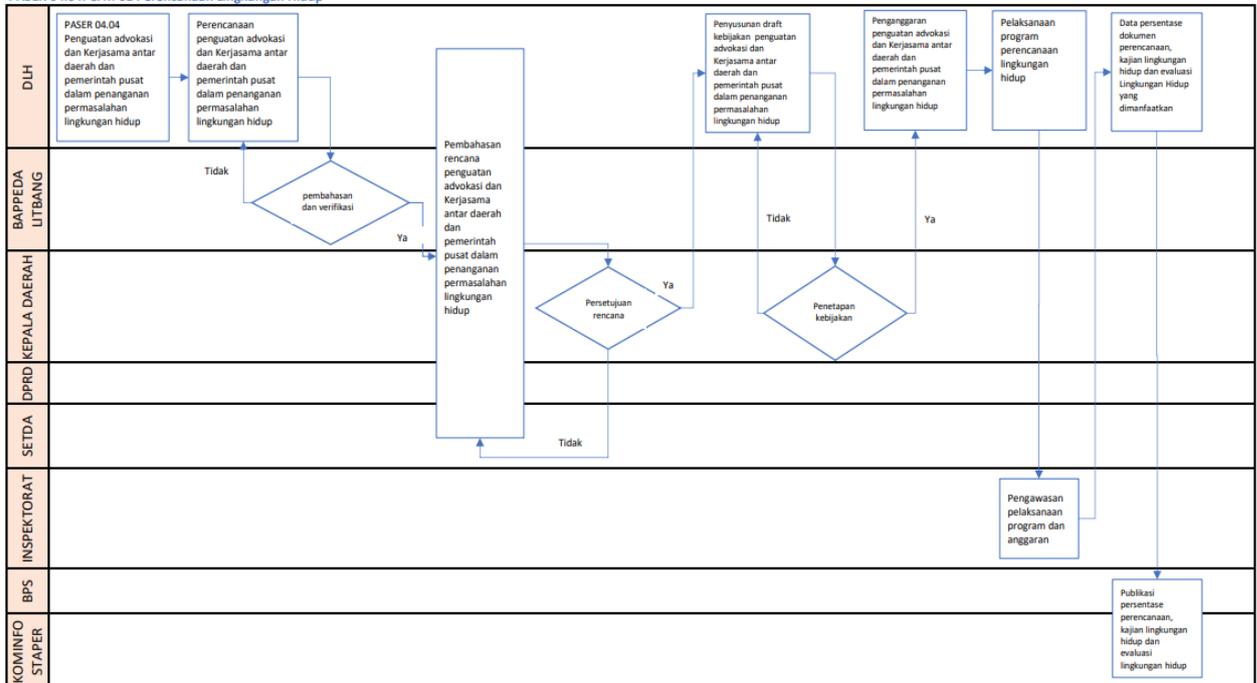
PASER 04.03. CFM 01 Penanggulangan Bencana



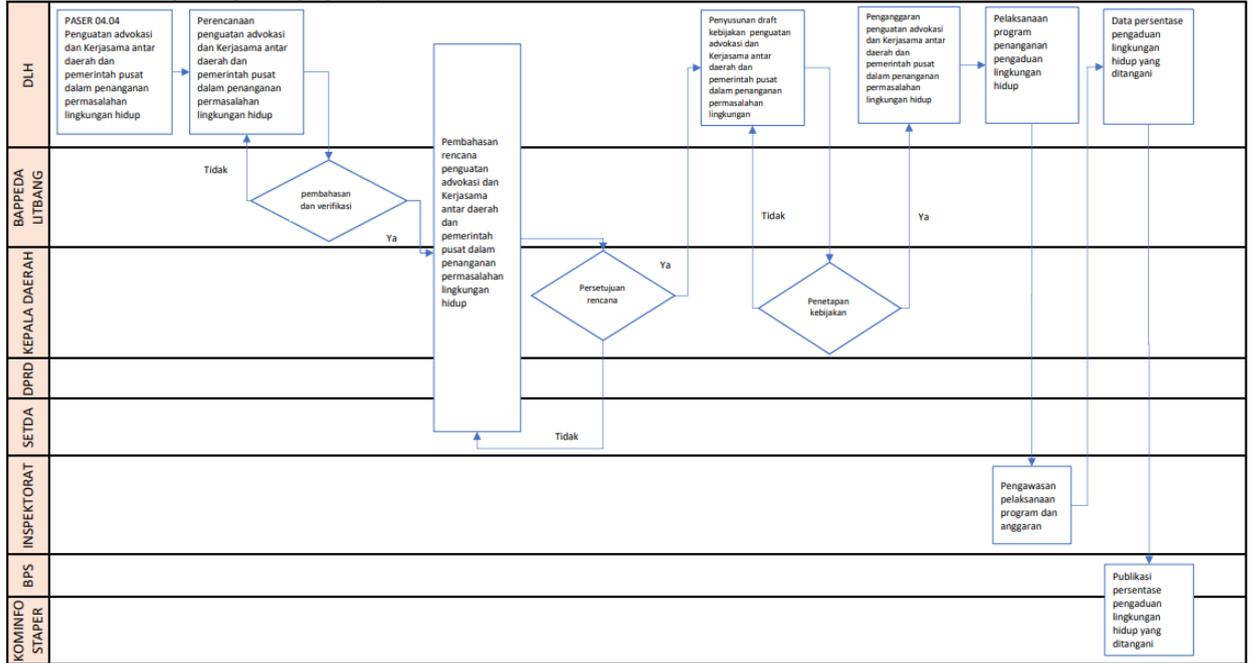
PASER 04.03. CFM 02 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



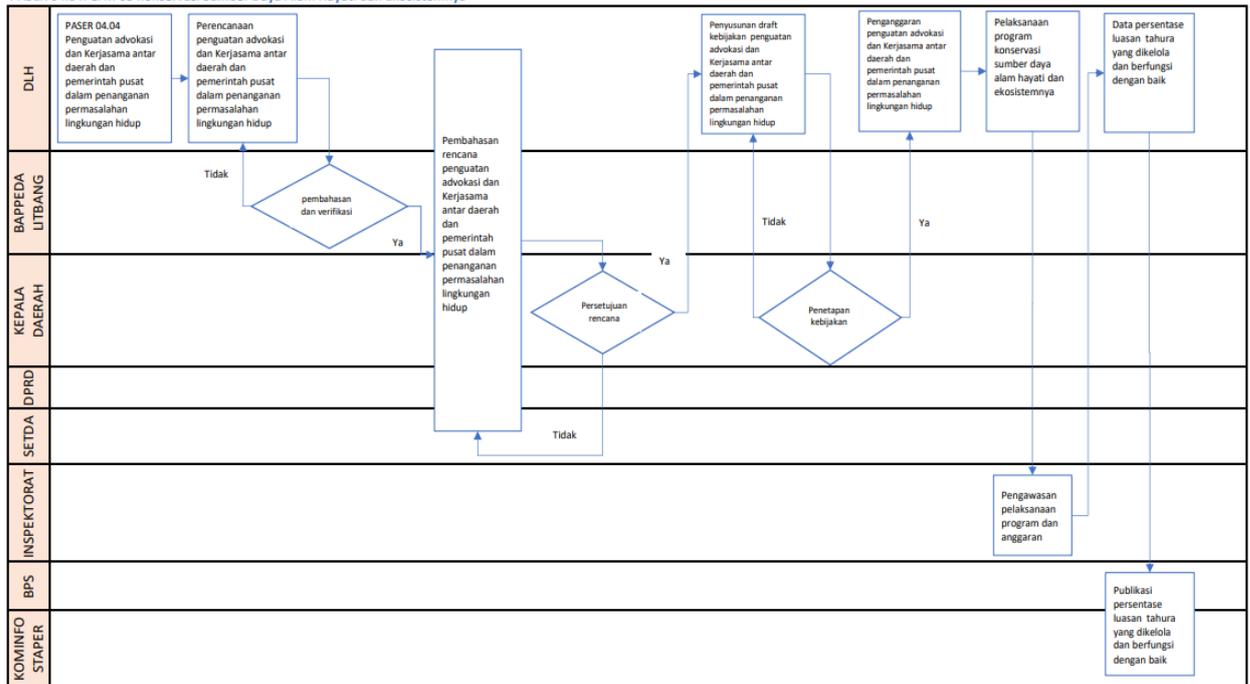
PASER 04.04. CFM 01 Perencanaan Lingkungan Hidup



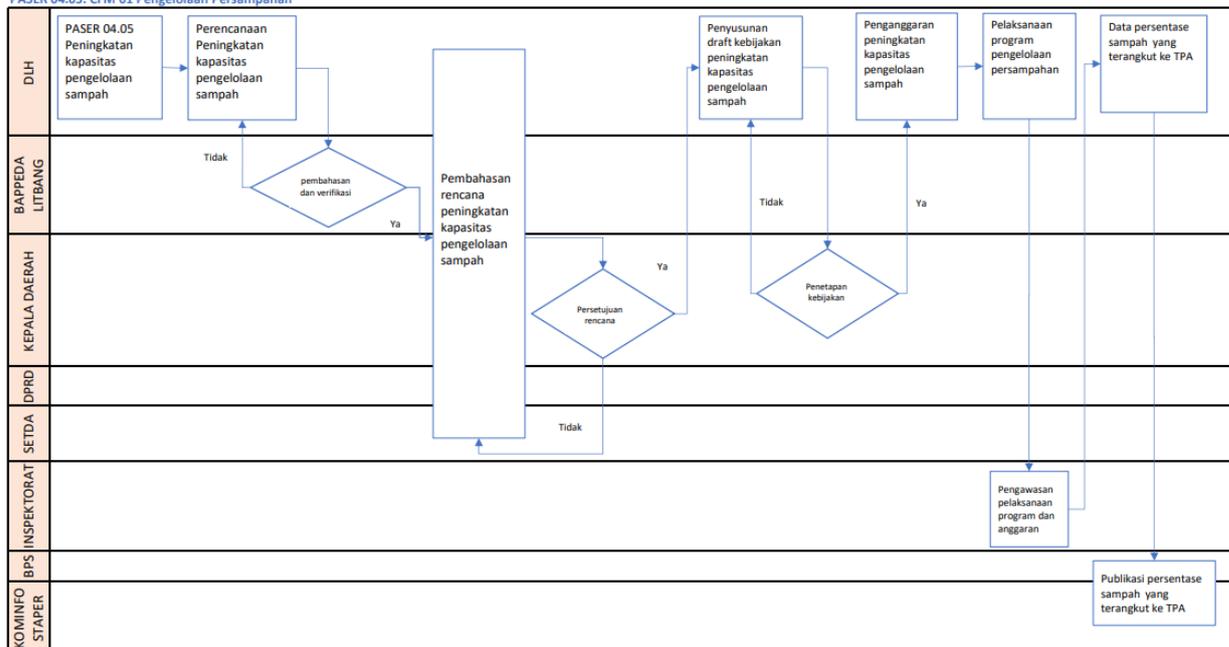
PASER 04.04. CFM 02 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



PASER 04.04. CFM 03 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



PASER 04.05. CFM 01 Pengelolaan Persampahan



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPemkab. Paser

8. Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dengan rata-rata capaian kedua indikator tersebut sebesar 100,32 % dengan predikat **Sangat tinggi**, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana :	13,3	13,37	100,55	Sangat tinggi
Rata-rata lama sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	8,9	8,91	100,11	Sangat tinggi
Rata-rata capaian				100,32	Sangat Tinggi

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” Kabupaten Paser tahun 2023 sebesar 13,3 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Paser sebesar adalah 13,37 tahun atau capaian kinerja sebesar 100,53 % (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Paser meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Angka HLS tahun 2022 sebesar 13,27 dengan capaian 100,15%.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Target kinerja rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2023 sebesar 8,9 dengan realisasi 8,91 dengan capaian tahun 2023 sebesar 100,11 % (kategori kinerja sangat tinggi).

Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 sebesar 8,80 tahun, capaian RLS Kabupaten Paser menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Faktor Penghambat atau Kendala

- Jumlah pengajar belum sebanding dengan jumlah jumlah siswa serta penyebarannya yang belum merata, belum meratanya kualifikasi pendidikan diseluruh jenjang pendidikan
- Dengan kondisi yang luas dan topografi yang sulit diakses di beberapa daerah serta jarak rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Dan masih ada sekolah yang ditempuh dengan transportasi air.

- Beberapa daerah terpencil seperti KAT (komunitas adat terpencil) yang belum ada gedung/bangunan, sehingga anak-anak masyarakat KAT kesulitan untuk bersekolah.
- Masih ada orang tua yang belum bisa baca tulis, sehingga suport orang tua ke dapa anak belum optimal ketika anak kesulitan dalam pembelajaran.
- Masih adanya kebiasaan walaupun sudah jauh berkurang, yaitu para orang tua menikahkan anak perempuannya diusia dini dan anak laki-laknya membantu orangtunya dalam pekerjaan sehari hari sehingga tidak lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

Faktor Pendorong:

- Adanya kebijakan mandatory spending urusan pendidikan sesuai kewenangan dan yang menjadi tanggung jawabnya.
- adanya kebijakan BOS, yang sanga membantu biaya pendidikan terutama bagi keluarga msikin.
- program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD yaitu program pemberian gratis seragam sekolah bagi siswa dan program satu guru satu laptop.
- adanya perusahaan dan BUMN yang di Kabupaten Paser untuk didorong berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya peningkatan rata lama sekolah melalui program CSR/tanggung jawab sosialnya

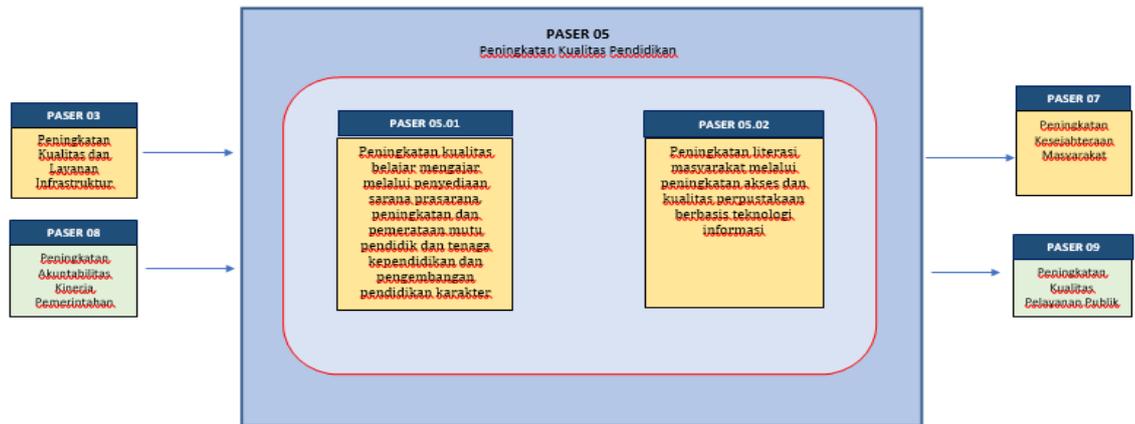
Solusi/Langkah-Langkah Perbaikan:

- Aksesibilitas pendidikan melalui pemerataan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan terutama yang menjadi kewenangan.
- peningkatan jumlah, kompetensi dan kualifikasi guru dan pemerataan disitribusinya, penguatan proses belajar mengajar melalui jalur pendidikan non formal, berkaitan hal tersebut pemerintah daerah melakukan pemenuhannya melalui kebijakan guru pengganti.
- mendorong peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan khususnya pendidikan non formal.

- daerah yang terpencil seperti KAT (komunitas adat terpencil) dilakukan layanan pendidikan kunjung

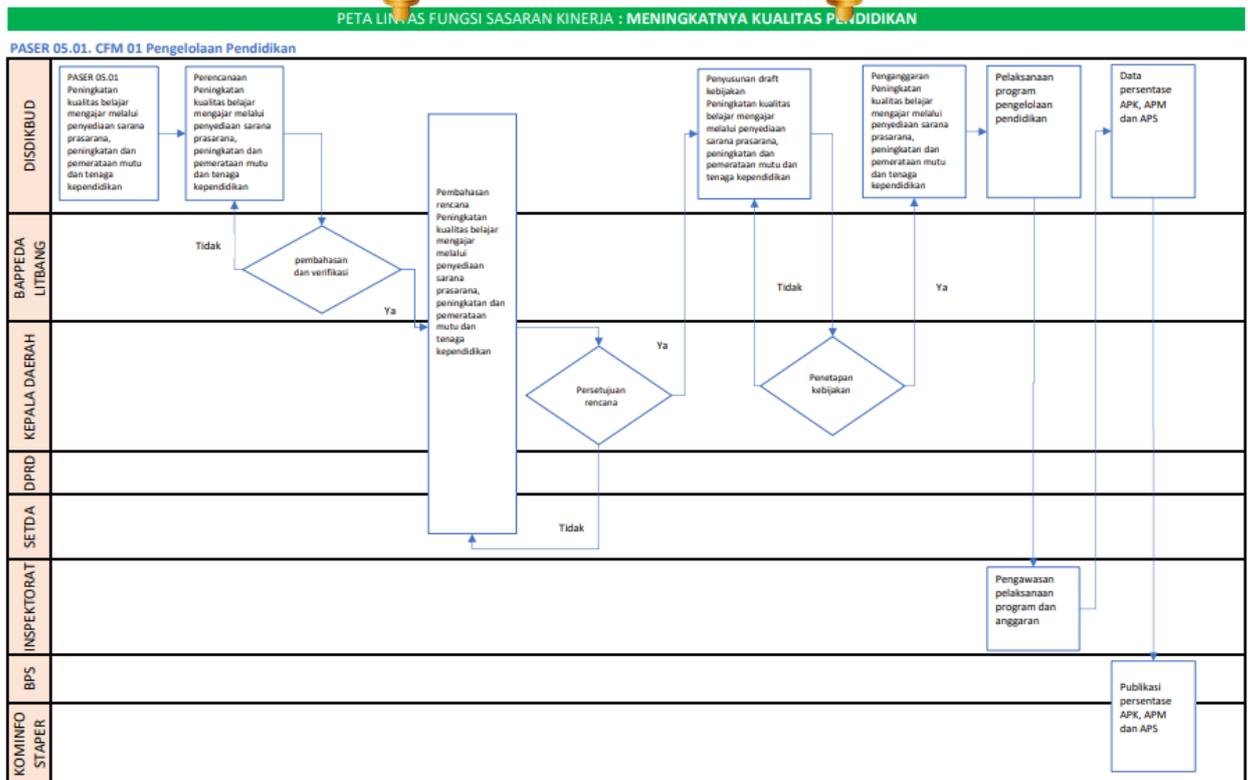
Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kualitas Pendidikan** seperti pada gambar dan tabel berikut:

**Gambar : 3.9
Proses Bisnis Sasaran 8**



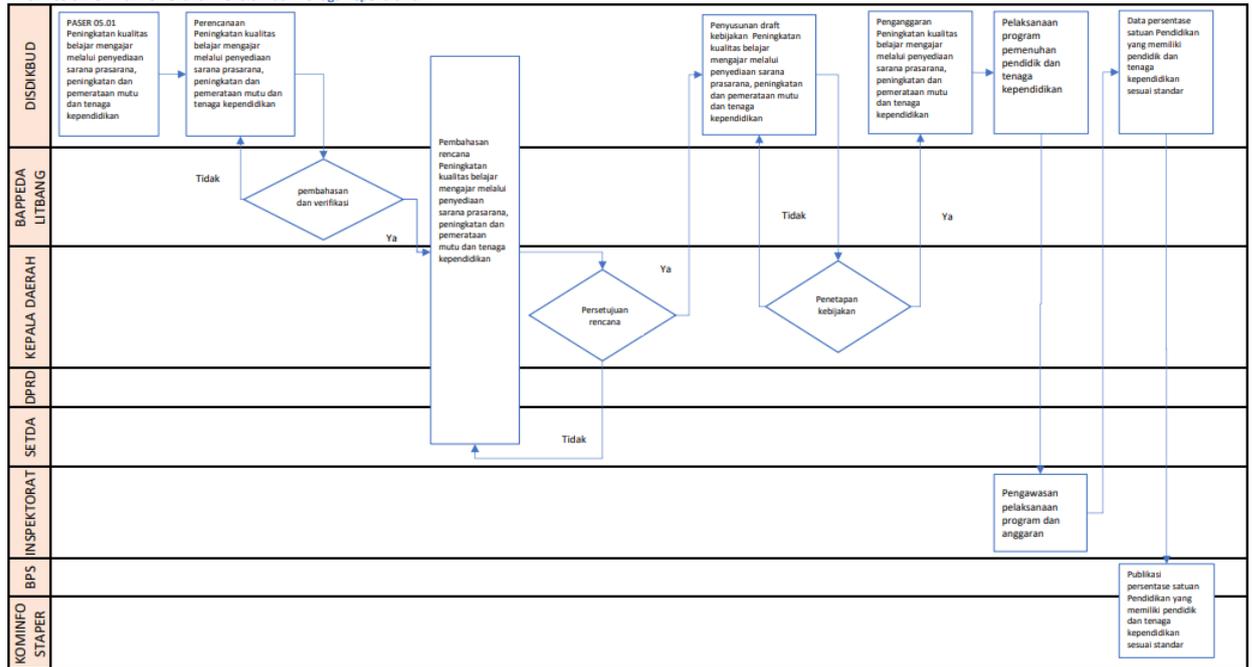
Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

**Gambar 3.10
Peta Lintas Fungsi Sasaran 8**

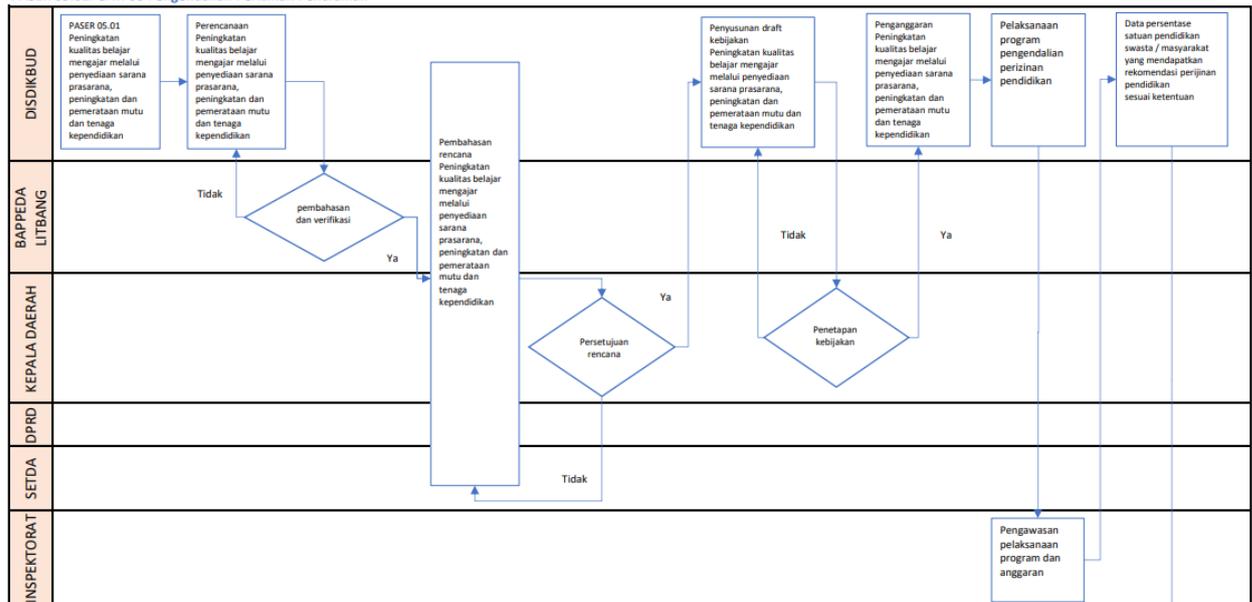


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

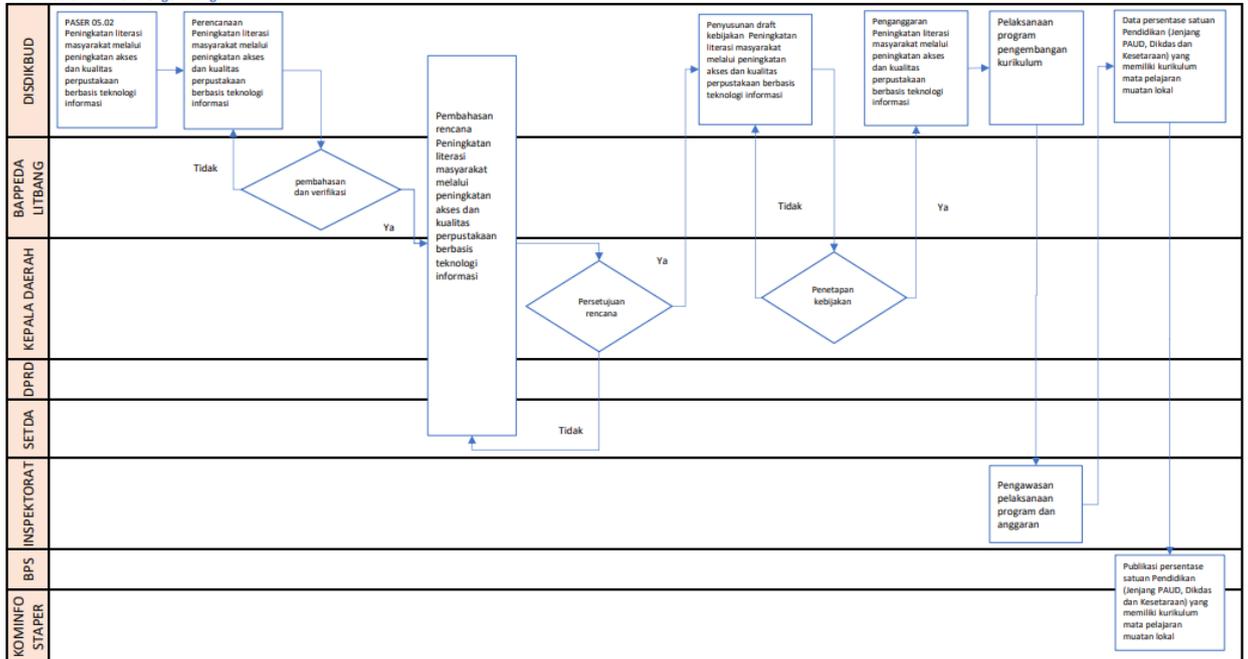
PASER 05.01. CFM 02 Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan



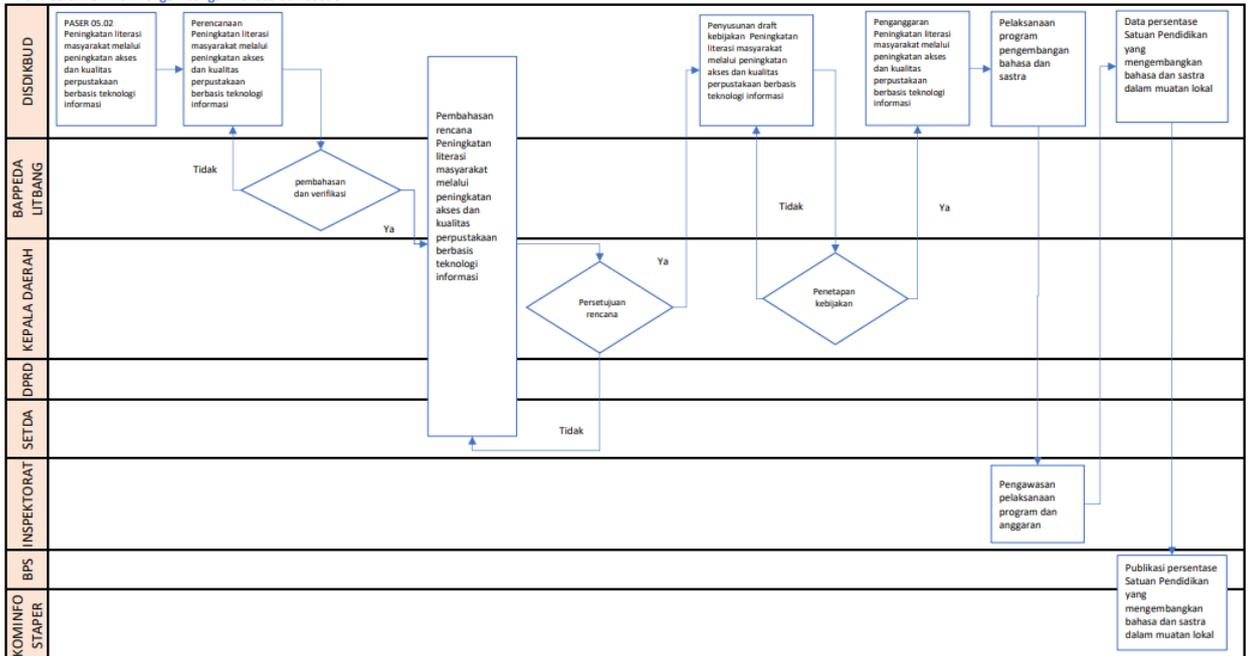
PASER 05.01. CFM 03 Pengendalian Perizinan Pendidikan



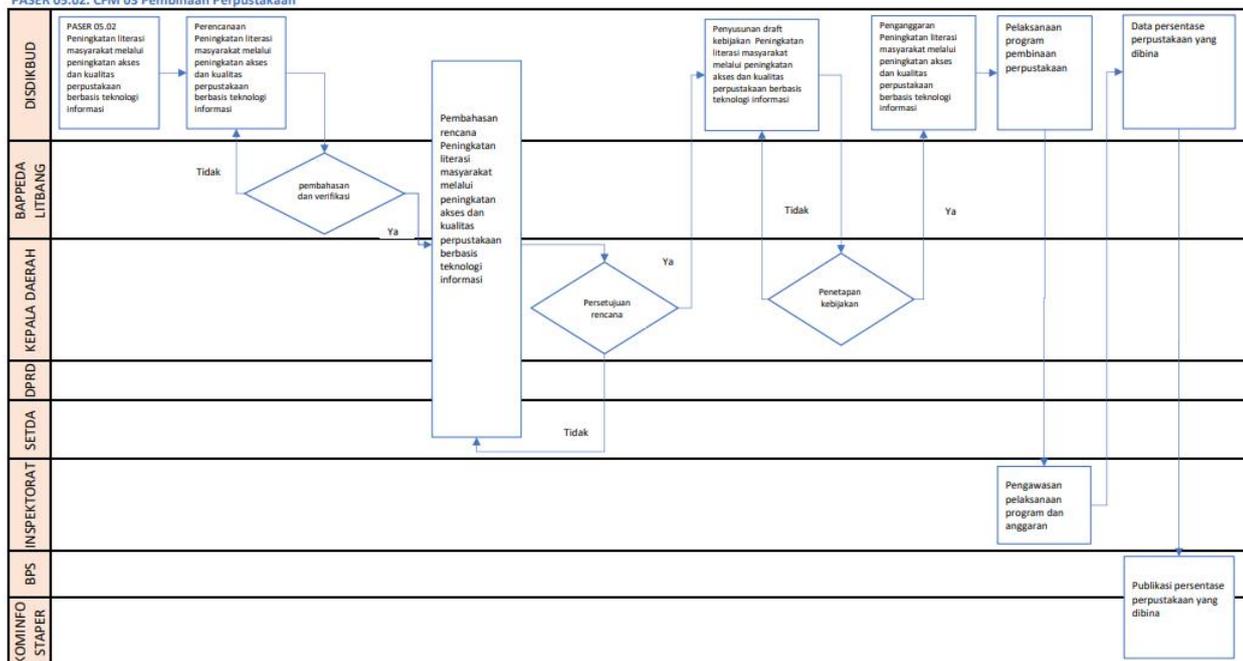
PASER 05.02. CFM 01 Pengembangan Kurikulum



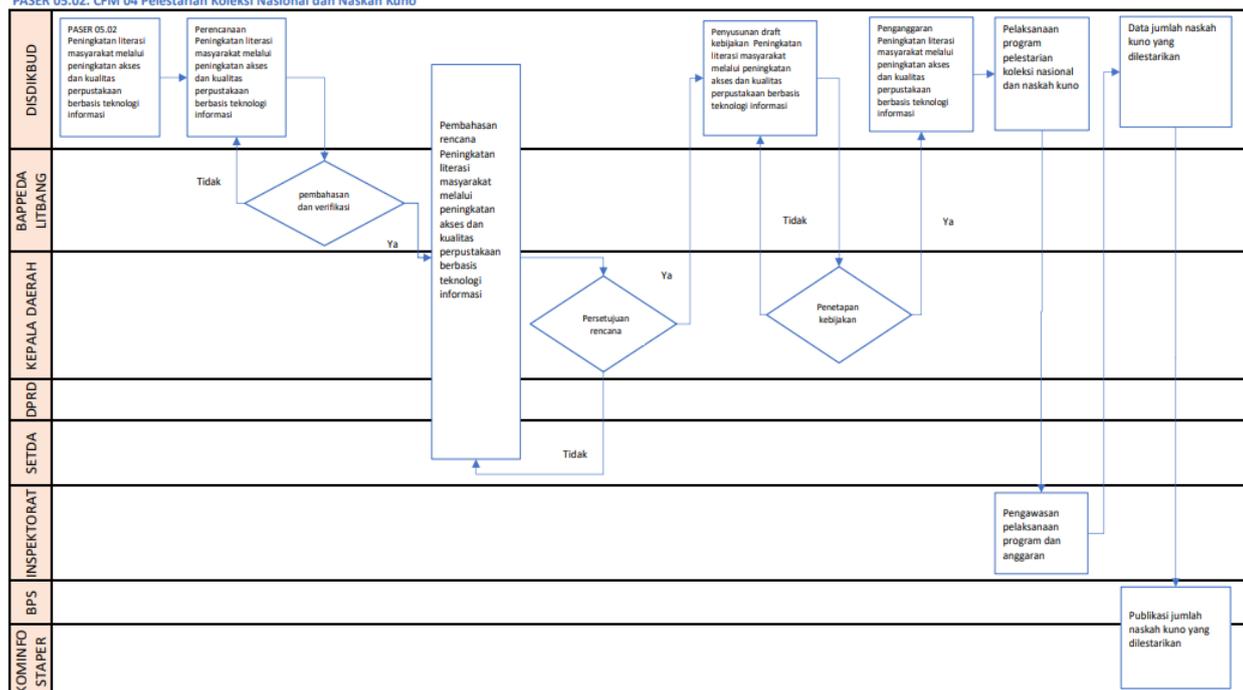
PASER 05.02. CFM 02 Pengembangan Bahasa dan Sastra



PASER 05.02. CFM 03 Pembinaan Perpustakaan



PASER 05.02. CFM 04 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPemekab. Paser

9. Sasaran Strategis 9 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup dengan capaian 100,12 % seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9**

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Umur Harapan Hidup	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser/ Jumlah penduduk x 100%	72,9	72,99	100,12	Sangat tinggi

Pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 Indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”. Kabupaten Paser menetapkan target Usia Harapan Hidup pada angka 72,9 Tahun 2023.

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi *mortalitas* yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan tolok ukur semakin meningkatnya angka harapan hidup tidak bisa hanya diselesaikan secara sektoral/ tidak hanya melibatkan OPD yang menangani masalah kesehatan saja, Upaya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, memerlukan kontribusi dari urusan/PD yang berurusan dalam tugas dan fungsi seperti pemberdayaan perempuan dan anak, keluarga berencana, pendidikan, selain itu perlu juga dukungan dari urusan yang berkaitan dengan jalan, air bersih dan perhubungan dalam upaya memudahkan aksesibilitas pelayanan ke daerah yang terpencil dan memiliki kesulitan geografis, serta terciptanya lingkungan yang sehat dan kemudahan akses dalam hal air bersih dan sehat.

- Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebesar 366 dalam 100.000 kelahiran atau sebanyak 20 orang meninggal dunia, akan tetapi jika dibandingkan dengan

jumlah kematian ibu tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kematian ibu yaitu sebesar 98,2 dalam 100.000 kelahiran hidup atau 5 orang ibu yang meninggal dunia.

- Angka kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 13,2 per 1000 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 11 per 1000 kelahiran hidup. Terjadi Peningkatan 2,2 kejadian.

Jumlah kematian ibu dan bayi tentu akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup.

Realisasinya pada tahun 2023 berdasarkan data dari BPS sebesar 72,99 atau capaian kinerja sebesar 100,12% (sangat tinggi) dengan Target kinerja tercapai.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Paser memperlihatkan trend meningkat dari tahun 2022 sampai 2023, namun pencapaian sampai tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 74,61 tahun akan tetapi melebihi angka harapan hidup nasional pada angka 71,57. Dibandingkan dengan tahun 2022, AHH Kabupaten Paser tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu 72,89 atau meningkat sebesar 0,1 %.

Penghambat/Kendala:

- belum optimalnya pemeriksaan ibu hamil,.
- terjadi kendala pada proses rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan klinik) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) yakni terjadinya keterlambatan atau terlambat merujuk.
- bayi berat lahir rendah dan prematuritas, asfiksia (kegagalan bernafas spontan) dan infeksi.

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

- Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Upaya peningkatan pelayanan dengan percepatan puskesmas menjadi BLUD dan peningkatan Akreditasi Puskesmas.
- Meningkatkan sapsras dan kompetensi petugas khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan bumil dan anak.
- Memperkuat promosi perilaku hidup bersih dan sehat dan upaya terwujudnya lingkungan sehat. Perilaku memiliki pengaruh yang besar terhadap derajat kesehatan. Promosi kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan

sehat (PHBS) di masyarakat masih juga harus menjadi focus program kegiatan dan rencana aksi dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi pelayanan akan berkontribusi pada kecepatan dan kemudahan pelayanan sehingga keterlambatan dalam pelayanan bisa diantisipasi dan diminimalisasi, maka dengan sendirinya akan berkorelasi pada penyelamatan dan keselamatan pasien.
- Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas lintas urusan/lintas perangkat daerah.
- peran dan partisipasi masyarakat, swasta maupun organisasi sosial ke masyarakatan
- Peran swasta dalam bentuk filantropi, charity melalui program tanggung jawab sosial.

Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** seperti pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.11
Proses Bisnis Sasaran Strategis 9

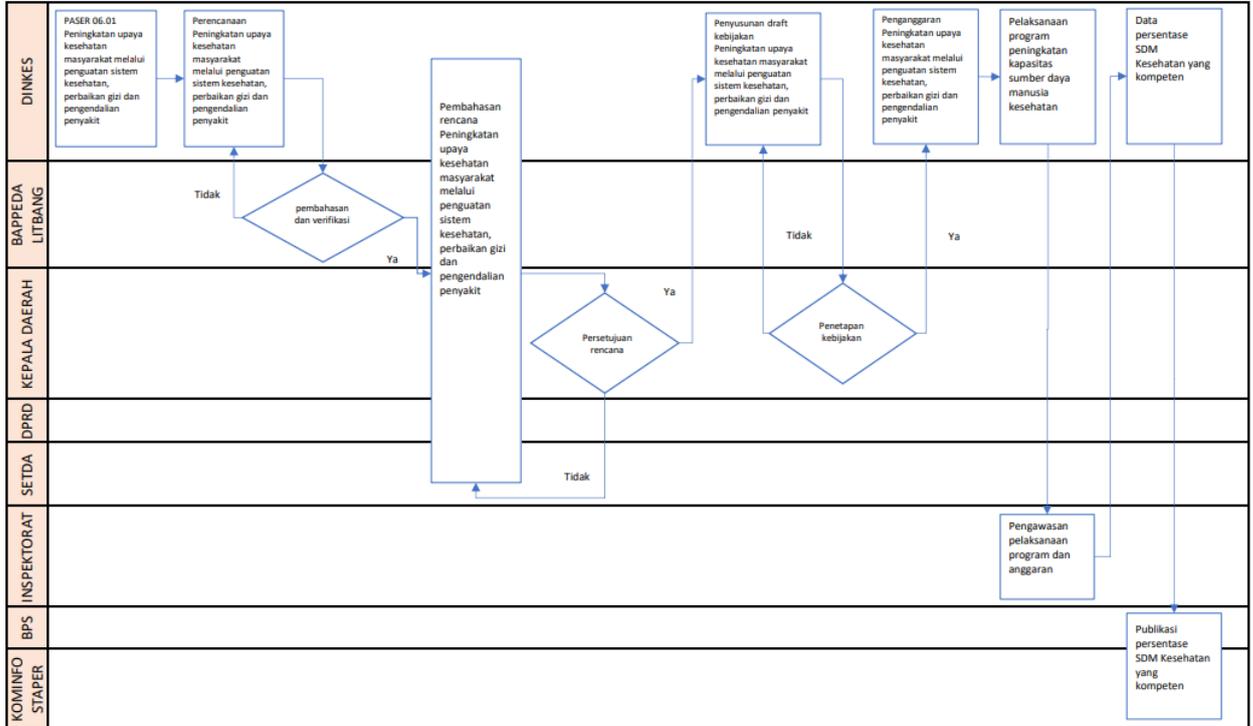


Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembab. Paser

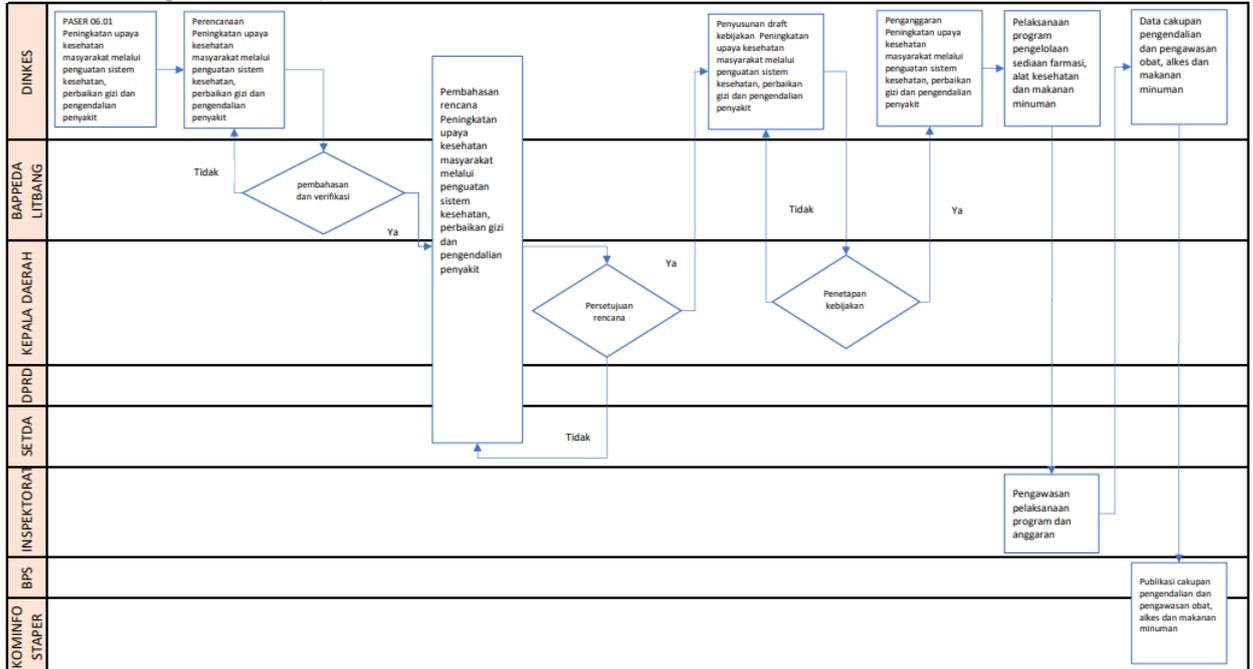
Gambar 3.12 Peta Lintas Fungsi Sasaran 9

PETA LINTAS FUNGSI SAARAN KINERJA : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

PASER 06.01. CFM 01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

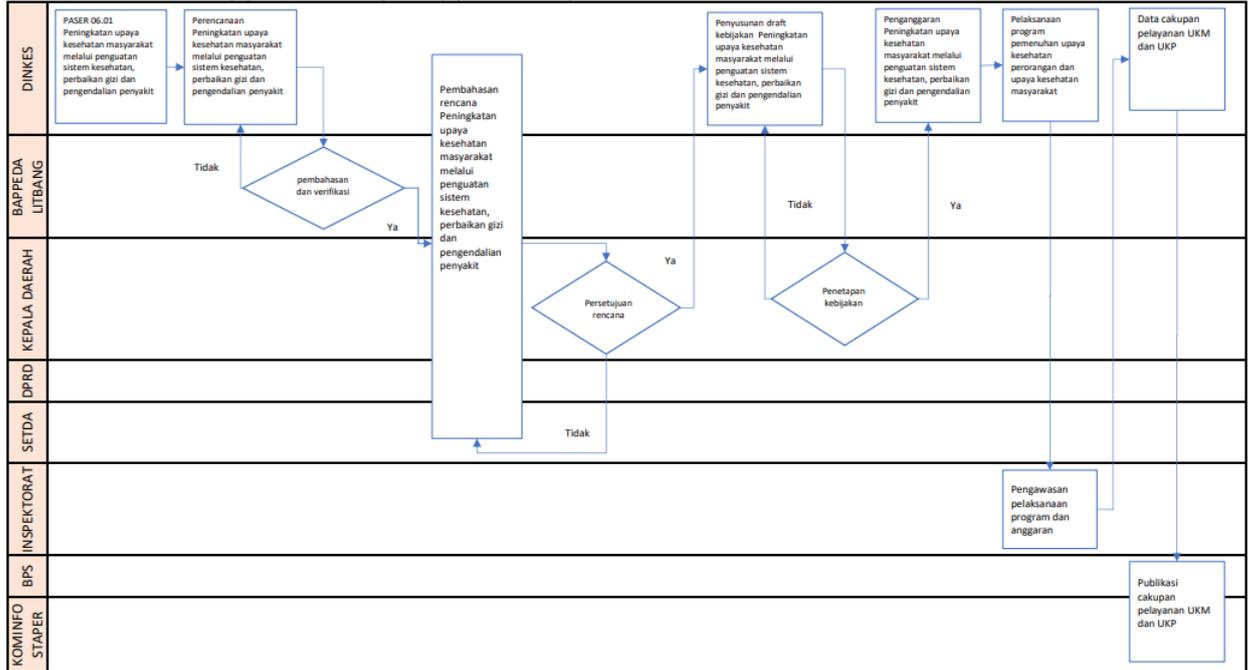


PASER 06.01. CFM 02 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

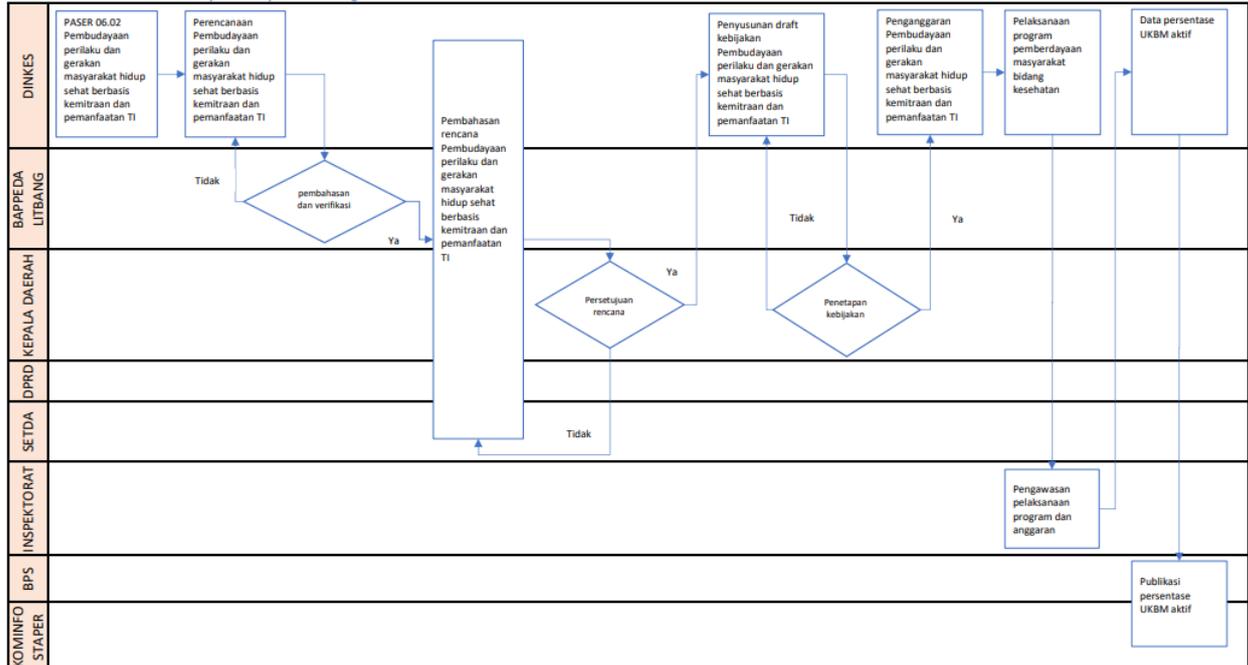


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

PASER 06.01. CFM 03 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



PASER 06.02. CFM 01 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

10. Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ketercapaian Sasaran

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dengan rata-rata capaian sebesar 96,95% , seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10**

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
1. Angka kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), $y_i < z$ q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk</p>	9	9,11	98,78	Sangat Tinggi
2. Tingkat Pengangguran terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	4,5	4,72	95,11	Sangat Tinggi
Rata-rata				96,95	Sangat Tinggi

a. Angka Kemiskinan

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu indikator makro yang dijadikan tolok ukur terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan Kabupaten Paser dalam angka, yang di terbitkan Kantor Statistik Kabupaten Paser Persentase Penduduk Miskin (angka Kemiskinan) Kab paser Tahun 2023 sebesar 9,11 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 9,43 %, dalam artian kabupaten Paser berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Namun demikian jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2023 ,maka realisasinya belum menyamai atau masih diatas target.

Berdasarkan realisasi dibandingkan target maka capaian kinerja angka kemiskinan dengan Predikat Tinggi.

Faktor Penghambat :

- Letak geografis, Kabupaten Paser di beberapa daerah desa pedalaman yang jauh dari pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau, sehingga penanggulangan kemiskinan kurang maksimal.
- Adanya perubahan kebijakan nomenklatur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Permensos Nomor 5 Tahun 2019) tentang pengelolaan DTKS, yang diperluas bukan hanya mencakup data miskin dan orang tidak mampu yang tinggal di rumah tangga saja, tetapi juga meliputi Data Kesejahteraan Sosial lainnya, seperti data penerima bansos, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sehingga jumlahnya menjadi bertambah besar dan tidak bisa dijadikan patokan jumlah penduduk miskin di suatu daerah;
- Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
- Kemiskinan kultural yang muncul pada sebagian Masyarakat Salah satu yang ikut menentukan tingkat kemiskinan adalah struktur atau pondasi perekonomian Kabupaten Paser sangat bertumpu pada sektor pertambangan batu bara. Sehingga pencari kerja cukup banyak yang menyandarkan mata pencahariannya pada sektor ini. Jika harga batu bara anjok dan menyebabkan pengurangan pekerja secara besar besaran, dengan kehilangan mata pencaharian tentu berkorelasi menurunnya daya beli maka sektor riil akan terganggu khusus usaha mikro kecil yang berisiko menutup usahanya karena sepi pembeli.

Faktor Pendukung :

- Telah dibentuknya Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan program kegiatan secara kontinyu terkait dengan jaring/sistem perlindungan social.
- Adanya penanganan kemiskinan ekstrim sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat .

- Pemamfaatan digitalisasi dalam updating data kemiskinan secara berkala melalui aplikasi SIK-NG.
- Adanya pengendalian inflasi daerah berjalan cukup baik sehingga stabilitas harga dan kemampuan daya masyarakat tetap terjaga.
- Telah tersedianya roadmap RB general tematik serta rencana aksi dimana terdapat penanganan kemiskinan didalamnya.

Solusi/langkah-langkah perbaikan :

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui pemberdayaan ekonomi kreatif, penyaluran program keluarga harapan secara cepat dan tepat sasaran, program bantuan pangan non tunai, *up date* data terpadu kesejahteraan sosial. Selain itu juga pemerintah kabupaten Paser sesuai arahan Pemerintah pusat yaitu melakukan pengendalian inflasi, tindak lanjut afirmasi bangga buatan indonesia dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal lain yang juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Paser untuk menurunkan angka kemiskinan yakni pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha micro kecil serta mendorong peran swasta melalui tanggung jawab sosialnya.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja).

Sebagai mana indikator angka kemiskinan, Indikator Tingkat pengangguran terbuka juga merupakan indikator inversi atau progresif negatif dalam artian jika capaiannya rendah maka kinerja baik atau meningkat, dan sebaliknya jika capaiannya tinggi maka, kinerjanya buruk atau menurun.

Target TPT ini merupakan pernyataan dimana semakin besar realisasi menunjukkan rendahnya kinerja. Realisasi TPT tahun 2023 sebesar 4,72% adalah di bawah target Kabupaten sebesar 4,5% dengan selisih 0,22% , namun kinerja ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022 sebesar 4,88%. Realisasi TPT Kabupaten Paser di atas realisasi TPT Provinsi Kalimantan Timur yaitu 5,31% serta diatas Realisasi TPT Nasional yang 5,32%.

Faktor Penghambat:

1. Adanya kesenjangan atau mismatch antara kompetensi teknis yang diperoleh dari lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang sehingga banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada.
2. Belum maksimalnya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan softskill pencari kerja, sehingga kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan.
3. Kurangnya informasi job fair, Pencari kerja tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja.

Faktor Pendorong:

1. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Paser tahun 2023 telah pulih dibandingkan sebelum pandemi. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Paser tahun 2023 sebesar 4,72% , turun 0,16 persen poin dibandingkan tahun 2022.
2. Jumlah Angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan kerja nasional (Sakernas) di tahun 2023 sebanyak 128.571 orang . naik 1.365 Orang dibanding tahun 2022 yang hanya 127.206 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2023 sebesar 62,95 naik sebesar 1,25 persendibanfingan tahun 2022 sebesar 61,70

Solusi / Langkah Perbaikan :

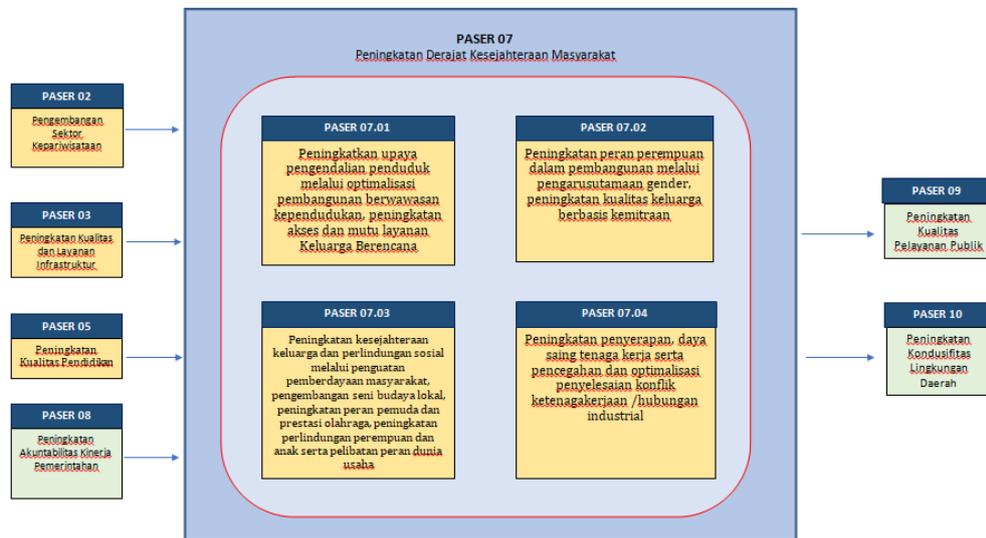
1. Meningkatkan koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang serta lintas sektor baik pemerintah dan dunia usaha, Karena untuk menekan Angka Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Paser perlu, perhatian dan penyelesaian bersama dari beberapa unsur yang terlibat seperti dunia Pendidikan, instansi yang terlibat dengan pengembangan usaha kreatif serta

sektor pekerja informal , pertanian, perikanan, para pelaku usaha dan stakeholder terkait.

2. Memfasilitasi masyarakat agar dapat berwirausaha karena selain mendapatkan pekerjaan yang tidak bergantung pada kesepakatan upah minimum sehingga dapat menekan risiko untuk menganggur, wirausahawan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, sarana/prasarana penunjang juga perlu dibangun, karena hal tersebut dapat meningkatkan peluang investor untuk berinvestasi.
3. Pelatihan keahlian atau skill tambahan juga diperlukan agar para angkatan kerja lebih dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu mendorong investasi menyediakan lapangan pekerjaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman dan teknologi serta mengikuti era revolusi industri 4.0.

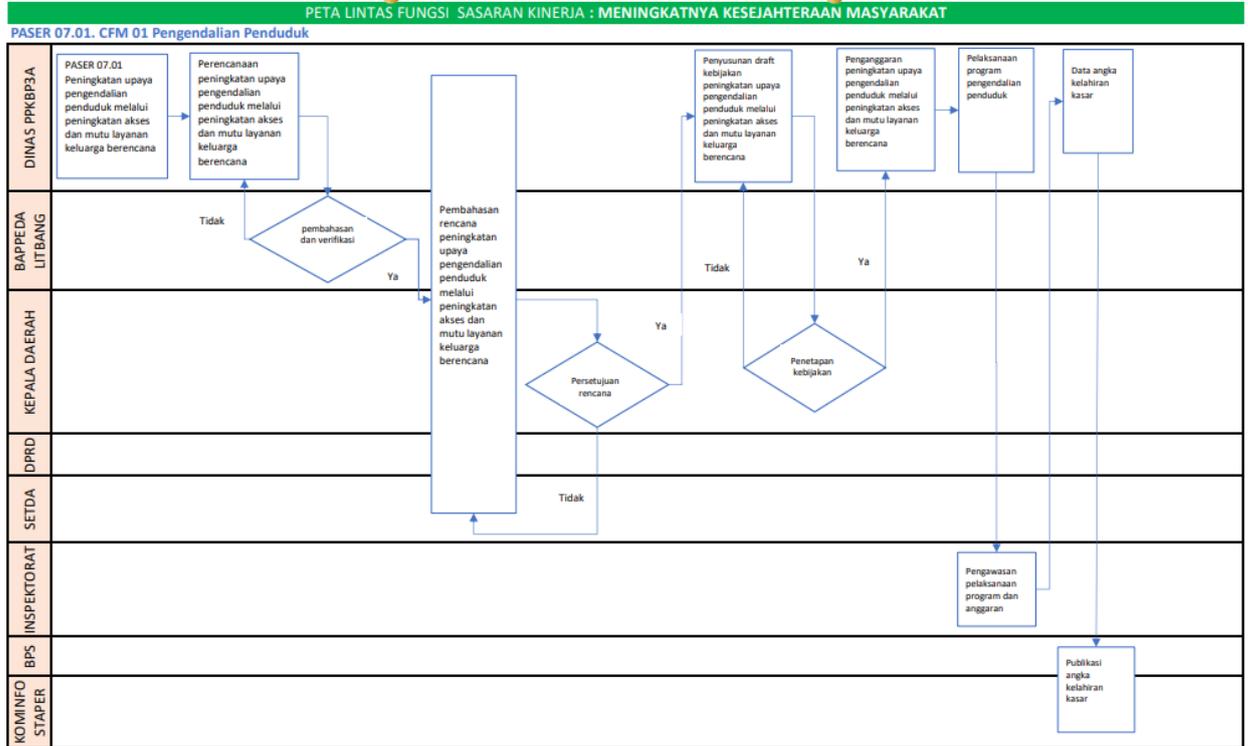
Dalam framework peta proses bisnis dan peta lintas fungsi **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.13
Proses Bisnis Sasaran 10

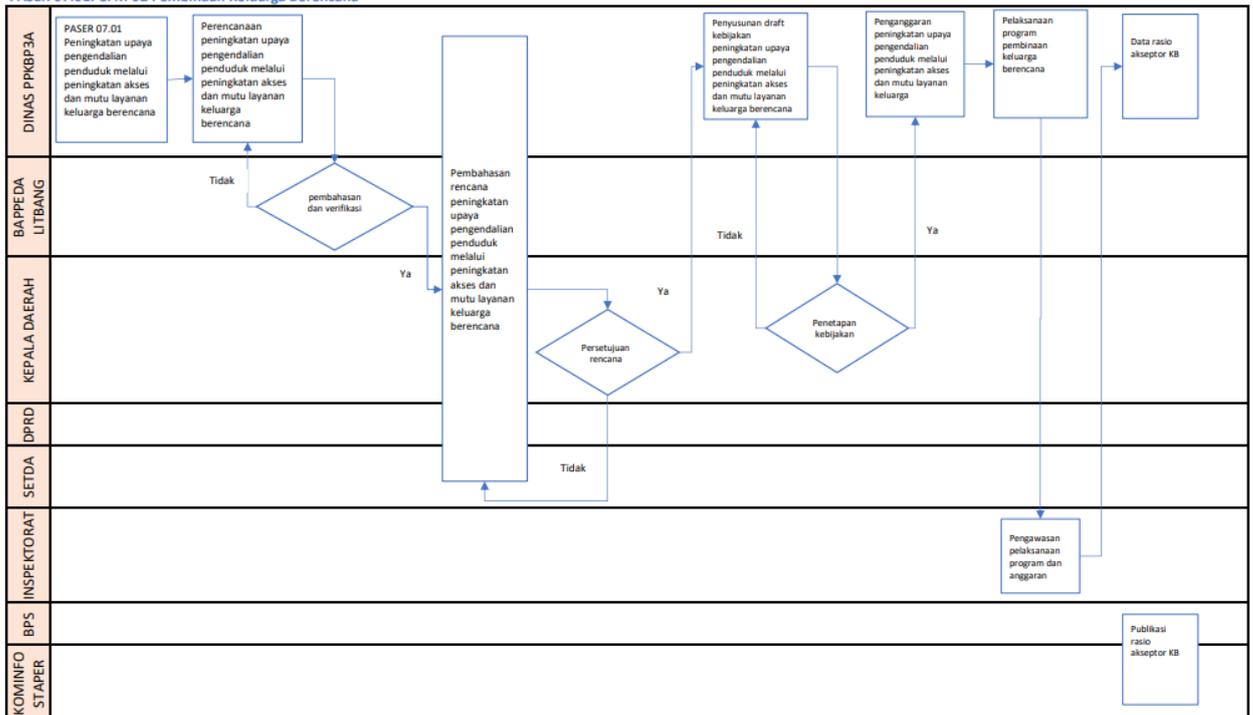


Sumber : keputusan Bupati Paser No: 060/KEP-682/2022 tentang Peta ProbisPembkab. Paser

Gambar 3.14
Peta Lintas Fungsi Sasaran 10

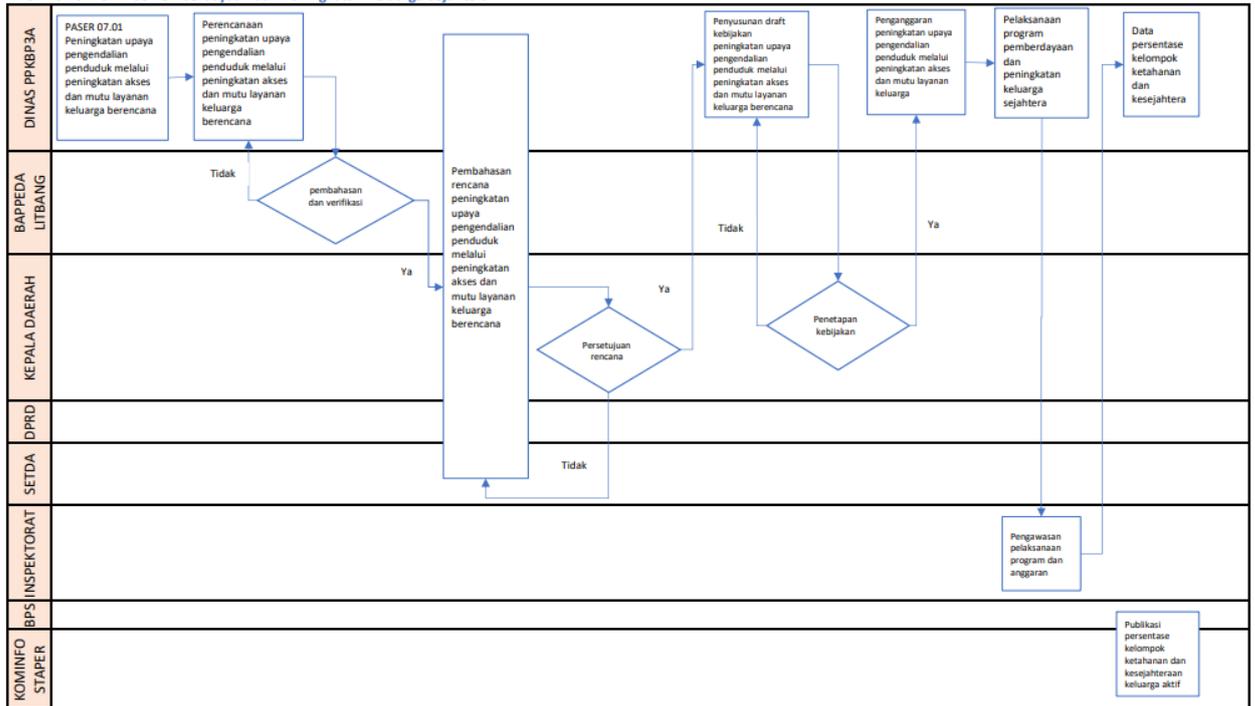


PASER 07.01. CFM 02 Pembinaan Keluarga Berencana

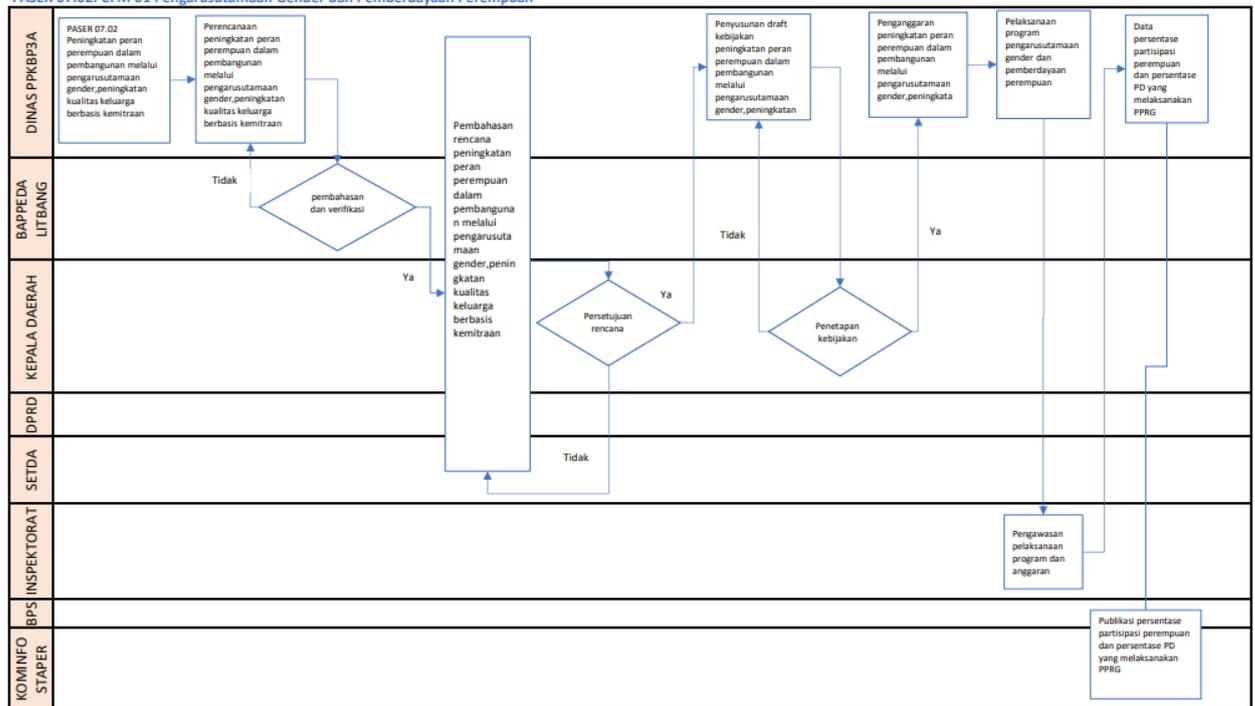


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

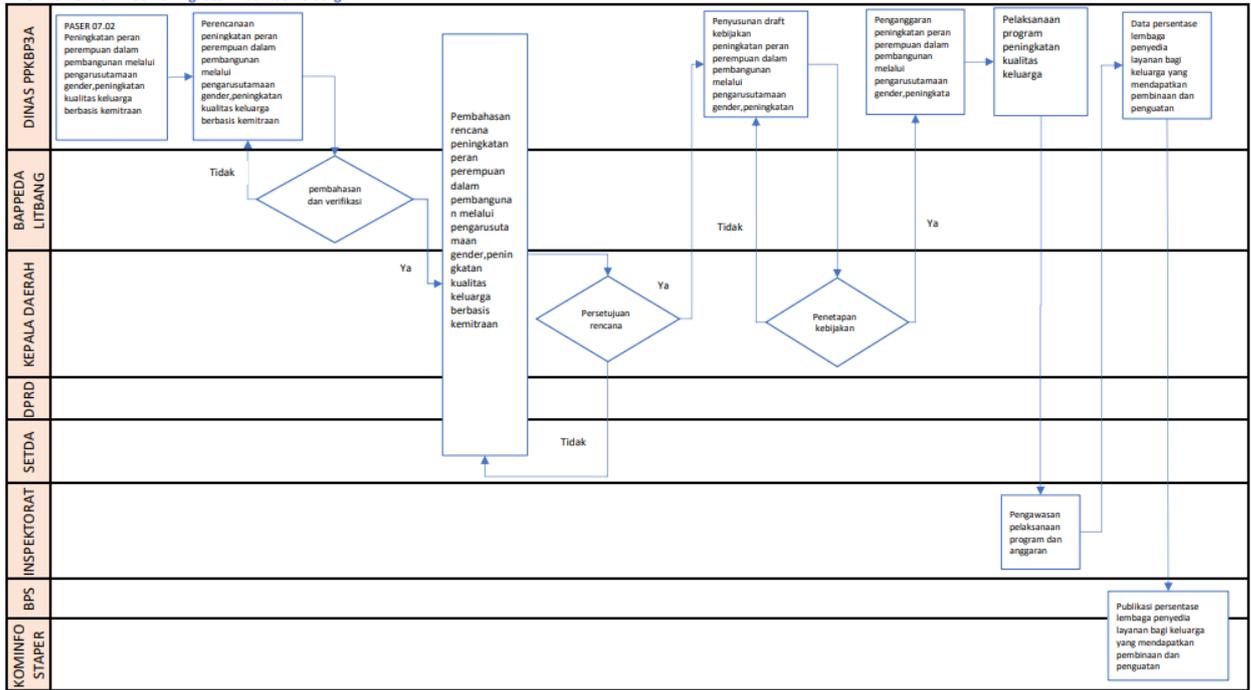
PASER 07.01. CFM 03 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera



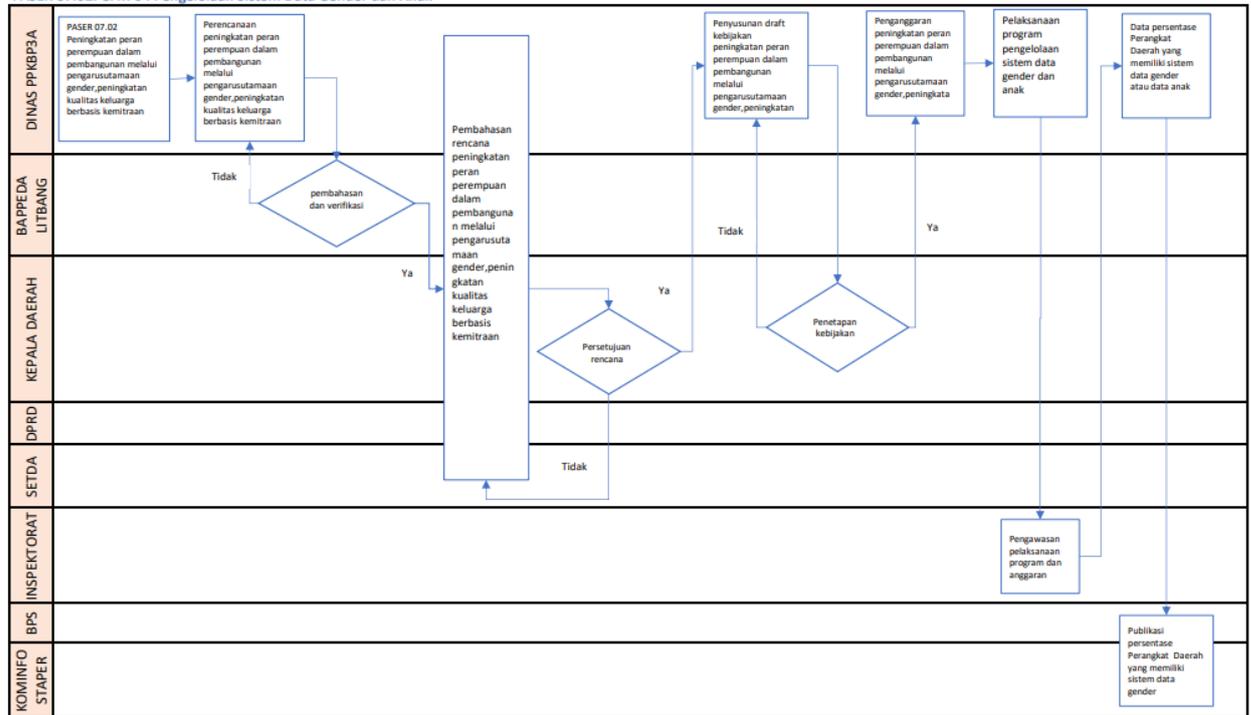
PASER 07.02. CFM 01 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



PASER 07.02. CFM 03 Peningkatan Kualitas Keluarga

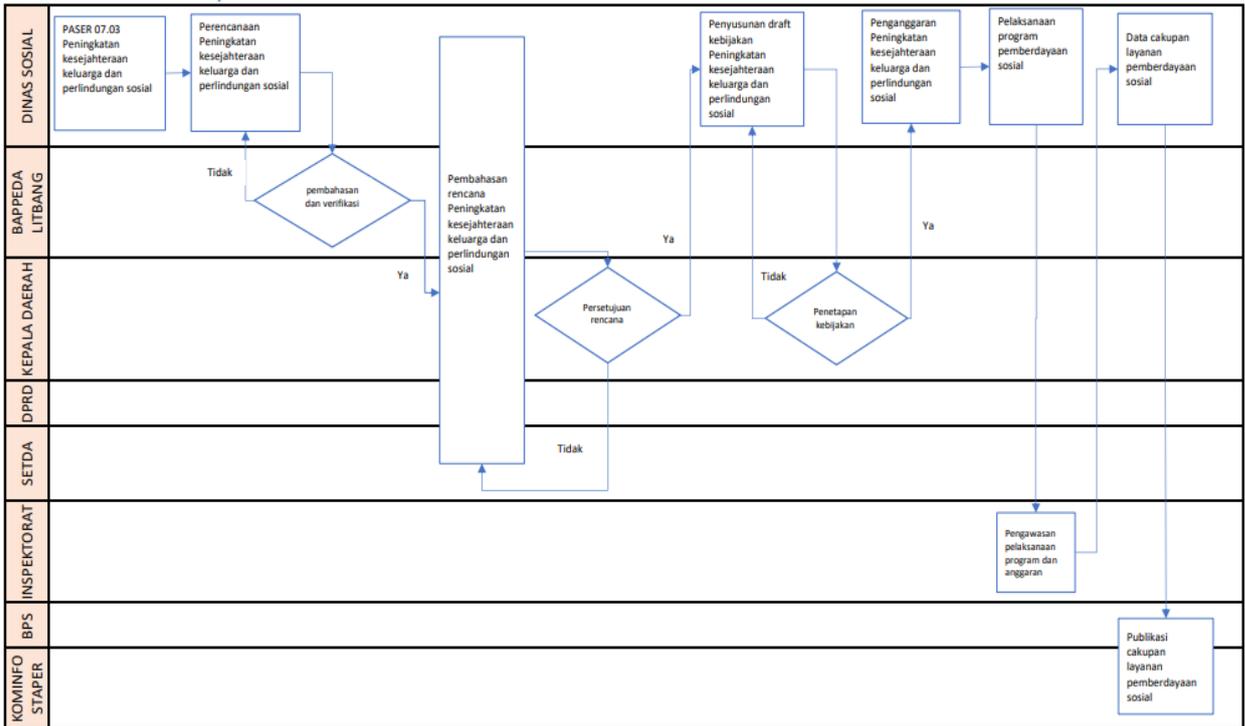


PASER 07.02. CFM 04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

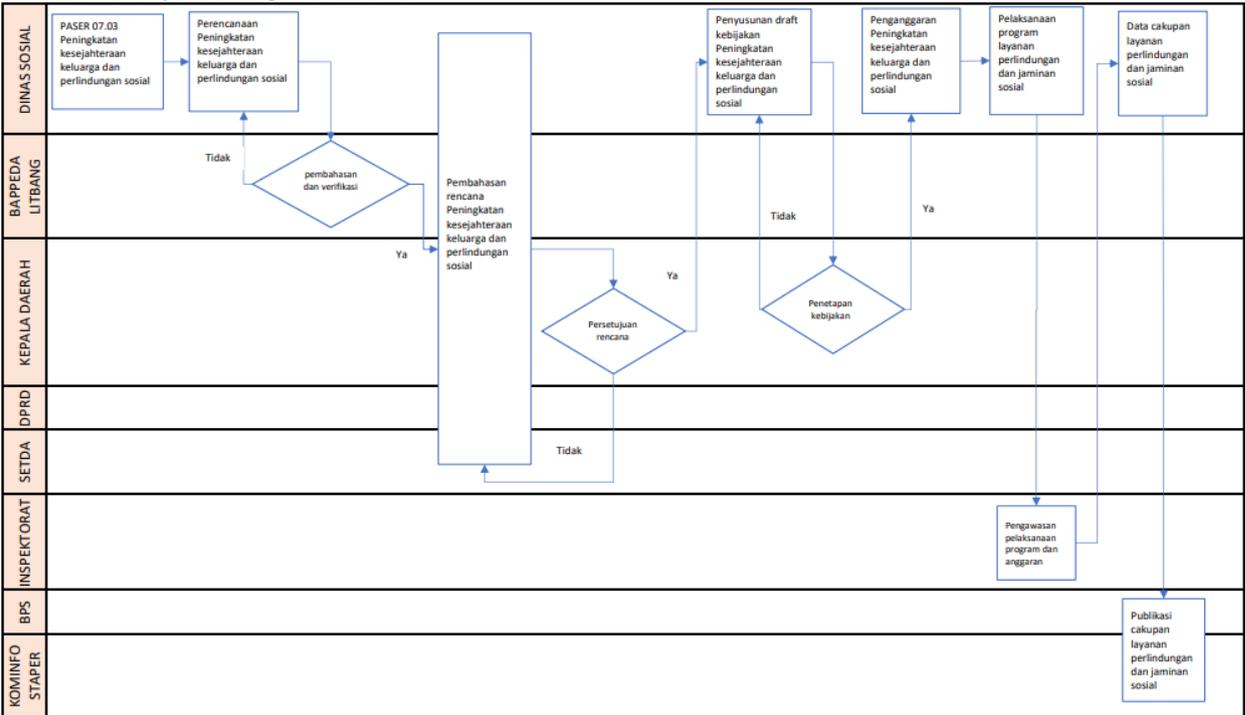


LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

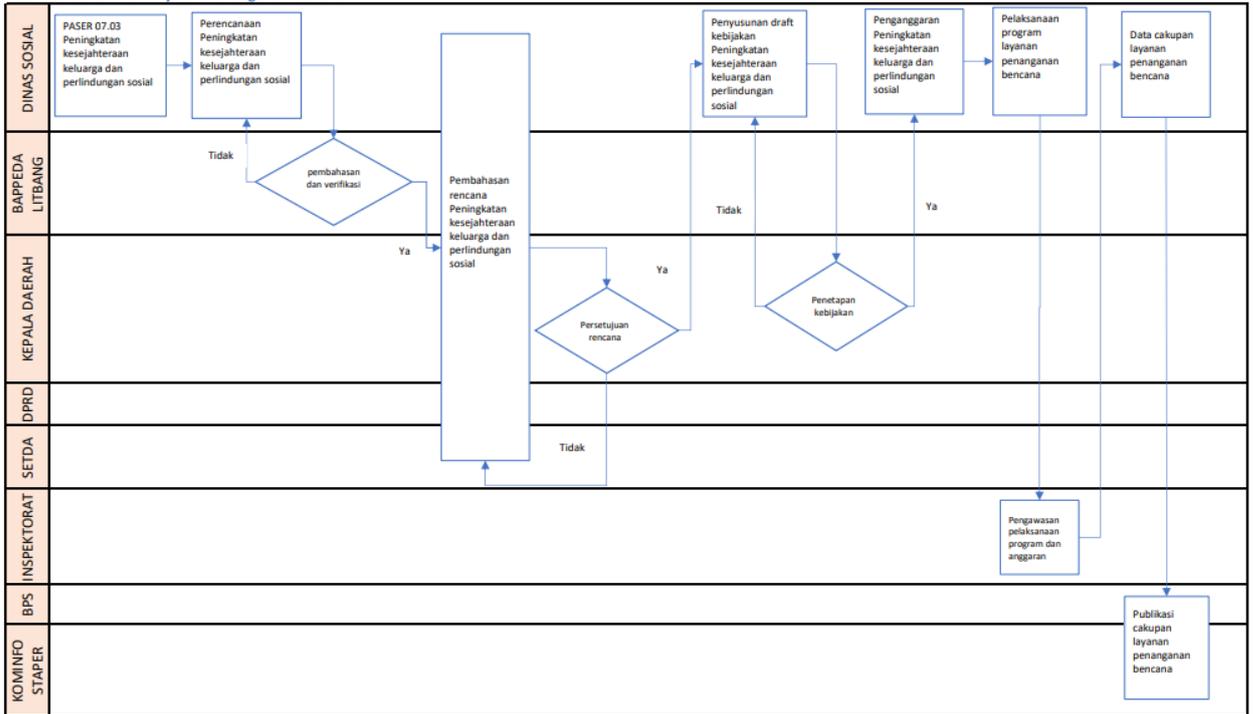
PASER 07.03. CFM 01 Pemberdayaan Sosial



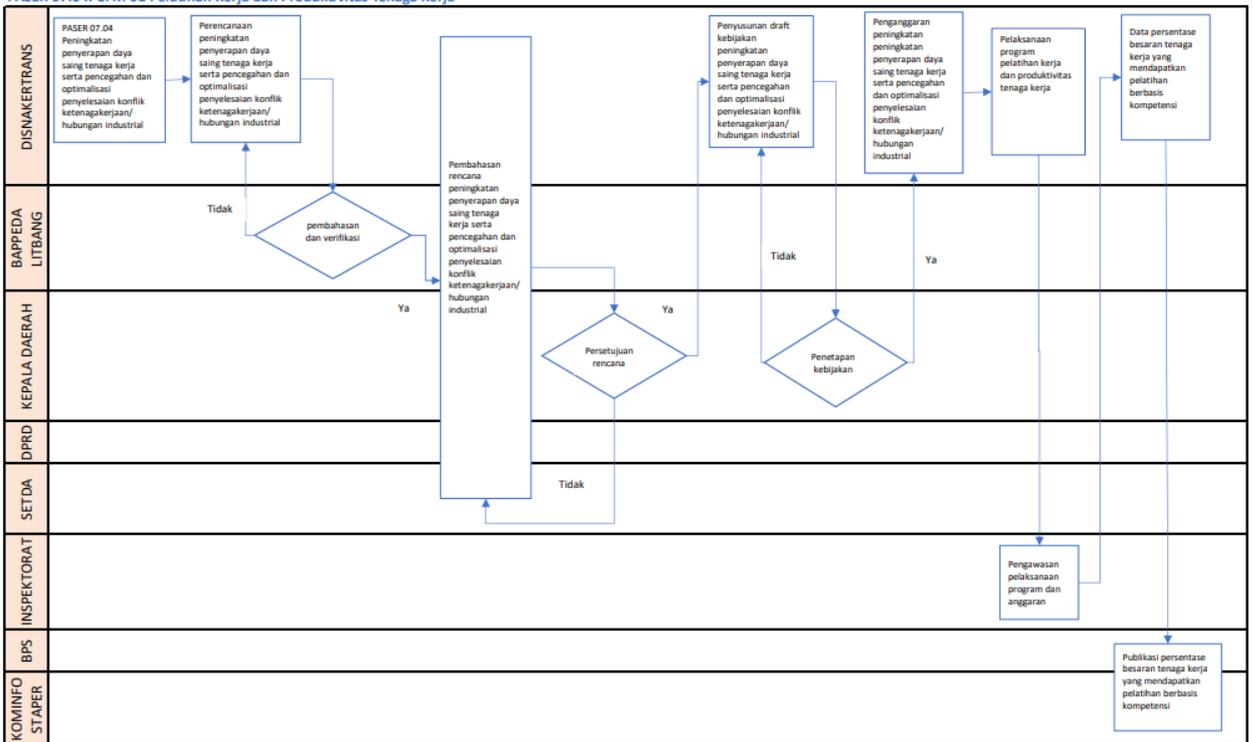
PASER 07.03. CFM 03 Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial



PASER 07.03. CFM 04 Layanan Penanganan Bencana



PASER 07.04. CFM 01 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



Tabel 3.19

Perbandingan capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya Efek Berganda (<i>Multiplier Effect</i>) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,87	4,90	4,73	4,73	3,52	96,53	74,42
Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	-2,28	3	5,35	5,35	14,77	178,33	276,07
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	58,41	61	60,01	58,40	60,16	95,74	100,25
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	70	81	80,50	82,649	115	102
Rata-rata capaian							105,37	101,13
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	78,61	80	83,50	83,38	83,6	104,23	100,1
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	53	52	75	107	23	-7	169,33
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA	4	7	7	7	175	100
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,68	52,73	59,18	60	64,02	113,79	108,18
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	71,43	74,56	72,30	72,57	101,22	97,33

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	196	195,5	195	121,3	191,78	137,95	101,65
Rata-rata capaian							101,65	102,39
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	13,25	13,30	13,27	13,37	100,15	100,53
	Rata-rata Lama Sekolah	8,55	8,60	8,90	8,80	8,91	102,33	100,11
Rata-rata capaian							101,24	100,32
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,62	72,80	72,90	72,88	72,99	100,11	100,12
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,23	8,00	9	9,43	9,11	82,13	98,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	3,45	4,5	4,88	4,72	58,55	95,11
Rata-rata capaian							70,34	96,95

Berdasarkan tabel di atas, ada 6 Indikator kinerja Sasaran strategis yang capaian kerjanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, sedangkan indikator sasaran strategis yang capaian kerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada 9 Indikator kinerja sasaran.

Capaian indikator kinerja tertinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah indikator kinerja Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yaitu sebesar 276,07%. Sedangkan capaian kinerja terendah adalah indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan capaian kinerja 100%, karena jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 175%.

3.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD 2021-2026

Selain pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target juga membandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal dimaksud untuk mengetahui

sejauh mana tingkat kemajuan capaian tahun 2023 dengan target akhir rpjmd 2021-2026 sebagai bahan evaluasi agar pencapaian kinerja ditahun periode akhir RPJMD sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir RPJMD Sebagaimana tael berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Meningkatnya Efek Berganda (<i>Multiplier Effect Sektor Pertanian</i>)	Pertumbuhan Sektor Ekonomi lokal/Non Tambang	4,73	3,52	74,42	5,95	59,16
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor (<i>Penyediaan Akomodasi dan makan minum</i>)	5,35	14,77	276,07	2,83	189,05
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	60,01 (B)	60,16 (B)	100,25	81 (A)	74,09
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81	82,694	102	102	79,41
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	83,50	83,6	100,1	84	99,40
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	75	23	169,33	48	156,25
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	7	100	8	87,50

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	59,18	64,02	108,18	78,91	75,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,56	72,57	97,33	71,63	104,09
		Indeks Resiko Bencana	195	191,78	101,65	193,5	100,78
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	13,30	13,37	100,53	13,50	98,52
		Rata-rata lama sekolah	8,90	8,91	100,11	9,00	98,89
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	72,90	72,99	100,12	73,30	99,45
10	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9	9,11	98,78	5,80	155,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	4,72	95,11	3,10	145,16

3.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Sebagai profil kinerja Pemerintah Kabupaten Paser, maka perlu dibandingkan / *benchmark* kinerja dengan Provinsi Kalimantan Timur, Nasional maupun Internasional. Adapun capaian kinerja indikator kinerja utama tidak semua bisa dibandingkan dengan target Nasional, Provinsi maupun internasional, mengingat IKU jika dibandingkan dengan capaian Internasional hanya sebanyak 2 indikator, nasional sebanyak 7

indicator, sedangkan provinsi sebanyak 7 indikator kinerja utama, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Kab. Paser Tahun 2023
dengan capaian Provinsi, Nasional dan Internasional

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KABUPATEN PASER	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
Pertumbuhan Ekonomi	1,38	6,22	5,04	2,6
Indeks Reformasi Birokrasi	62,56	0,322	0,388	n/a
Indeks Gini	0,292	6,11	9,36	n/a
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44	5,31	5,32	5,3

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kab. Paser Tahun 2023
dengan capaian Provinsi, Nasional dan Internasional

INDIKATOR KINERJA SASARAN	KABUPATEN PASER	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	3,52	n/a	n/a	n/a
Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	14,77	n/a	n/a	n/a
Nilai SAKIP	60,16	78,01	n/a	n/a
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,694	75,599	n/a	n/a
Nilai IKM Daerah	83,6	n/a	n/a	n/a
Angka Kriminalitas	23	n/a	n/a	n/a
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	n/a	n/a	n/a
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	64,02	n/a	n/a	n/a

INDIKATOR KINERJA SASARAN	KABUPATEN PASER	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,57	n/a	n/a	n/a
Indeks Risiko Bencana (IRB)	191,78	n/a	n/a	n/a
Angka Harapan Lama Sekolah	13,37	14,02	13,15	n/a
Rata-rata Lama Sekolah	8,91	9,99	8,77	n/a
Umur Harapan Hidup	72,99	74,61	73,6	n/a
Angka Kemiskinan	9,11	6,11	9,36	n/a
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,72	5,31	5,32	n/a

1. Pertumbuhan Ekonomi

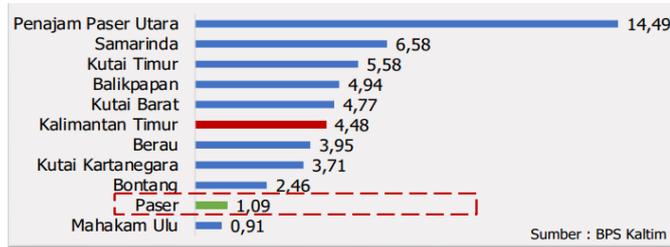
Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser sebesar 1,09 persen. Pertumbuhan ini melambat apabila dibandingkan tahun 2021, hal ini disebabkan pada tahun 2020 perekonomian sangat berdampak oleh adanya pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah mulai membaik dan tumbuh. Dimana, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai 4,48 persen dan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,09 persen di tahun 2022, sebagaimana pada table berikut :

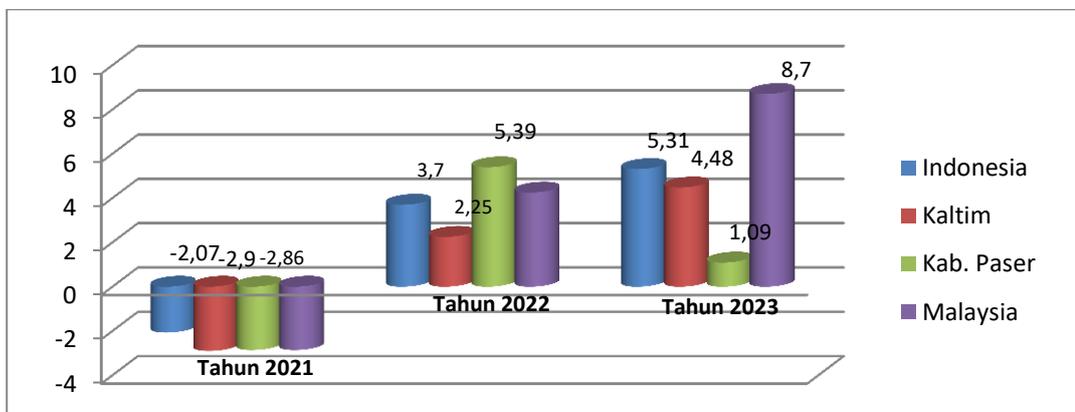
Tabel 3.15

Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Kalimantan Timur



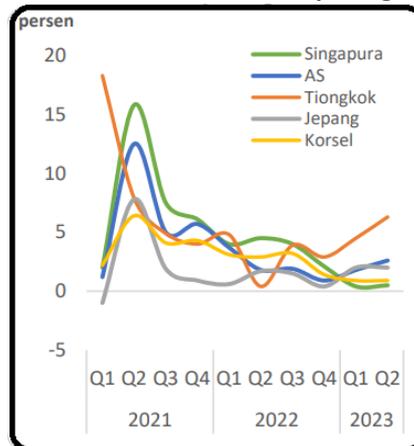
Gambar 3.16

Benchmark Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023



Gambar 3.17

Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara



Sumber: CEIC

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-

langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

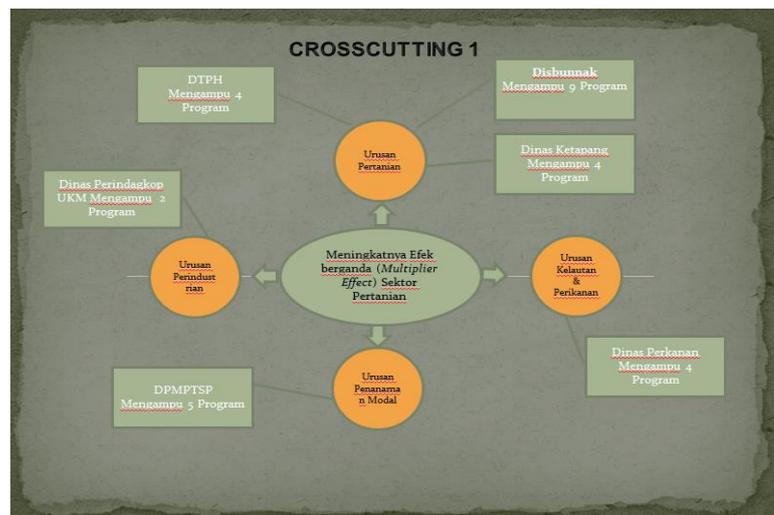
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Paser Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan nilai indeks 62,56 dengan predikat B.

3.6 ANALISIS CAPAIAN PROGRAM YANG MENDUKUNG TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Rendah, Sedang, Tinggi atau Sangat Tinggi** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya Efek berganda (*Multiplier Effect*) Sektor Pertanian dengan indicator

Pertumbuhan sektor ekonomi lokal /non tambang, dengan realisasi sebesar 3,52 dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,72, yaitu dengan capaian sebesar 74,22%. Pencapaian tersebut didukung melalui

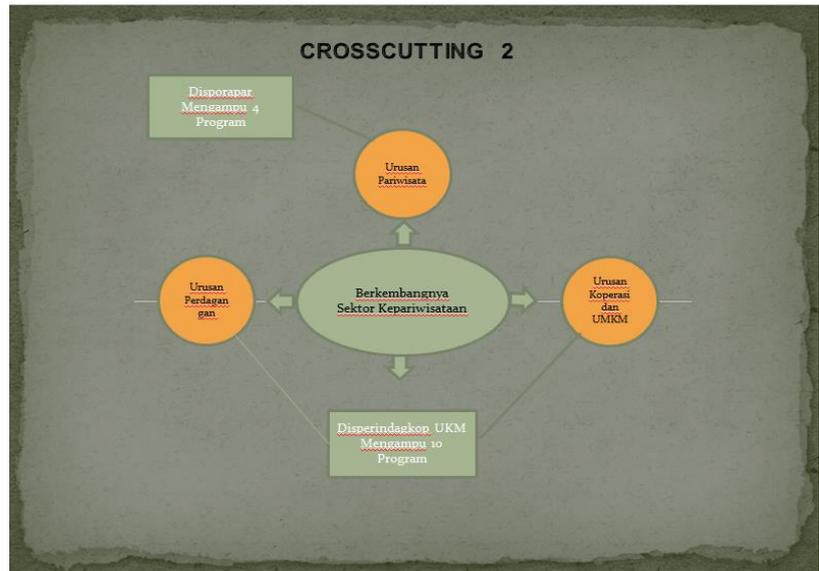


26 program dengan rata –rata capaian program sebesar 95,58%. Program dengan capaian tertinggi adalah Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota dengan capaian sebesar 99,53%, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program Penanganan kerawanan pangan dengan capaian 65,42%.

Sasaran strategis Meningkatnya Efek berganda (*Multiplier Effect*) Sektor Pertanian yang didukung 26 program bersifat *crosscutting* dengan 4 Urusan, yaitu urusan pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan perindustrian yang dibagi habis kedalam 9 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana table berikut :

2. Berkembangnya Sektor Kepariwisataan dengan indikator Pertumbuhan

Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum), dengan realisasi sebesar 14,77 dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 5,35, yaitu dengan capaian sebesar 276,07% (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 14 program dengan rata – rata capaian program sebesar 89,43 %.

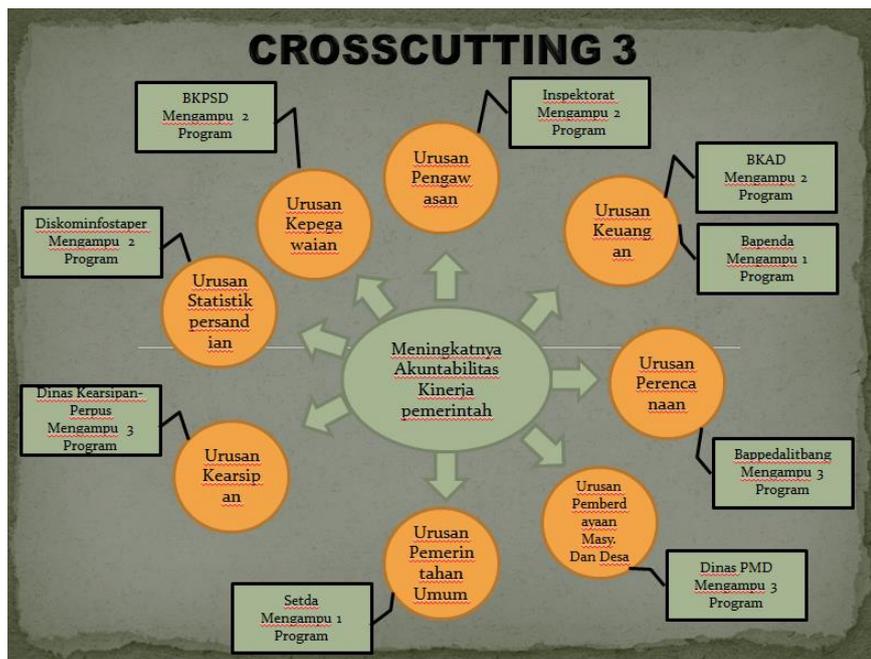


Program dengan capaian tertinggi adalah Program Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan capaian 99,73, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota dengan capaian 0%.

Sasaran strategis Berkembangnya Sektor Kepariwisataan yang didukung 14 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Pariwisata, Urusan Perdagangan dan urusan Koperasi dan UMKM yang dibagi habis kedalam 2 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana table berikut :

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dengan rata-rata capaian sebesar

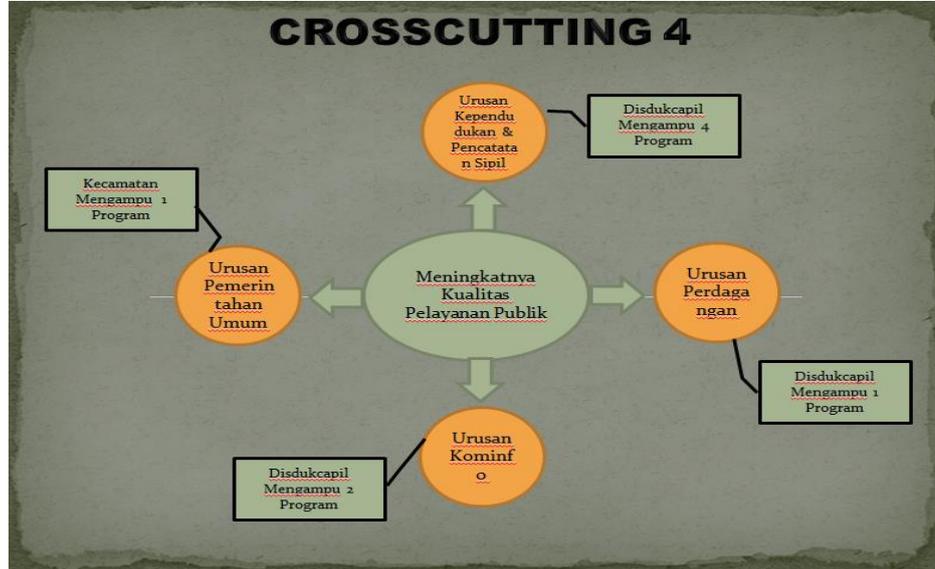
101,13 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 19 program dengan rata –rata capaian program sebesar 96,60 %.



dengan capaian tertinggi adalah Program Proram penunjang urusan pemerintahan daerah 99,36, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program peningkatan kerjasama desa dengan capaian 64,73%.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM Daerah,

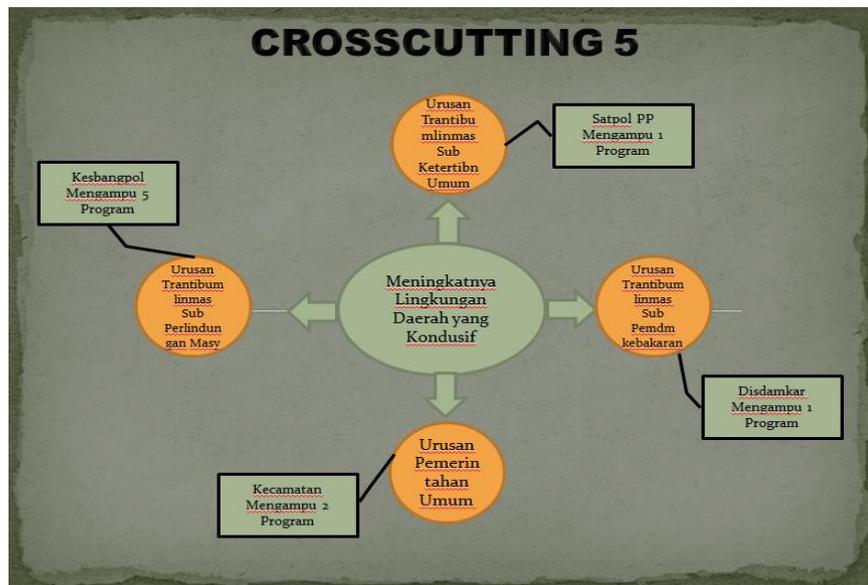
dengan realisasi 100,1 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 8 program dengan rata-rata capaian program sebesar



76,65 %. Program dengan capaian tertinggi adalah Program Proram penunjang urusan pemerintahan daerah 99,36, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program peningkatan kerjasama desa dengan capaian 64,73%. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung 8 program bersifat crosscutting dengan 4 Urusan, yaitu urusan Kependudukan dan pencatatan sipil, perdagangan, kominfo dan urusan pemerintahan umum. Dengan 4 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana table berikut:

5. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif dengan indikator Angka

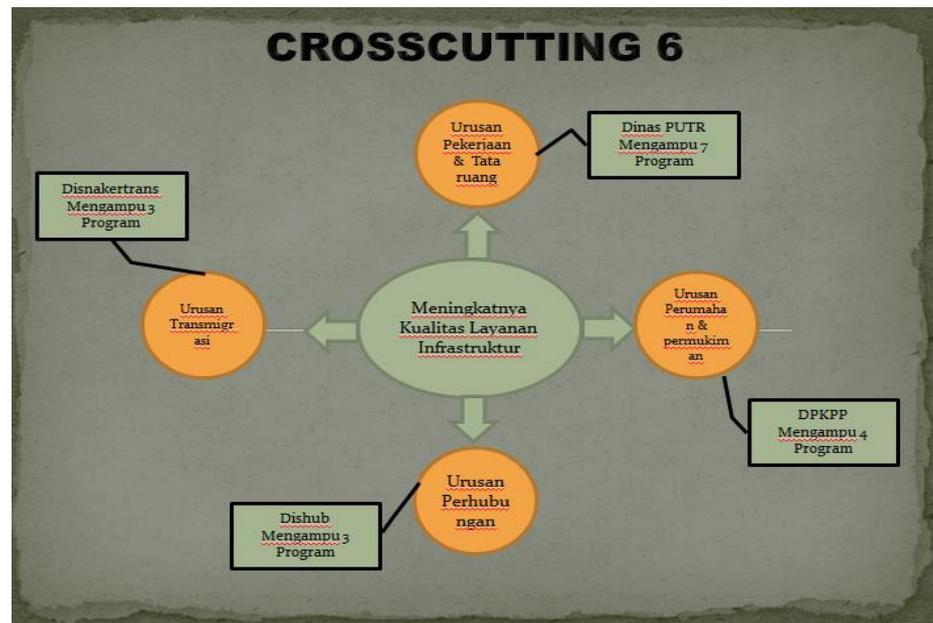
Kriminalitas, dengan realisasi sebesar 23 dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 75, sehingga memperoleh capaian sebesar 169,33 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 9 program



dengan rata –rata capaian program sebesar 95,10 %. Program dengan capaian tertinggi adalah Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 99,96%, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social dengan capaian 87,69 %. Sasaran strategis Lingkungan Daerah yang Kondusif yang didukung 9 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Trantibumlinmas dan Urusan Pemerintahan Umum dengan 4 Perangkat Daerah pegampu yaitu , Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan dan Disdamkar, sebagaimana table berikut:

6. Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infra struktur dengan indikator Indeks Kepuasan

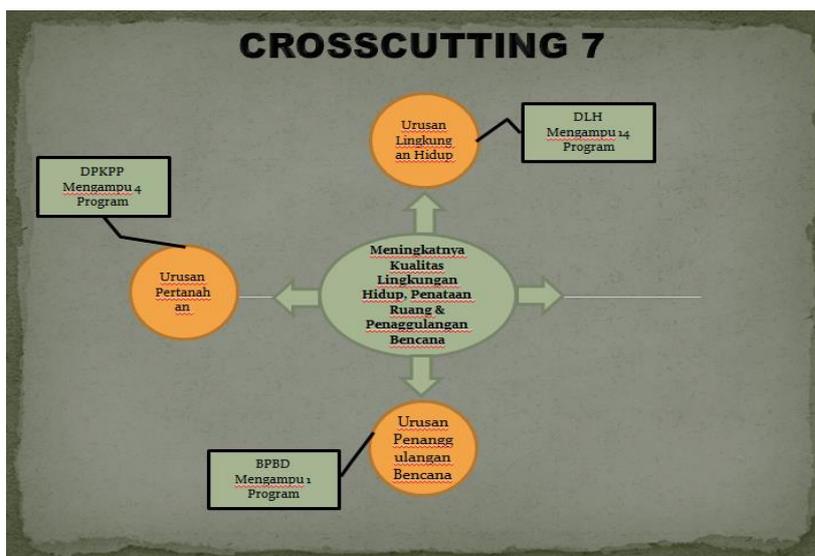
Layanan Infrastruktur (IKLI), dengan realisasi sebesar 7 dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 7, sehingga memperoleh capaian sebesar 100 % (Sangat



Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 17 program dengan rata – rata capaian program sebesar 91,26 %. Program dengan capaian tertinggi adalah Program pengelolaan perkeretaapian sebesar 99,73%, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program pengelolaan pelayaran dengan capaian 0 %. Sasaran strategis Lingkungan Daerah yang Kondusif yang didukung 17 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Pekerjaan umum penataan ruang, urusan perumahan dan permukiman, urusan perhubungan dan urusan perhubungan dengan 4 Perangkat Daerah pegampu sebagaimana table berikut:

7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan

Bencana didukung dengan 3 indikator yaitu Indeks penyelenggaraan penataan ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana, dengan rata-rata capaian sebesar 102,39 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut

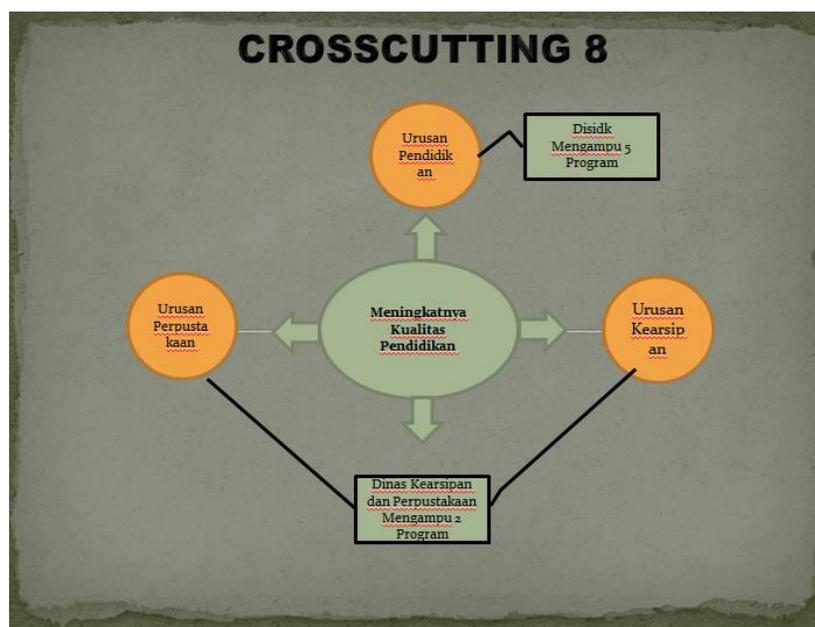


didukung melalui 19 program dengan rata – rata capaian program sebesar 83,60%. Program dengan capaian tertinggi adalah Program Perencanaan lingkungan hidup sebesar 99,57%, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan capaian 22,86%.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana yang didukung 19 program bersifat crosscutting dengan 3 Urusan, yaitu urusan Lingkungan Hidup, Urusan Penanggulangan Bencana dan Urusan Pertanahan 3 Perangkat Daerah pegampu yaitu DLH, BPBD dan DPKPP.

8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan didukung dengan 2 indikator yaitu Angka

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah , dengan rata-rata capaian sebesar 100,32 % (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 7 program dengan rata – rata capaian program sebesar 65,34%. Program dengan capaian tertinggi adalah Program

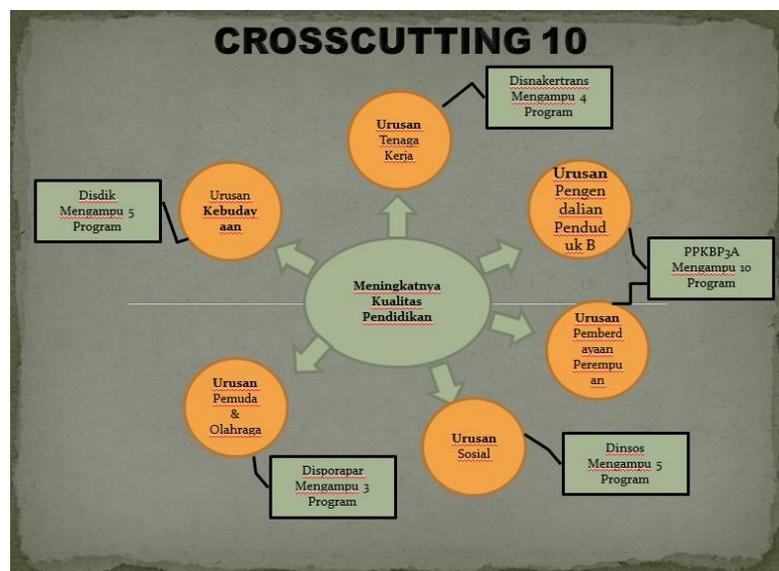


Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan capaian sebesar 100% , sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program Pendidikan dan tenaga kependidikan dengan capaian 43,19 %.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana yang didukung 7 program bersifat crosscutting dengan 2 Urusan, yaitu urusan Pendidikan, urusan kearsipan dan urusan perpustakaan, dengan 2 Perangkat Daerah pegampu.

9. **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** didukung dengan indikator Umur Harapan Hidup dengan realisasi sebesar 72,9 dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 72,99, sehingga memperoleh capaian sebesar 100,12% (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 4 program dengan rata – rata capaian program sebesar 90,01 %. Program dengan capaian tertinggi adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dengan capaian sebesar 97,57, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan capaian 66,42%. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kab. Paser Tahun 2021-2026 tidak bersifat crosscutting, seluruh program pendukung yang berkaitan dengan sasaran tersebut seluruhnya terkait langsung dengan urusan Kesehatan.

10. **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** didukung dengan 2 indikator yaitu Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan rata-rata capaian sebesar 96,95% (Sangat Tinggi) Pencapaian tersebut didukung melalui 27 program dengan rata – rata capaian program sebesar 87,98%. Program dengan capaian tertinggi adalah Program



pengelolaan system data gender dan anak sebesar 100%, sedangkan program dengan capaian terendah yaitu program perlindungan perempuan dengan capaian 16,61%.

Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat yang didukung 27 program bersifat *crosscutting* dengan 7 Urusan, yaitu urusan Tenaga Kerja, Pengendalian penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan dengan 5 Perangkat Daerah pegampu.

3.7 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL KINERJA

Pengukuran Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya hanya dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja ($\geq 100\%$)

Tabel 3.23
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023					Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian %
1	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	5,35	14,77	276,07	24.358.074.614	21.783.805.257	89,43	186,64
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	60,01	60,16	100,25	737.944.048.905	733.245.028.705	99,36	4,52
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81	82,694	102	21.478.275.516	20.156.010.919	93,84	
Rata-rata capaian					101,13	Rata-rata capaian		96,60	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	83,50	83,6	100,1	23.332.583.056	17.884.944.431	76,65	23,45
4	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	75	14	181,33	39.159.006.926	37.239.421.147	95,10	86,23
5	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7	7	100	1.512.372.519.253	1.380.197.118.911	91,26	8,74

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023					Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian %
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	59,18	64,02	108,18	1.838.095.973	1.787.412.353	97,24	18,79
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,56	72,57	97,33	102.556.955.100	55.500.832.163	54,12	
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	195	191,78	101,65	3.068.641.460	3.051.611.281	99,45	
Rata-rata capaian					102,39	Rata-rata capaian		83,60	
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,30	13,37	100,53	392.490.641.301	234.362.221.057	59,71	34,98
		Rata-rata Lama Sekolah	8,90	8,91	100,11	14.359.949.400	10.190.029.407	70,96	
Rata-rata capaian					100,32	Rata-rata capaian		65,34	
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,90	72,99	100,12	44.657.487.856	40.198.206.742	90,01	10,11
Total Rata-rata capaian					132,68	Total Rata-rata capaian		86,22	46,46



3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran per program Tahun 2023 yang menunjang sasaran strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Realisasi anggaran per program yang menunjang sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian					
		Pertumbuhan Sektor ekonomi lokal /non tambang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.367.907.855	11.205.483.340	90,60
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	108.867.086.188	104.214.761.322	95,73
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	163.000.000	157.669.998	96,73
			Program Perekonomian dan Pembangunan	5.387.717.711	4.920.233.021	91,32
			Program Penyuluhan Pertanian	8.319.982.905	7.814.218.933	93,92
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,561,346,821	5,304,509,951	95,38
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	105,665,779,423	103,604,440,580	98,05

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,522,338,700	1,445,904,390	94,98
			Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	1,184,570,800	1,101,567,835	92,99
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.884.166.500	11.957.323.912	92,81
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.982.426.780	5.643.637.274	94,34
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99.995.000	97.930.250	97,94
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.516.652.760	3.883.173.802	85,97
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1,234,999,800	1,217,777,641	98,61
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	4,761,883,472	4,619,083,079	97,00

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat			
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	1,818,520,000	1,189,687,385	65,42
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	619,289,100	562,018,036	90,75
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4,046,982,400	3.696.319.071	91,34
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	298.175.000	296.775.000	99,53
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	523.040.000	494.098.835	94,47
			Program Promosi Penanaman Modal	534.446.000	498.564.998	93,29
			Program Pelayanan Penanaman Modal	966.745.850	951.202.702	98,39
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	724.300.000	449.335.399	62,04
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	131.199.857	120.476.862	91,83
Rata-rata bobot capaian						

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
2 Berkembangnya Sektor Kepariwisata						
		Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Program Pengelolaan Tarik Wisata	814.548.450	732.470.300	89,92
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	30.120.000	0	0
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	11.046.124.596	9.111.985.687	82,49
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot	1.843.129.100	1.638.334.198	88,89
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.859.031.582	6.696.83r6.707	97,64
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	114.953.400	113.922.700	99,10
			Program Pengembangan Ekspor	91.387.800	86.767.900	94,94
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	465.662.486	454.831.777	97,67

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	418.516.800	417.372.808	99,73
			Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	54.999.600	48.597.350	88,36
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	154.999.800	103.989.650	67,09
			Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	304.897.300	285.198.181	93,54
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	179.158.900	162.992.780	90,98
			Program Pengembangan UMKM	1.980.544.800	1.930.505.219	97,47
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					
		Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	737.944.048.905	733.245.028.705	99,36
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	33.552.415.803	32.640.870.249	97,28
			Program Perencanaan, Pengendalian	2.513.007.732	2.270.228.766	90,34

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.960.891.684	4.763.728.123	96,03
			Program Kepegawaian Daerah	15.290.779.577	13.017.239.017	85,13
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.407.032.500	2.269.259.255	94,28
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	26.898.190.000	24.064.435.399	89,46
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.678.897.776	5.025.204.578	88,49
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.788.628.000	5.118.563.960	75,40
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.946.354.000	3.812.543.018	96,61
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	177.998.950	158.920.000	89,28
			Program Pengelolaan Arsip	450.225.390	413.658.223	91,88

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	512.527.700	501.838.662	97,91
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	108.423.800	108.423.800	100
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	665.413.200	551.705.817	82,91
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	182.396.000	125.266.737	68,68
			Program Penataan Desa	5.000.000	4.474.000	89,48
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	323.770.000	209.587.100	64,73
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.678.897.776	5.025.204.578	88,49
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.762.613.816	6.301.957.234	93,19
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.750.806.200	10.045.799.271	93,44
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.964.855.500	3.808.254.414	96,05

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
		Nilai IKM Daerah	Program Pendaftaran Penduduk	625.200.000	548.479.553	87,73
			Program Pencatatan Sipil	438.764.700	434.017.300	98,92
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.952.188.185	5.244.322.540	75,43
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.228.761.371	11.573.490.038	76,00
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	87.668.800	84.635.000	96,54
5 Meningkatkan Lingkungan Daerah yang Kondusif						
		Angka Kriminalitas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.181.109.900	6.573.777.729	91,54
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.313.173.381	4.683.148.832	88,14
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.980.439.500	1.971.864.480	99,57
			Program Peningkatan Peran Partai	20.333.317.095	19.996.788.194	98,34

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	302.487.250	295.620.645	97,73
			Progra Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	963.320.800	959.293.860	99,58
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.648.999.000	2.322.957.407	87,69
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	436.160.000	435.970.000	99,96

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur					
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Penyelenggaraan Jalan	845.741.289.530	749.108.624.706	88,57
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	13.937.608.864	13.559.423.400	97,29
			Program Penataan Bangunan Gedung	181.720.448.080	163.344.984.393	89,89
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.141.440.000	1.673.635.265	78,15
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	151.968.400.401	144.487.000.421	95,08
			Program Pengembangan Perumahan	2.100.625.500	2.076.686.209	98,86
			Program Kawasan Permukiman	8.141.078.776	7.693.788.883	94,51
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	14.316.159.300	14.296.316.736	99,86
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	225.360.578.438	222.106.114.442	87,69
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	62.173.396.130	58.256.098.842	93,70

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Air Minum			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.057.282.000	3.005.564.138	98,31
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	736.052.400	0	0
			Program Pengelolaan Pelayaran	374.773.800	0	0
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	113.800.000	113.494.748	99,73
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	104.200.000	101.632.400	97,54
			Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	88.200.000	86.820.000	98,44
			Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	297.186.034	286.934.328	96,55
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana					
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.838.095.973	1.787.412.353	97,24
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	894.370.000	890.522.800	99,57
			Program	3.484.069.440	3.361.828.832	96,49

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	184.917.050	182.927.500	98,92
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	260.044.000	240.074.400	92,32
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	173.991.300	165.139.125	94,91
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.218.615.309	3.156.061.082	95,10
			Program Pengakuan Keberadaan	119.750.000	81.048.500	67,68

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	63.806.000	51.200.000	80,24
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	116.770.000	107.746.000	92,27
			Program Pengelolaan Persampahan	29.293.698.880	28.367.470.868	96,84
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.000.000	10.443.459	41,77
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	37.483.334.935	8.568.717.62	22,86
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	417.808.000	403.272.340	96,52
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	26.408.232.126	18.079.083.457	68,46

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Untuk Pembangunan			
			Program Penetapan Tanah Ulayat	232.189.400	224.649.400	96,75
			Program Penatagunaan Tanah	180.358.660	179.364.400	99,45
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	3.068.641.460	3.051.611.281	99,45
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan					
		Angka Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	392.490.641.301	234.362.221.057	59,71
		Rata-rata lama Sekolah	Program Pengembangan Kurikulum	617.120.550	273.149.313	44,26
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	201.841.700	87.170.608	43,19
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.965.364.000	1.666.933.400	84,82
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	49.999.000	47.109.916	94,22
			Program Pembinaan Perpustakaan	11.519.029.350	8.109.071.370	70,40
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	6.594.800	6.594.800	100
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
		Umur Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	352.035.334.820	343.469.234.614	97,57

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Upaya Kesehatan Masyarakat			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	43.519.115.916	39.396.201.531	90,53
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	61.749.700	41.017.200	66,42
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.076.622.240	760.988.011	70,68
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat					
		Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	446.043.540	438.088.896	98,22
			Program Rehabilitasi Sosial	1.174.586.370	946.525.589	80,58
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	726.753.066	696.617.967	95,85
			Program Penanganan Bencana	571.590.420	503.863.218	88,15
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	258.701.236	258.218.483	99,81
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	16,660,300	16,575,000	99.49

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,238,947,501	2,179,664,956	97.35
			Program Penempatan Tenaga Kerja	334,110,260	330,989,758	99.07
			Program Hubungan Industrial	6,874,731,040	6,869,603,238	99.93
			Program Pengendalian Penduduk	527.845.000	500.072.730	94,74
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.119.117.050	3.623.305.597	87,96
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.817.304.960	1.454.291.589	80,02
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.190.628.174	1.156.584.811	97,14
			Program Perlindungan Perempuan	162.525.000	27.000.000	16,61
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.999.960	77.994.573	99,99
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender	20.259.690	20.259.300	100

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Dan Anak			
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	212.920.000	193.102.130	90,69
			Program Perlindungan Khusus Anak	480.137.070	370.807.973	77,23
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.248.914.300	1.001.447.719	80,19
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	36.349.401.468	31.198.475.234	85,83
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	700.000.000	655.696.990	93,67
			Program Pengembangan Kebudayaan	634.846.900	537.366.292	84,65
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.344.306.878	1.883.689.088	56,33
			Program Pembinaan Sejarah	2.818.152.000	2.385.062.275	84,63
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	0	-
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.276.726.400	1.161.043.807	90,94
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.136.663.819	8.970.294.649	98,18

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Dan Kelurahan			
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.528.297.000	4.143.849.692	91,51
Total						

Total APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.513.400.000.000,- yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 3.380.261.601.53,-. Anggaran tersebut merupakan anggaran program/kegiatan yang fokus pada pencapaian kinerja sasaran strategis beserta indikatornya atau program/kegiatan yang bersifat teknis, adapun selisih anggaran sebesar Rp. 1.133.138.398.470,- merupakan anggaran rutin / penunjang dan lainnya seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah.

Berdasarkan realisasi dari total APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.006.704.990.104,58,- atau 88,77 %. Sedangkan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2023 Kabupaten Paser sebesar Rp. 2.893.246.494.591 atau 88,27 %. Jika dibandingkan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan total APBD adalah 72%.

3.9 TINDAKLANJUT REKOMENDASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

❖ REKOMENDASI 1

Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kab. Paser dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi;



Tindak Lanjut :

Melakukan Rapat koordinasi dengan PD menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

❖ REKOMENDASI 2

melakukan identifikasi untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja

Tindak Lanjut :

Melakukan revisi terhadap pohon kinerja yang telah disusun, dengan melakukan identifikasi untuk



melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja, dengan melakukan rapat dengan seluruh PD terkait.

❖ **REKOMENDASI 3**

Memanfaatkan hasil reviu dokumen perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD, Renstra dan IKU periode yang baru;

Tindak Lanjut :

Melakukan rapat untuk mengkoordinasikan/menginformasikan keperangkat daerah bahwa hasil reviu SAKIP menjadi pedoman /acuan dalam penyusunan.



Rapat dengan PD untuk menginformasikan rekomendasi hasil evaluasi, rekomendasi agar menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang baru, dan pembahasan reviu pohon kinerja serta mengidentifikasi potensi crosscutting pada pohon kinerja

❖ **REKOMENDASI 4**

Melakukan reviu terhadap dokumen penjenjangan kinerja baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun perangkat daerah sehingga kualitas penjenjangan kinerja telah menerapkan kerangka logis (*logical framework*) pada saat penyusunannya.

Tindak Lanjut :

Reviu Penjenjangan Kinerja PD : Menginformasikan kepada PD melalui Rapat Kerja ataupun Surat biasa, untuk melakukan reviu terhadap dokumen penjenjangan kinerja, agar proses penyusunannya mempertimbangkan logical framework dan *critical success factor* .

Bagian Organisasi telah melakukan asistensi berkaitan dengan penyusunan penjenjangan kinerja yang dilaksanakan selama beberapa hari kepada seluruh PD di Lingkungan Kab. Paser



*Asistensi Penjenjangan Kinerja
pada Diskominfostaper*



*Asistensi Penjenjangan Kinerja
pada Dinas Disporapar*



*Asistensi Penjenjangan Kinerja
pada Disbunak*

❖ **REKOMENDASI 5**

Melengkapi dokumen Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dengan definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data;

Tindak Lanjut :

Mengkoordinasikan/membahas IKU bersama sama perangkat daerah terkait untuk melengkapinya dengan defenisi operasional



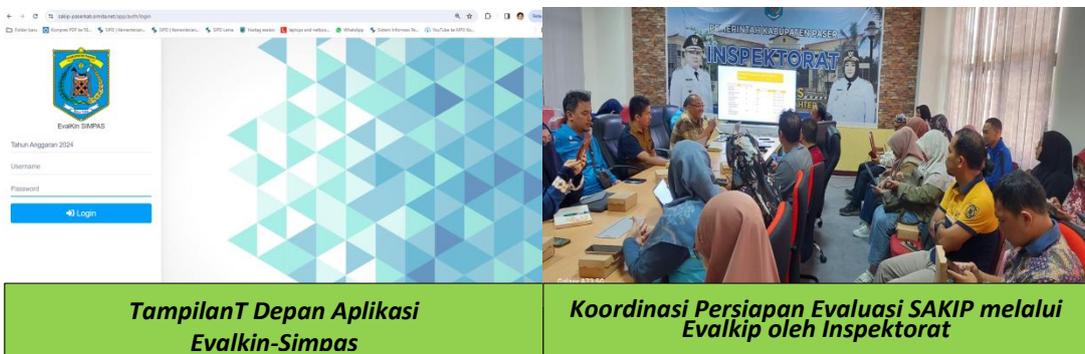
Rapat Koordinasi reuiu IKU melengkapi dengan definisi operasional

❖ REKOMENDASI 6

Memastikan semua Perangkat Daerah mengisi aplikasi SIKIPER dan memanfaatkan aplikasi SIKIPER dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah setiap triwulan.

Tindak Lanjut :

Dalam rangka efektivitas SIKIPER telah dilakukan integrasi SIKIPER kedalam



*TampilanT Depan Aplikasi
Evalkin-Simpas*

*Koordinasi Persiapan Evaluasi SAKIP melalui
Evalkip oleh Inspektorat*

SIMPAS dan Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja, telah dilakukan perbaikan dan penguatan dengan penambahan fitur pada SIMPAS-EVALKIN yaitu aplikasi yang berkaitan dengan SAKIP.

❖ **Rekomendasi 7**

Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja pada level nasional /internasional dan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah;

Tindak Lanjut :

Telah melakukan perbaikan laporan kinerja khususnya pada BAB III dengan melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja pada level Provinsi nasional /internasional dan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah;

DATA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KAB. PASER DENGAN PROVINSI, NASIONAL/INTERNASIONAL

Indikator Kinerja	Tahun 2023			
	Kabupaten Paser ¹	Provinsi Kalimantan Timur ²	Indonesia ³	Internasional ⁴
Pertumbuhan ekonomi	1,38	6,22	5,04	2,6
Indeks Gini	0,292	0,322	0,388	
Angka Kemiskinan	9,11	6,11	9,36	Perbedaan cara pengukuran sehingga tidak bisa dibandingkan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,72	5,31	5,32	5,3 (data tahun 2022)
Indikator IPM	74,96	78,20	74,39	
Angka Harapan Lama Sekolah	13,37	14,02	13,15	
Rata-rata Lama Sekolah	8,91	9,99	8,77	

Sumber:
 1. Data BPS Tahun 2023
 2. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/info/bitstreams/0245342f-38cd-4a7a-993e-353e874d505d/content>
 3. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/info/bitstreams/0245342f-38cd-4a7a-993e-353e874d505d/content>



❖ **Rekomendasi 8**

Memfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya

Tindak Lanjut :

informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan target baik pada penyusunan pada rencana kerja tahunan maupun target perjanjian kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Meningkatkan Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	1 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	Angka	5,41
2 Berkembangnya sektor kepariwisataan	2 Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum)	Angka	5,50
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3 Nilai SAKIP	Nilai	60,31 (B)
	4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5 Nilai IKM Daerah	Nilai	85
5 Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	6 Angka Kriminalitas	Angka	47
6 Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	7 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7
	8 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	65,82
7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,40
	10 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	194,5
	11 Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	13,35
8 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	12 Rata-rata lama sekolah	Rata-rata	6,90
	13 Limur Harapan Hidup	Angka	73,10
9 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	14 Angka Kemiskinan	Angka	9,00
10 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	15 Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	3,94

Perubahan Target pada PK 2024 memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja

❖ **Rekomendasi 9**

Meningkatkan kualitas hasil evaluasi SAKIP Internal dengan memberikan rekomendasi perbaikan secara langsung terhadap akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah

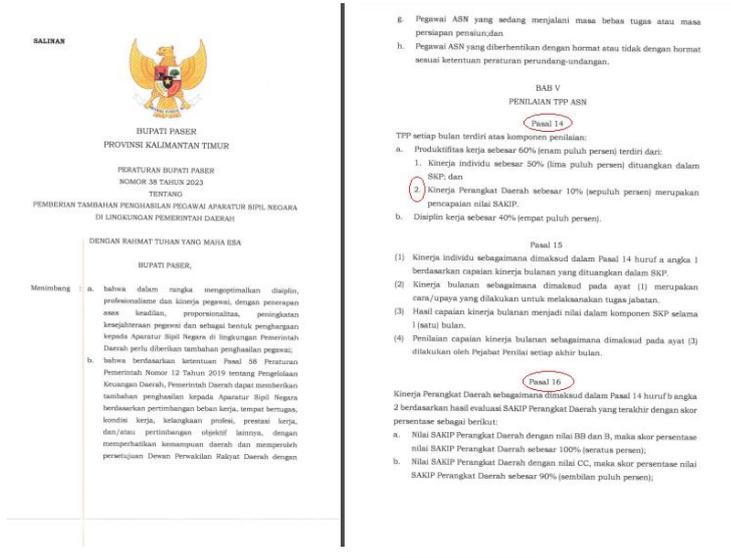
Tindak Lanjut :

- Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman baku setiap evaluator internal dan dalam perbaikan kualitas LHE.
- Rapat koordinasi Inspektorat dengan Perangkat Daerah, terkait pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2024 menggunakan aplikasi Evalkin



❖ **Rekomendasi 10**

Menetapkan Kebijakan pemberian Reward dan Punishment kepada Perangkat Daerah dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal yang dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah.



Tindak Lanjut :

Telah mengintegrasikan SAKIP kedalam kebijakan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Daerah, serta sebagai tolok ukur pengurangan TPP/sangsi dalam rangka menegakkan *reward and punishment* , melalui Perbup Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Paser pada Pasal 14 dan 16.

3.10 REVIU LKJIP KABUPATEN PASER DAN EKSPOS OLEH INSPEKTORAT

Sebagaimana ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaksanaan Reviu LKjip oleh Inspektorat dihadiri oleh Bag. Organisasi

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.



Berdasarkan hasil reviu

terdapat beberapa rekomendasi sebagai perbaikan LKjIP, hal tersebut telah

ditindaklanjuti yaitu indikator

kinerja telah dilengkapi

dengan sumber data dan

beberapa capaian indikator

telah diselaraskan dengan

data statistik terbaru, pada

BAB II telah ditambahkan isu

strategis, telah

menginformasikan total APBD



beserta realisasinya serta menginformasikan realisasi anggaran yang ditetapkan pada

perjanjian kinerja.



Pelaksanaan Ekspos Reviu LKJIP oleh Inspektorat dihadiri oleh Bag. Organisasi

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, serta dalam rangka mewujudkan goodgovernance pada Pemerintah Kabupaten Paser. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan periode kedua dari RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Paser.

Hasil analisis pencapaian keberhasilan terhadap pencapaian 4 (empat) tujuan dengan 10 (sepuluh) sasaran dan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan sangat tinggi, dengan rata-rata nilai capaian keseluruhan indikator sebesar **123,41 %**.

Tingkat rata-rata efisiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumber daya dari 10 (sepuluh) sasaran strategis adalah sebesar **41,16 %**. Tingkat efisiensi tersebut belum mencerminkan efektivitas penggunaan sumber daya khususnya dalam penggunaan anggaran, masih perlu mendapat analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran disbanding dengan realisasi per program/kegiatan.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Paser :

1. Melakukan rapat koordinasi/pembahasan dalam upaya perbaikan penyusunan penjenjangan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2. Melakukan reviu IKU melengkapi dengan dedfinisi operasional;
3. Melakukan pembahasan aplikasi SAKIP (Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappedalitbang, Diskominfostafer);
4. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah telah diterapkan melalui aplikasi oleh Inspektorat;
5. Perbaikan Laporan Kinerja dalam hal pengukuran dengan membandingkan capaian Kabupaten Paser dengan Provinsi, Nasional dan Internasional;
6. Melakukan Bintek SAKIP baik di level Kepala Perangkat Daerah, Pegawai yang menangani SAKIP dan evaluator SAKIP pada Inspektorat.
7. Penyusunan pedoman evaluasi AKIP Perangkat Daerah ; dan
8. Penyusunan pedoman teknis perjanjian kinerja, rencana aksi, pengukuran kinerja dan reviu laporan kinerja.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**BUPATI PASER
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tana Paser, 16 Oktober 2023

BUPATI PASER,

Dr. FAHMI FADLI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1. Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,73
2. Berkembangnya sektor pariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	5,35
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	60,01 (B)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	83,50
5. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	75
6. Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7
7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	59,18
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,56

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

	Indeks Risiko Bencana (IRB)	195
8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,30
	Rata-rata Lama Sekolah	8,90
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,90
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5

PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	522.720.673.374
2. Program Pengembangan Kurikulum	40.458.100
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.405.572.520
4. Program Pengembangan Kebudayaan	314.846.900
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.854.306.878
6. Program Pembinaan Sejarah	353.152.000
7. Program Pengelolaan Permuseuman	1.099.616.000
8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.922.911.380
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.201.046.000
10. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	61.749.700
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	75.734.200
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	106.003.400.000

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

13. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	40.024.250.130
14. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.000.000
15. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.025.000.000
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.470.308.864
17. Program Penataan Bangunan Gedung	158.496.439.471
18. Program Penyelenggaraan Jalan	773.800.055.600
19. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	613.800.000
20. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.238.095.973
21. Program Pengembangan Perumahan	1.069.600.000
22. Program kawasan permukiman	6.968.726.076
23. Program Perumahan Dan kawasan Permukiman kumuh	3.801.200.000
24. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	119.225.023.094
25. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	249.430.000
26. Program Penyelesaianganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk pembangunan	3.328.969.526
27. Program Penetapan Tanah Ulayat	71.241.400
28. Program Penatagunaan Tanah	131.538.660
29. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	3.365.700.000
30. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	1.724.821.611
31. Program Penanggulangan Bencana	2.649.840.000
32. Progam Pemberdayaan Sosial	382.223.540
33. Progam Rehabilitasi Sosial	613.695.350
34. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	559.958.066
35. Program Penanganan Bencana	352.785.420

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

36. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	162.051.236
37. Program Perencanaan Tenaga Kerja	16.660.300
38. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	738.120.101
39. Program Penempatan Tenaga Kerja	193.339.660
40. Program Hubungan Industrial	6.874.538.800
41. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	104.200.000
42. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	88.200.000
43. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	197.186.034
44. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	659.928.174
45. Program Perlindungan Perempuan	219.485.000
46. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.999.960
47. Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	20.259.690
48. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	297.365.000
49. Program Perlindungan Khusus Anak	
50. Program Pengendalian Penduduk	413.800.000
51. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.475.438.000
52. Program Pemberdayaan Danpeningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.751.716.960
53. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.234.999.800
54. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.428.923.472
55. Program Penanganan Kerawanan Pangan	854.520.000
56. Program Pengawasan Keamanan Pangan	489.289.100
57. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	894.370.000

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

58. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.069.573.400
59. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.993.885.477
60. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan beracun (B3) Dan Limbahbahan Berbahaya Danberacun (LIMBAH B3)	144.917.050
61. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	152.312.000
62. Program Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak Mha Yang terkait Dengan PPLH	29.750.000
63. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	160.550.300
64. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	59.863.000
65. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	116.770.000
66. Program Pengelolaan Persampahan	18.166.200.740
67. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	35.152.801.907
68. Program Pendaftaran Penduduk	425.200.000
69. Program Pencatatan Sipil	313.764.700
70. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.410.962.300
71. Program Penataan Desa	5.000.000
72. Program Peningkatan Kerjasama Desa	43.770.000
73. Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.184.397.576
74. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.118.489.350
75. Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.176.404.585
76. Program Pengelolaan Pelayaran	845.328.800

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

77. Program Pengelolaan Perkeretaapian	113.800.000
78. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.476.473.185
79. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.027.461.371
80. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	323.948.100
81. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	87.490.000
82. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	523.040.000
83. Program Promosi Penanaman Modal	236.600.000
84. Program Pelayanan Penanaman Modal	879.771.850
85. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	605.800.000
86. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	131.199.857
87. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	682.442.300
88. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.706.697.468
89. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.913.780.246
91. Program Pemasaran Pariwisata	581.849.100
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	853.747.555
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	509.971.500
94. Program Pembinaan Perpustakaan	11.068.584.350
95. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	6.594.800
96. Program Pengelolaan Arsip	141.319.700
97. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	153.339.200
98. Program Perizinan Penggunaan Arsip	49.335.200

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

99. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.486.088.300
100. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.522.502.060
101. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	49.995.000
102. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.244.212.060
103. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Tanaman pangan)	6.042.965.015
104. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Tanaman pangan)	56.917.854.000
105. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Dinas Tanaman pangan)	182.999.700
106. Program Penyuluhan Pertanian	5.034.629.905
107. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Perkebunan)	6.089.488.787
108. Program Penyediaan Dan pengembangan Prasarana pertanian (Dinas Perkebunan)	96.710.861.900
109. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	875.187.157
110. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dinas Perkebunan)	87.338.700
111. Program Perizinan Usaha Pertanian	125.800.000
112. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	54.999.600
113. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	262.000.000
114. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	54.999.80
115. Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	254.999.700
116. Program Pengembangan UMKM	1.343.848.900
117. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	54.998.800
118. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.145.582.820

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

119. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	69.993.400
120. Program Pengembangan Ekspor	34.997.800
121. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	429.481.586
122. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri	134.986.800
123. Program Perencanaan dan Pembangunan industri	3.041.984.900
124. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	159.975.000
125. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.267.872.732
126. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.794.712.200
127. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.186.739.920
128. program pengelolaan keuangan daerah	352.497.740.350
129. Program Pengelolaan barang Milik Daerah	9.717.940.000
130. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.847.985.500
131. Program Kepegawaian Daerah	11.292.098.794
132. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.498.698.500
133. Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.510.950.000
134. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	221.000.000
135. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan)	5.370.896.188
136. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan/Kel)	1.453.314.240
137. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.130.226.90
138. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Polit	15.646.562.574

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

139. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	202.487.250
140. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	719.999.400
141. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.503.999.000
142. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	737.944.084.905
TOTAL	3.380.261.601.530

 **BUPATI PASER,**

dr. FAHMI FADLI

**PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN PENJELASAN INDIKATOR
<p>1. Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian</p>	<p>Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser sangat dipengaruhi oleh sektor penggalian dan pertambangan khususnya batu bara yang dalam jangka panjang merupakan sumber ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu menggali sumber ekonomi alternatif yang dapat diperbaharui dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Salah satu sub sektor penopang PDRB Kabupaten Paser adalah sektor pertanian yaitu dari perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Paser merupakan penghasil terbesar ke 2 setelah Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur. Namun CPO diolah di luar Kabupaten Paser, dikarenakan tidak adanya industri hilirisasi atau turunan dari CPO misalnya minyak goreng. Sehingga nilai tambah (value added) yang lebih besar sektor pertanian (kelapa sawit) yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil dan perlu ditingkatkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal/non tambang</p>
<p>2. Berkembangnya sektor kepariwisataan</p>	<p>Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)</p>	<p>Salah satu potensi sumber daya alam Kabupaten Paser adalah banyaknya destinasi wisata yang tersebar di setiap kecamatan se Kabupaten Paser. Mengembangkan sektor pariwisata akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada tempat menginap wisatawan serta tumbuhnya usaha kecil menengah yang menyediakan makan dan minum.</p>

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Penilaian SAKIP sebagai indikator dalam melihat bagaimana mengetahui implementasi atas SAKIP serta tingkat akuntabilitas kinerja.
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
5. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan pada masyarakat di suatu daerah semakin tidak aman
6. Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Paser. IKLI yang menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.
7. Meningkatnya	Indeks	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Penataan Ruang	bertujuan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan menjawab permasalahan yang sejauh ini bermunculan dalam penerapannya.
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Paser
8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
	Rata-rata Lama Sekolah	Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak sampai usia 12 tahun keatas.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Umumr Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara.
10. Meningkatnya	Angka	Angka kemiskinan merupakan persentase

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

Kesejahteraan Masyarakat	Kemiskinan	penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat.
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

LAMPIRAN II
SOP PENGUMPULAN DATA DAN
LAPORAN KINERJA KABUPATEN

**LKjIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BIAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor SOP	068.2/ 17 /Org
Tanggal Pembuatan	13 Oktober 2019
Tanggal Revisi	25 Maret 2020
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan oleh	 KEPALA BAGIAN ORGANISASI, BAMBANG ABD. HALIQ, S.Kom, M.AP NIP 197002041996031002
Nama SOP	Pengumpulan Data dan Laporan Kinerja Kabupaten

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perpres 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 2. Perpres 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 3. PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelapaoran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memahami Prosedur Pengumpulan Data Kinerja 2. Menguasai Pengoperasian Komputer 3. Memahami tentang penyusunan Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten	1. Komputer/Laptop 4. LCD Projector 5. Lembar Kerja Evaluasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Data Kinerja yang disampaikan merupakan dokumen/data resmi yang bertanda tangan dan Stempel untuk kevalidan data	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

LKJIP KABUPATEN PASER TAHUN 2023

SOP Pengumpulan Data dan Laporan Kinerja Kabupaten

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Sekretaris Daerah	Kabag Organisasi	Tim Penyusun LKJIP	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Asisten Administrasi Umum	Wakil Bupati	Bupati	Inspektorat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3				4			5	6	7	8	9
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan data									Surat Perintah Pembentukan Tim	120 Menit	Draft Tim	
2.	Membentuk Tim									Draft Tim	300 Menit	Tim	
3.	Menyusun Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data									Tim	600 Menit	Rencana Kegiatan Pengumpulan Data Kinerja	
4.	Menghimpun Data Kinerja dan Menyusun Konsep Laporan									Data Kinerja	900 Menit	Konsep Pelaporan Hasil	
5.	Menganalisa Data									Draft Lapoan Kinerja	900 Menit	Draft 1	
6.	Mengoreksi (Editing Data Kinerja)									Draft 1	300 Menit	Draft 2	
7.	Melaporkan Hasil Pengumpulan Data									Draft 2	120 Menit	Draft 3	
8.	Melaksanakan Rapat Intern Tim dipimpin oleh Kabag Organisasi									Draft 3	360 Menit	Draft 4	
9.	Menyusun Data dan Laporan Kinerja Hasil Rapat Intern Tim									Draft 4	360 Menit	Final Draft	

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

N	Uraian	Pelaksa							Mutu			Ket	
		Sekretaris Darah	Kabag ganisasi	Tim Penyusun LKJIP	Kasubbag Kinerja RB	Ass Adm Umum	Wakil Bupati	Bupati	Inspek torat	Kelengkapan	Waktu		Output
7	2	3				4			5	6	7	8	9
1	Memberi Paraf Koordinasi Laporan									Final	24 Men	Final	
1	Menandatangani Laporan									Final	48 Men	Laporan yang ditandatangani	
1	Menyerahkan Laporan ke Inspektorat untu	k								Laporan yang ditandatangani	6 Men	Tanda	
1	Mengarsipkan									Laporan yang ditandatangani	1 Men	Arsi	

LAMPIRAN III
INDIKATOR KINERJA UTAMA



BUPATI PASER

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerahtingkat II Tapin,

- dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengansasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan rencanakerja pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian Indikator Kinerja Utama ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Paser

Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

I. INDIKATR KINERJA TUJUAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$ <p><i>Keterangan:</i></p> <p><i>R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%) PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun t</i> <i>PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun sebelumnya</i></p>	BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Peternakan dan Perkebunan 4. Dinas Perindagkop dan UKM 5. Dinas Ketahanan Pangan 6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Hasil Evaluasi RB dari KemenPan RB</i>	Kementerian PANRB	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi/ Semua PD

3	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$ <p>Keterangan: Xi dan Xj : Nilai pendapatan seorang individu N : Jumlah observasi X bar : Rata-rata pendapatan.</p>	BPS	Dinas PUTR, DPKPP, Dinas Lingkungan Hidup, Dishub, Disnakertrans
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indikator IPM	$IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))$ <p><i>Dimana:</i> <i>X(1) : Indeks harapan hidup</i> <i>X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah)</i> <i>X(3) : Indeks standar hidup layak</i></p>	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II. INDIKATR KINERJA SASARAN

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Pertumbuhn sektor ekonomi lokal/non tambang	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS	Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

2.	Berkembangnya Sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan Akomodasi dan makan minum)	Pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Restoran dan rumah makan dalam satu tahun berdasarkan rilis BPS	BPS	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB	KemenPANRB	Bappeda Litbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BPK-RI	Bappedalitbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	Jumlah nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survey IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah /Bag. Organisasi
5.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	BPS	Satpol PP Kesbangpol, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : 1. Ketersediaan Fisik (availability) 2. Kualitas Fisik (quality) 3. Kesesuaian (Appropriateness) 4. Efektifitas Pemanfaatan (Utility) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation) 6. Kontribusi pada Perekonomian	Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	Hasil Survei Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
----	---	---------------------------------------	---	---	-------------------------------------

		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ Dimana : IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil Survei Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
--	--	---	--	--	------------------------

		Indeks Risiko Bencana (IRB)	$IRB = R = H \times V \times E / C$ R : Risiko. Pengertian risiko : Risiko adalah peluang untuk Rugi Risiko adalah kemungkinan Kehilangan Risiko adalah ketidak Pastian Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan V : Vulnerability (kerentanan) H : Hazar (Bahaya) E : Elemen berisiko C : Capacity (Kapasitas)	Hasil Survei Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
--	--	-----------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------

**LKJIP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

8.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana : HLS ta = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pd tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas : dibagi Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas		
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser X 100% Jumlah penduduk		

10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), $y_i < z$ q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n=Jumlah penduduk</p>	BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	BPS	

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-171/2024

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk penyempurnaan dokumen Indikator Kinerja perlu meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/498/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2021-2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal Januari 2024

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

I. INDIKATOR TUJUAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN dan DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$ <p>Keterangan: R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%) PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun t PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun sebelumnya</p> <p>Defenisi Operasional : Pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan pertumbuhan PDRB. Untuk mengukur pertumbuhan output riil, maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menyesuaikan efek perubahan harga (inflasi).</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN dan DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi RB dari KemenPanRB Defenisi Operasional : Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi penilaian atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik	Kementerian PAN	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi/ Semua PD
3.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$ Keterangan: Xi dan Xj : Nilai pendapatan seorang individu N : Jumlah observasi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN dan DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>X bar : Rata-rata pendapatan Defenisi Operasional : Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ukuran Rasio Gini antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sedangkan rasio Gini bernilai 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna.</p>		
4.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indikator IPM	<p>$IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))$ Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak Defenisi Operasional : IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II. INDIKATOR SASARAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	$\frac{\sum \text{kontribusi PDRB dari sektor Pertanian Perkebunan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$ <p>Defenisi Operasional : Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di wilayah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu dan dipengaruhi oleh faktor –faktor selain pertambangan dalam hal ini adalah sektor pertanian. Salah satu sub sektor penopang PDRB Kabupaten Paser adalah sektor pertanian yaitu dari perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Paser merupakan penghasil terbesar ke 2 setelah Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur. Namun CPO diolah di luar Kabupaten Paser, dikarenakan tidak adanya industri hilirisasi atau turunan dari CPO misalnya minyak goreng.</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah,

			Sehingga nilai tambah (value added) yang lebih besar sektor pertanian (kelapa sawit) yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil dan perlu ditingkatkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal/non tambang		
2.	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	<p>Pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Restoran dan rumah makan dalam satu tahun</p> <p>Defenisi Operasional : usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dan sub sektor makanan dan minuman adalah kelompok perusahaan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk makanan dan minuman.</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	<p>Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB</p> <p>Defenisi Operasional : Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p>	Kementerian PAN	Bappeda Litbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p><i>Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</i></p> <p>Defenisi Operasional : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.</p> <p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui dimensi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. Tranparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Penyerapan anggaran; e. Kondisi keuangan daerah; dan f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	<p>Jumlah nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survey IKM</p> <p>Defenisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang</p>	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)

			tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.		
5.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	$\frac{\sum \text{Tindak Kriminal dalam 1 Tahun}}{\sum \text{Penduduk}}$ <p>Defenisi Operasional : Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan pada masyarakat di suatu daerah semakin tidak aman</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	X 10.000 Satpol PP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ketersediaan Fisik (availability)</i> 2. <i>Kualitas Fisik (quality)</i> 3. <i>Kesesuaian (Appropriateness)</i> 4. <i>Efektifitas Pemanfaatan (Utility)</i> 5. <i>Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)</i> 	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

			<p><i>6. Kontribusi pada Perekonomian</i></p> <p>Defenisi Operasional : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Paser. IKLI yang menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.</p>		
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	<p>(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100</p> <p>Defenisi Operasional : <i>Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan,</i></p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

			<p><i>Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan menjawab permasalahan yang sejauh ini bermunculan dalam penerapannya.</i></p>		
		<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p>	<p>$(30\% \times \text{IKU}) + (30\% \times \text{IKA}) + (40\% \times \text{IKTL})$ <i>Dimana :</i> <i>IKU = Indeks Kualitas Udara</i> <i>IKA = Indeks Kualitas Air</i> <i>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</i></p> <p>Defenisi Operasional : <i>Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan hidup menjadi ukuran yang penting. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses</i></p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>

			<p><i>pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</i></p>		
		<p>Indeks Risiko Bencana (IRB)</p>	<p>IRB = R = H x V E / C <i>R : Risiko. Pengertian risiko : Risiko adalah peluang untuk rugi Risiko adalah kemungkinan kehilangan Risiko adalah ketidakpastian Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan V : Vulnerability (kerentanan) H : Hazar (Bahaya) E : Elemen berisiko C : Capacity (Kapasitas)</i></p> <p>Defenisi Operasional : <i>risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (hazards) yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan roman muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut</i></p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

			<i>semakin meningkat. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu daerah.</i>		
8.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana :</p> <p>HLS_a^t = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pd tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> <p>Defenisi Operasional : Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			<p>Defenisi Operasional : Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam lamanya pendidikan</p> <p>(dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak sampai usia 12 tahun keatas.</p>		
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	<p>Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser Jumlah penduduk x 100%</p> <p>Defenisi Operasional : Umum Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Kesehatan
10.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan</p>		Dinas Sosial

			<p> $y =$ Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ $q =$ Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $n =$ Jumlah penduduk Defenisi Operasional : Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. </p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	<p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : $TPT =$ Tingkat pengangguran terbuka (%) $PP =$ Jumlah pengangguran (orang) $PAK =$ Jumlah angkatan kerja (orang) Defenisi Operasional : Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang </p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.		
--	--	--	---	--	--

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

LAMPIRAN IV
PENGHARGAAN-PENGHARGAAN
YANG DIRAIH PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2023



Penghargaan Piala Adipura Tahun 2023

Kabupaten Paser kembali menyabet Adipura yang kedua kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, capaian Piala Adipura ini mampu dipertahankan dibawah Kepemimpinan Bupati Paser dr.Fahmi Fadli. Piala Adipura Tahun 2023 diterima langsung Kadis DLH Kabupaten Paser, Achmad Syafari, mewakili Bupati Paser pada saat penyerahan, Selasa,(5/3/2024) di Auditorium Dr.Soejarwo,Gedung Manggala Wanabakti,Jakarta.



**Penghargaan Karya Bhakti Peduli
Satpol PP Tahun 2023**

Kabupaten Paser menjadi satu diantara 4 Kabupaten penerima penghargaan karya bhakti peduli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

Penghargaan ini diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktorat Jendral (Ditjen) Bina administasi kewilayahan Kemendagri RI, Amran. Prosesi penyerahan berlangsung di peringatan HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas yang diselenggarakan di Hotel Truntum Padang, Kota Padang, Sumatra Barat. Sabtu (2/3/2024).



**Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Tahun 2023**

Kabupaten Paser meraih Zona Hijau pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Hasil penilaian tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 tahun 2023 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Nilai 81,22, kategori B. Hasil Penilaian dibacakan oleh Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Hadi Rahman, pada Acara Penyerahan Predikat serta Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (31/1/24) di Kantor Ombudsman Balikpapan.



**Penghargaan Panji Keberhasilan Bidang
Pelayanan Publik Tahun 2023**

Sekretaris Daerah Drs. Katsul Wijaya, M.Si serahkan panji-panji keberhasilan ke enam perangkat daerah juga piagam penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Kepada Perangkat Daerah atas Penilaian Bidang Pelayanan Publik .

Tingkat Nasional Tahun 2023, penyerahan tersebut dilaksanakan bertepatan Apel Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) di halaman Pemkab Paser, rabu (17/1/2024).

Adapun enam perangkat yang menerima panji keberhasilan ialah Bidang Hukum dan HAM, diraih Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupten Paser, Bidang Informatika, diraih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Bidang Pembangunan Peternakan & Kesehatan Hewan, diraih Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bidang Bina Konstruksi, diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bidang Kondusifitas Daerah, Badan Kesbangpol, dan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat & Perlindungan Masyarakat Kategori Kabupaten, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.



Penghargaan Titik Lokasi Mandiri Seleksi Kompetensi P3K menggunakan CAT Tahun 2023

Dinilai telah melaksanakan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai sesuai SOP NSPK (Norma, Standar, Prisedur Dan Kriteria) yang ditetapkan PANSELNAS, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser diganjar penghargaan sebagai Apresiasi menjadi Titik Lokasi Mandiri Instansi Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan CAT BKN Tahun Formasi 2023, di Aula BKD Provinsi Kaltim, Samarinda (21/12/2023).



Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2023

Kabupaten Paser meraih penghargaan Kabupaten / Kota Peduli (KKP) Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Sri Wahyuni, MPP, didampingi Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Gun Gun Gunawan dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Drs. Katsul Wijaya, M.Si mewakili Bupati Paser. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Ballroom, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa(19/12/23).



Penghargaan Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023

Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia terhadap seluruh Pemerintah Daerah Se-Indonesia yang didukung oleh instansi pemerintah atas penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja. Hal ini menjadi harapan Pemerintah Indonesia Menuju Birokrasi Berkelas Dunia.

Kegiatan penganugerahan SAKIP diselenggarakan di Kawasan Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (6/12/22) dan melibatkan 639 Instansi Pemerintah dan lebih dari seribu peserta.



**Penghargaan Atas Pengendalian Inplasi Daerah
Tahun 2023**

Kabupaten Paser menjadi salah satu dari 34 daerah yang memiliki kinerja baik dan berhasil mengendalikan inflasi di daerah. Dengan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di daerahnya.

Bupati Paser dr Fahmi Fadli secara simbolis di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).



Penghargaan Multi Award Tahun 2023

Malam Penganugerahan Multi Award Tahun 2023 dihadiri Bupati Paser yang diwakili Sekretaris Daerah Katsul Wijaya. Acara diprakarsai oleh Universitas Mulawarman (Unmul) dan berlangsung di Ballroom Puri Senyur Samarinda (28/10).

Pada acara Multi Award Unmul 2023 Pemkab Paser meraih Winner - Cum Laude Award very Good Region in a Leading Profile Public Accountability dalam program unggulan Smart Service, serta masuk dalam 3 besar Nominator very Good Region In An Featured program on Administrative Service indikator Pelayanan Administrasi yang di terima langsung oleh Sekda Katsul Wijaya.



Penghargaan Penerbitan STD-B dan Akselerasi Program PSR Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) memperoleh 2 penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur Isran

Noor pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perkebunan di Hotel Bumi Senyur Samarinda, Rabu (27/9) malam.

Kedua penghargaan yang diterima oleh Kepala Disbunak Paser Djoko Bawono ini adalah penghargaan terkait capaian **Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)** dan **akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)** yang juga dikenal dengan istilah replanting kelapa sawit.



Penghargaan Merdeka Award Program Inovatif Tahun 2023

Kabupaten Paser meraih Merdeka Award 2023 Program Inovatif Pendampingan UMKM yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki beberapa waktu lalu di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima oleh Kadis Perindagkop Yusuf S.P, M.P mewakili Bupati Paser. Dan pada kesempatan ini Kadis Perindagkop Yusuf S.P, M.P didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana, S.sos, M.Si menyerahkan Merdeka Award 2023 Program Inovatif Pendampingan UMKM kepada Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli di ruang Bupati, Selasa (5/9/2023).



Penghargaan Lencana Darma Bakti Tahun 2023

Ketua Kwarcab Paser, Hj. Syarifah Masitah Assegaf, S.H., yang juga sebagai Wakil Bupati Paser menerima tanda penghargaan Lencana Darma Bakti dari Gubernur Kalimantan Timur. Penyematan dan pemberian penghargaan itu dirangkai dengan upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun, di mana selaku Pembina Upacaranya dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Isran Noor di halaman Dome, Balikpapan Sport dan Convention Center (BSCC) Balikpapan, Senin (28/8/2023).



Penghargaan Paritrana Award Tahun 2023

Bupati Paser dr. Fahmi Fadli secara langsung menerima penghargaan Paritrana Award Kategori Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan penerapan program Jaminan Kesehatan bagi Tenaga kerja Rentan di Wilayah Kabupaten Paser.

Pemberian pelayanan jaminan kesehatan Tenaga Kerja Rentan di wilayah Kabupaten Paser meliputi berbagai hal. Diantaranya, Marbot, Guru Ngaji, Nelayan, Pelaku UMKM, Nelayan, Petani serta tenaga Kesehatan di Desa.



Penghargaan Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2023

Kabupaten Paser meraih 38 penghargaan di Tahun 2023 ini. Penghargaan yang diraih adalah Panji dan Piagam Keberhasilan Pembangunan pada HUT ke 66 Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini Kabupaten Paser berhasil meraih Juara 1 untuk 7 Kategori, Juara II untuk 9 kategori dan Juara 3 untuk 13 kategori.

Penyerahan Panji dan Piagam Keberhasilan Pembangunan dari Bupati Paser kepada para kepala perangkat daerah dilaksanakan pada saat Apel Gabungan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Kantor Bupati Paser, Senin (19/6/2023).



**Penghargaan Satyalancana Wira Karya
Tahun 2023**

Bupati Paser dr Fahmi Fadli dianugerahi Satyalancana Wira Karya oleh Presiden RI. Ir.H. Joko Widodo. Satyalancana Wira Karya disematkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.Si, M.H pada pembukaan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XVI, yang berlangsung di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/6/2023).



**Penghargaan Investment Award
Tahun 2023**

Kabupaten Paser meraih Investment Award, kegiatan penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Bali Convention Center, Kamis Malam (25/5/2023).

Penghargaan Investment Award diberikan atas kerjasama dan partisipasi dalam pencapaian target serta realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Puguh Harjanto kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Bidang Penanaman Modal Sutrisno.



**Penghargaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023**

Kabupaten Paser terima Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Tahun 2023 setelah berhasil menjadi Kabupaten Terbaik 3 pada Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Provinsi Kategori Kabupaten di Samarinda, senin (17/04/23).

Piagam diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si kepada Bupati Paser dr. Fahmi Fadli diwakili Sekretaris Daerah Drs. Katsul Wijaya, M.Si dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Lamin Etam, Senin (17/4/2023).



**Penghargaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023**

Pemerintah Kabupaten Paser menerima piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan piagam penghargaan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur, Drs. Abdul Kholik yang diterima Bupati Paser, dr Fahmi Fadli atas nama Pemerintah Kabupaten Paser. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Jl. Kusuma Bangsa, Selasa (21/03/2023).

Piagam tersebut diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser pada umumnya dan Bupati Paser pada khususnya terhadap urusan keagamaan yang ada di Kabupaten Paser, seperti bentuk perhatian terhadap pelaksanaan MTQ, perhatian terhadap kegiatan MUI, perhatian terhadap pelaksanaan ibadah haji, dan lain - lain.



**Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)
Tahun 2023**

Pemerintah Kabupaten Paser menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas capaian cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage, terhitung sejak Maret 2023 sebanyak 284.604 jiwa penduduk Kabupaten Paser telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 292.879 jiwa atau sebesar 97,17 %. Artinya hampir semua masyarakat di Kabupaten Paser memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan.

Penghargaan UHC diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Paser yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Romif Erwinadi di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).



**Penghargaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional
Tahun 2023**

Bupati Paser dr Fahmi Fadli menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI pada Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2023, senin (13/2/23).



**Penghargaan dalam Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Tahun 2023**

Bupati Paser dr. Fahmi Fadli Berdasarkan undangan tersebut Kabupaten Paser menjadi salah satu dari 16 daerah penerima penghargaan karena memiliki komitmen, mendukung dan turut berkontribusi serta mampu bekerjasama dalam upaya pelestarian bahasa daerah yakni bahasa Paser.

FTBIN yang digelar di Golden Ballroom The Sultan Hotel (13/2/2023) dibuka secara resmi oleh mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan akan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 13-16 Februari.



Penghargaan Panji Pembangunan Tahun 2023

Kabupaten Paser berhasil meraih 9 Bidang Terbaik 2 dan 13 Bidang Terbaik 3 Panji - Panji Keberhasilan Pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Paser Hj. Syarifah Masitah Assegaf, S.H pada malam Anugerah dan Ramah Tamah di Plenary Hall Sempaja, Senin malam (09/01/2023).